

LAPORAN AKHIR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI SEKTOR PERTANIAN

*Women Empowerment
in Agriculture*

Martha Raggi Primanthi, Rumayya, Shochrul
Rohmatul Ajija, Muhammad Syaikh Rohman

Kerjasama antara
Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI)
dengan
Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan (BKMP)
Universitas Airlangga
Tahun Anggaran 2024

Laporan Akhir

Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian

Women Empowerment in Agriculture

Martha Rangi Primanthi

Universitas Airlangga

Rumayya

Universitas Airlangga

Shochrul Rohmatul Ajija

Universitas Airlangga

Muhammad Syaikh Rohman

Universitas Airlangga

Kerjasama antara
Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI)
dengan
Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan (BKMP)
Universitas Airlangga
Tahun Anggaran 2024

Penafian

Laporan Penelitian ini merupakan hasil penelitian “Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian” yang telah disusun dan dicetak oleh Badan Kerja Sama dan Manajemen Pengembangan (BKMP) Universitas Airlangga, bekerja sama dengan ‘Aisyiyah dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). INKLUSI berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Acknowledgement

Salah satu langkah mengikis permasalahan kesetaraan gender yang telah mengakar kuat di sektor pertanian Indonesia adalah meningkatkan keberdayaan perempuan. Laporan akhir penelitian ini berhasil mengidentifikasi kontribusi perempuan dalam sektor pertanian serta menyoroti berbagai tantangan ekonomi dan non-ekonomi yang dihadapi. Aspek-aspek ketidakberdayaan perempuan yang terungkap dalam observasi serta analisis data, didukung masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan, menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan perempuan di sektor pertanian.

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) atas dukungan pendanaan serta fasilitas yang memungkinkan terlaksananya penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI atas tanggapan serta masukan yang telah diberikan selama proses penyusunan rekomendasi. Apresiasi mendalam kami sampaikan pula kepada mitra *civil society organization* (CSO), yaitu Pimpinan Pusat dan Daerah 'Aisyiyah, atas sinergitas yang terbangun sejak awal hingga akhir proses penelitian demi terwujudnya tujuan-tujuan penelitian. Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para Dosen bidang Ilmu Ekonomi Pertanian serta Sosiologi dan Gender Universitas Airlangga atas *input* yang diberikan saran dan umpan balik yang memperkaya hasil penelitian ini. Tanpa dukungan dan kolaborasi dari semua pihak, penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan optimal. Harapan kami, temuan dan rekomendasi dalam laporan akhir ini meningkatkan keberdayaan perempuan di sektor pertanian. Seperti prinsip INKLUSI "*No one left behind*", kenaikan produktivitas dan kinerja pertanian dapat ditingkatkan beriringan dengan semakin setara dan berdayanya perempuan-perempuan di dalamnya.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iv
BAB I. Pendahuluan	02
BAB II. Tinjauan Literatur	07
Teori terkait pemberdayaan perempuan di sektor pertanian	07
Index pemberdayaan perempuan di sektor pertanian	09
BAB III. Data dan Metodologi	12
Data	12
Survei	12
Focus Group Discussion (FGD)	13
Metodologi	14
Pendekatan kuantitatif	14
Analisis Deskriptif	14
Indeks pemberdayaan perempuan di sektor pertanian	18
<i>Inference statistics</i>	20
Pendekatan kualitatif	24
Focus Group Discussion (FGD)	24
BAB IV Analisis Deskriptif Hasil Survei	28
Profil Demografi	28
Karakteristik Rumah Tangga	32
Keuangan Usaha Tani	35
Keterlibatan Responden dalam Organisasi	36
Usaha Tani	38
Permasalahan yang dihadapi dalam Usaha Pertanian	39
Kesehatan Ibu dan Bayi Responden	40
Layanan Pendidikan	41
Melek Digitalisasi	42
BAB V. Bagaimanakah Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian?	45
BAB VI. Mengapa Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian penting?	55
BAB VII. Apakah faktor penentu pemberdayaan perempuan di sektor pertanian?	58
BAB VIII. Kesimpulan Penelitian & Rekomendasi Praktis	65
Daftar Pustaka	67
Appendix	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Domain dan Indikator Indeks Pemberdayaan Perempuan dalam Pertanian	10
Tabel 2.	Daftar Narasumber FGD	13
Tabel 2.1	Jenis Variabel	23
Tabel 3.	Distribusi Usia Responden	29
Tabel 4.	Status Pernikahan	30
Tabel 5.	Status Responden sebagai Binaan 'Aisyiyah	30
Tabel 6.	Komparasi Pendidikan Terakhir Responden dan Suami	31
Tabel 7.	Jenis Pekerjaan yang Tercantum di KTP	31
Tabel 8.	Status dalam Pertanian	32
Tabel 9.	Status Tempat Tinggal	32
Tabel 10.	Jumlah Anak dalam Rumah Tangga dan Tanggungan Kepala Rumah Tangga	33
Tabel 11.	Bentuk BPJS	34
Tabel 12.	Pemanfaatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	34
Tabel 13.	Rata-rata Modal Usaha Responden dalam Sekali Produksi per m ²	35
Tabel 14.	Rata-Rata Persepsi terhadap Pinjaman Usaha Tani dan Frekuensi Pelatihan Pengelolaan Keuangan	35
Tabel 15.	Keterlibatan Responden terhadap Kelompok PKK dan Kelompok Petani	36
Tabel 16.	Frekuensi Bantuan untuk Kelompok Tani	37
Tabel 17.	Program Bantuan paling dibutuhkan	37
Tabel 18.	Komoditas yang Dihasilkan oleh Rumah Tangga dalam Setahun Terakhir	38

Tabel 19.	Jumlah Jam kerja Ke Sawah	38
Tabel 20.	Tanggapan Responden terhadap Permasalahan dalam Usaha Pertanian	39
Tabel 21.	Tanggapan Responden tentang Kegiatan Bertani selama Menyusui, Penjagaan Bayi, dan Tempat Penitipan Anak	40
Tabel 22.	Persepsi Responden terhadap Kesehatan Ibu dan Bayi	41
Tabel 23.	Jumlah Anggota Rumah Tangga Responden yang Sedang Bersekolah	42
Tabel 24.	Jarak Sekolah dari Lokasi Tempat Tinggal Responden	42
Tabel 25.	Persepsi Responden Terhadap Keadaan Internet dan Kemudahan Pengoperasian Smartphone	43
Tabel 26.	Persepsi Responden Terhadap Penggunaan Smartphone	43
Table 27.	Indeks Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian	45
Tabel 28.	Proporsi Perempuan Yang Tidak Berdaya Berdasarkan Komponen	49
Tabel 29.	Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Akses Bantuan Pemerintah - BPJS	55
Tabel 30.	Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Akses Bantuan Pemerintah – PKH	56
Tabel 31.	Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Akses Bantuan Pemerintah – BPNT	56
Tabel 32.	Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Permasalahan Administrasi	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian	12
Gambar 2. Komposisi Responden Berdasarkan Asal Daerah	28
Gambar 3. Kepemilikan BPJS	33
Gambar 4. Penyisihan Hasil Panen untuk Ditanam/Disimpan	36
Gambar 5. Status Kepemilikan dan Penggunaan Smartphone	42
Gambar 6. Kontribusi Setiap Komponen dan Bobot pada Indeks	53



BAB I

PENDAHULUAN

Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Sektor ini menjadi salah satu sektor penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar di Indonesia. Sektor pertanian berkontribusi terhadap PDB sebesar 11,8% dari total pendapatan nasional tahun 2023 triwulan I (BPS, 2023). Saat pandemi Covid-19, sektor pertanian menjadi sektor yang masih bertahan dan memiliki laju pertumbuhan yang positif (Pusat Data dan Informasi Pertanian, 2023). Hal ini disebabkan adanya pembebasan aliran rantai pasok produk-produk pertanian dari Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) (Octania, 2020). Selain itu, sektor ini merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan yang menguasai sebagian besar kehidupan masyarakat (Arifin, 2004).

Sektor pertanian memiliki beberapa sub-sektor meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Berdasarkan kontribusinya terhadap sektor pertanian, sub-sektor tanaman pangan menjadi penyumbang kedua terbesar untuk PDB sektor pertanian sekitar 28,46% pada tahun 2022 (Pusat Data dan Informasi Pertanian, 2023a). Hal tersebut membuktikan bahwa subsektor pertanian tanaman pangan salah satu penggerak sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Solana, 2021).

Dari sisi tenaga kerja, sektor pertanian adalah penyerap tenaga kerja terbesar. Pada Agustus 2023, jumlah penduduk Indonesia yang

bekerja di sektor pertanian mencapai 36,46 juta orang. Jumlah tersebut merupakan 26,07% dari total tenaga kerja Indonesia. Sebanyak 41,21% pekerja di sektor pertanian adalah pekerja di sub-sektor tanaman pangan. Jumlah pekerja tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang menggantungkan ekonominya pada sektor pertanian. Dari total pekerja di sektor pertanian, 14% pekerjanya adalah pekerja perempuan dan 86% adalah pekerja laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2023b).

Sektor pertanian berkontribusi penting terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sehingga sebagian masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Hal ini didukung dengan hasil penelitian di tingkat daerah, seperti penelitian oleh Dewi dkk. (2022) pada studi kasus Kota Pekalongan, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kampar serta Isbah dan Iyan (2016) pada studi kasus Provinsi Riau. Namun demikian, tingkat produktivitas pekerja di sektor pertanian masih relatif rendah, baik di negara berpendapatan rendah maupun negara maju, disebabkan kurangnya kesempatan kerja di di luar sektor pertanian atau di perkotaan (Herrendorf & Schoellman, 2015; Steensland & Zeigler, 2021). Tren produktivitas pertanian di Indonesia mulai stagnan sejak tahun 1990an (Fuglie, 2004). Dalam rentang 2018 hingga 2022, produktivitas sektor pertanian Indonesia berkisar antara 35-38 juta rupiah/orang/tahun, paling rendah dibandingkan sektor lainnya (Pusat Data dan Informasi Pertanian, 2023b). Rendahnya produktivitas diiringi dengan tingginya



ketergantungan terhadap sektor pertanian, berdampak pada semakin rendahnya pendapatan per kapita (Warsito, 2020).

Rendahnya pendapatan karena ketergantungan pada sektor pertanian menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan di pedesaan. Hampir 75% penduduk miskin dunia hidup di desa dan bergantung pada sektor pertanian (Akpan & Zikos, 2023). Berdasarkan data Susenas Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan di Indonesia sebanyak 11,74 juta orang (7,29%), sedangkan jumlah penduduk miskin pedesaan adalah 14,16 juta orang (12,22%). Dengan demikian, tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Salah satu faktor penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan adalah dengan meningkatkan produktivitas pertanian (Kadir & Amalia, 2016; Ligon & Sadoulet, 2018; Ogundipe dkk., 2016; Saifuloh & Nursini, 2022). Daerah perkotaan bergantung pada sektor industri, sehingga kebijakan pemerintah di sektor industri berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah berperan penting dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian, terutama di pedesaan.

Kebijakan pemerintah berperan penting terhadap pengembangan sektor pertanian, terutama kebijakan yang berbentuk dukungan terhadap petani. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat berupa pemberian subsidi, program-program, bantuan keuangan, pelatihan,





serta peraturan dan perundang-undangan (Barbosa, 2024). Seluruh kebijakan yang ada ditujukan untuk peningkatan hasil serta produktivitas pertanian. Akan tetapi, kebijakan seperti pemberian subsidi justru menimbulkan masalah informasi asimetris dan kegagalan pasar. Syarat untuk mendapatkan subsidi seperti pupuk tidak diinformasikan secara merata, sehingga alokasi pupuk subsidi menjadi tidak efisien dan tepat sasaran. Selain itu, program pemerintah berupa bantuan penyediaan alat-alat produksi pertanian hanya diketahui oleh petani-petani yang memiliki akses informasi dan mampu memenuhi persyaratan. Semakin banyak saluran informasi yang tersedia, semakin kuat internalisasi informasi pertanian oleh petani (Yue dkk., 2023). Lebih lanjut, komoditas pertanian seperti gabah juga masih bergantung pada intervensi pemerintah, yakni penetapan harga pembelian pemerintah (HPP). Pemerintah Indonesia melakukan intervensi melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah Dan Beras, yang ditujukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan melindungi pendapatan petani.

Ketergantungan berlebihan petani pada bantuan dan kebijakan pemerintah merupakan masalah yang mendesak. Namun, penting untuk menyadari bahwa lingkungan di sektor pertanian juga memiliki masalah mengenai kesetaraan gender yang telah mengakar (valerio, 2024; Gosh dkk., 2021). Tidak hanya laki-laki namun perempuan juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pertanian baik pada masa pra-panen maupun pasca-panen. Bahkan dalam beberapa kegiatan pertanian perempuan dapat melakukannya dengan lebih baik dari pada laki-laki (Gosh dkk., 2021). Namun, meskipun perempuan memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja pertanian, mereka tidak diperlakukan setara dengan laki-laki (Glover, 2014). Pekerja perempuan cenderung memperoleh upah yang lebih rendah dan memiliki prospek kemajuan yang lebih kecil karena kontrol sumber daya produktif mereka yang terbatas (Valerio, 2024; Glover, 2014).

Label bahwa perempuan yang bekerja di sektor pertanian hanyalah seorang “penolong suami” atau “pembantu ekonomi keluarga” menjadikan opini dan keberadaan mereka seringkali diabaikan. Petani perempuan seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya penting, seperti tanah, layanan kredit, serta keterbatasan untuk dapat berkomunikasi kepada pejabat desa atau penyuluh pertanian karena sering kali penyuluh hanya mau berkomunikasi dengan petani laki-laki (Gosh dkk., 2021; Valerio dkk., 2024). Keterbatasan akses ini dapat menghambat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pada penelitiannya, Acosta dkk. (2020) mengungkapkan bahwa walaupun petani perempuan (istri) seringkali ditanya dan memberikan opini mereka mengenai usaha tani. Namun, pada akhirnya keputusan mengenai kegiatan pertanian sebagian besar diambil oleh petani laki-laki (suami).

Selain itu, petani perempuan sering kali tidak memiliki kendali atas input dan teknologi pertanian yang akan digunakan, sehingga membatasi produktivitas dan ruang gerak mereka dalam usaha tani. Valerio dkk., (2024) dan Akter dkk., (2017) mengungkapkan dalam penelitiannya, meskipun kepemilikan aset dalam pertanian adalah milik bersama, perempuan memiliki pengaruh yang sangat terbatas mengenai penerapan praktik inovatif dan teknologi yang akan digunakan serta bagaimana mekanisme penjualan pasca panen. Kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk hal tersebut tampaknya dipengaruhi oleh norma



unsplash.com/DelighenDee

gender yang menetapkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pengambil keputusan utama dalam rumah tangga. Selain itu, kurangnya komitmen terhadap pengarusutamaan gender di lembaga penyuluhan, yang tercermin dari absennya data tersegregasi dan mekanisme monitoring terhadap partisipasi perempuan dalam pelatihan, secara signifikan membatasi akses dan manfaat yang dapat dinikmati oleh petani perempuan dari program-program pemerintah.

Dinamika isu kesetaraan gender ini diperburuk oleh Revolusi Hijau. Meskipun meningkatkan hasil pertanian, Revolusi Hijau membuat perempuan termarginalkan karena mekanisasi dan inovasi teknologi lebih berpihak pada laki-laki. Seperti yang ditunjukkan oleh Negin dkk., (2009), perubahan ini menggeser banyak peran penting perempuan di bidang pertanian. Keterlibatan petani perempuan di sektor pertanian merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu memberi mereka akses ke peluang pengembangan diri seperti pelatihan dan program-program pemberdayaan dapat menjadi cara untuk mempertahankan peran kepemimpinan mereka di bidang pertanian dan meningkatkan kontribusi mereka pada sistem pangan yang lebih berkelanjutan dan adil.

Beberapa studi telah membahas mengenai ketidaksetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di negara sedang

berkembang. Namun, masih sedikit studi yang membahas tentang pemberdayaan perempuan di sektor pertanian di Indonesia dan studi yang sudah ada masih berfokus pada satu atau beberapa isu terkait kesetaraan gender. Kemudian dan yang paling penting, masih sedikit studi yang menggunakan indikator yang komprehensif dengan metodologi yang sah (kuantitatif dan kualitatif) dan belum ditemukan hasil penelitian terkait pemberdayaan perempuan dengan menggunakan data terkini. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini menggunakan metode gabungan (kuantitatif dan kualitatif) yang komprehensif untuk 1. menganalisis kontribusi perempuan dalam sektor pertanian, 2. Menganalisis permasalahan ekonomi dan non-ekonomi terkait pemberdayaan perempuan dalam sektor pertanian di Indonesia, 3. Memberikan rekomendasi program pemberdayaan perempuan di sektor pertanian.

Laporan ini disusun dengan susunan sebagai berikut: 1. Latar belakang masalah, 2. Latar belakang teoritis penelitian, 3. Uraian data dan metode penelitian yang digunakan, 4. Analisis deskriptif hasil survey, 5. Hasil Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Determinan pemberdayaan perempuan, 6. Kesimpulan penelitian, dan yang terakhir 7. Rekomendasi praktis berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN LITERATUR



pixaby.com/HoiAn

Teori terkait pemberdayaan perempuan di sektor pertanian

Pemberdayaan perempuan telah lama menjadi pembahasan dalam isu kesetaraan gender. Konsep pemberdayaan perempuan merupakan sebuah konsep yang kompleks dan bervariasi karakteristiknya (Amber & Fakhar, 2019). Pemberdayaan erat kaitannya dengan dinamika kekuasaan dan memiliki interpretasi yang beragam berdasarkan pemahaman yang berbeda tentang kekuasaan (Rowlands, 1995). Pemberdayaan mempunyai nilai intrinsik dan nilai instrumental (Narayan, 2007). Dalam konteks pembangunan, pemberdayaan memerlukan definisi yang tepat dengan mempertimbangkan aspek individu dan kolektif (Rowlands, 1995) dan dapat bersifat ekonomi, sosial, atau politik (Narayan, 2007).

Istilah pemberdayaan erat kaitannya dengan istilah agensi yang dikemukakan oleh Sen (1989), yakni seseorang yang kompeten mengerjakan sesuatu selaras dengan keinginan pribadinya. Interpretasi istilah pemberdayaan kemudian mengalami perkembangan. Dalam penelitiannya, Alkire dkk. (2013) menyatakan

bahwa terdapat tiga definisi pemberdayaan dari tiga literatur yang banyak dirujuk, yakni Kabeer (1999), Narayan (2002), dan Alsop dkk. (2006). Kabeer (1999) mendefinisikan pemberdayaan sebagai perluasan kemampuan orang untuk membuat pilihan hidup yang strategis. Perlu ditekankan bahwa kemampuan tersebut sebelumnya tidak diberikan kepada mereka. Jadi, seseorang telah kehilangan kekuasaannya sebelum ia menjadi berdaya. Lebih lanjut, Kabeer (1999) menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi utama pemberdayaan, yaitu sumber daya (akses dan klaim masa depan pada sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial), agensi (tahapan pengambilan keputusan, negosiasi, dan bahkan penipuan dan manipulasi), serta pencapaian (hasil kesejahteraan).

Narayan (2002, 2005) mengartikan pemberdayaan sebagai perluasan kemampuan dan aset orang miskin untuk ikut serta, bernegosiasi, mempengaruhi, mengendalikan, serta meminta pertanggungjawaban lembaga yang memberikan pengaruh ke kehidupan mereka. Elemen utama dari pemberdayaan mencakup akses terhadap informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas, serta kapasitas organisasi lokal. Selanjutnya, Alsop dkk. (2006) mendefinisikan pemberdayaan sebagai kapasitas individu maupun kelompok untuk menghasilkan pilihan efektif (membuat pilihan yang selanjutnya diubah menjadi tindakan dan hasil yang diinginkan). Konsep Alsop dkk. (2006) ini selaras dengan konsep agensi yang dikemukakan oleh Sen (1989).

Definisi pemberdayaan oleh Kabeer (1999), Narayan (2002), dan Alsop dkk. (2006) bermuara pada satu pengertian, yakni kemampuan untuk membuat pilihan. Dari menjalani pilihan tersebut, seseorang mendapatkan hasil yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam arti luas, pemberdayaan adalah kebebasan memilih dan bertindak yang menunjukkan tingkat otoritas dan kendali seseorang atas sumber daya dan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Secara keseluruhan, pemberdayaan memainkan peran penting dalam meningkatkan tata kelola, akses terhadap layanan, dan pengentasan kemiskinan (Narayan, 2007). Batliwala (2007) mengembangkan gagasan dan mengonseptualisasikan pemberdayaan sebagai proses sosial-politik, di mana kekuatan politik, sosial, dan ekonomi bergeser antara dan di antara individu maupun kelompok sosial.

Definisi-definisi yang telah disebutkan selaras dengan definisi pemberdayaan perempuan oleh Mehra (1997), yakni perluasan pilihan serta kemampuan perempuan untuk

menjalankan pilihan tersebut. Pemberdayaan perempuan merujuk pada kemampuan perempuan untuk membuat pilihan hidup yang strategis, di mana sebelumnya mereka tidak memiliki kemampuan tersebut (Malhotra dkk., 2009). Oleh karena itu, pemberdayaan adalah inti dari proses untuk mempertahankan manfaat bagi perempuan di tingkat individu, rumah tangga, komunitas, dan tingkat yang lebih luas (Malhotra dkk., 2009). Pemberdayaan melibatkan tindakan untuk meningkatkan status perempuan melalui literasi, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesadaran (Alvarez dan Lopez, 2013). Hal tersebut didukung oleh Bayeh (2016) yang dalam studinya menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah tentang membekali dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk membuat keputusan yang menentukan kehidupan melalui berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Perempuan memiliki peranan penting dalam sektor pertanian. Pada tahun 2010, sekitar 43% pekerja sektor pertanian di negara berkembang adalah perempuan. Ketika sektor utama negara berkembang mulai berpindah ke sektor industri, terjadi peralihan tenaga kerja laki-laki dari sektor pertanian ke sektor industri sehingga sektor pertanian semakin banyak diisi pekerja perempuan (Asadullah & Kambhampati, 2021). Lebih lanjut, data Food and Agriculture Organization atau FAO menunjukkan, perempuan di negara kurang berkembang yang aktif secara ekonomi menyatakan pertanian merupakan kegiatan utama mereka. Secara global, terdapat 48% perempuan yang menyatakan hal serupa. Dengan demikian, sektor pertanian juga menjadi sektor penting bagi perempuan (Doss, 2014).

Perempuan menghadapi di sektor pertanian banyak menghadapi permasalahan ketidaksetaraan. Perempuan mengambil bagian dalam kegiatan pertanian hampir sepanjang hari, seperti produksi, beternak, menyediakan makanan bagi laki-laki di ladang, tetapi sayangnya kontribusi serta peran mereka kurang diperhatikan (Amin dkk., 2009; Sadaf & Luqman, 2006). Perempuan yang bekerja di pertanian tidak banyak diakui, dihargai, dan dibayar dibawah standar di Asia Selatan (Gillespie dkk., 2019). Perempuan sering kali tidak memiliki kuasa penawaran (*bargaining power*) untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi, menunjukkan adanya kesenjangan upah gender di sektor tersebut (Rao, 2011). Selanjutnya, dari sisi kepemilikan lahan dan produktivitas sektor pertanian, perempuan cenderung mengolah lahan dengan produktivitas

lebih rendah dari laki-laki (Ali dkk., 2016; Kilic dkk., 2015). Dari sisi akses sumber daya, petani perempuan menghadapi keterbatasan akses informasi dan penyuluhan, serta menghadapi kendala kredit (Kabunga dkk., 2012; Peterman dkk., 2014). Pada sisi pemberdayaan, terjadi kesenjangan gender yang signifikan dalam rumah tangga pertanian (Kilic dkk., 2015) sehingga perempuan yang terlibat dalam sektor pertanian tidak dapat memaksimalkan kontribusinya (Asadullah & Kambhampati, 2021).

Isu pemberdayaan perempuan menjadi fokus utama berbagai negara sebagai akibat dari munculnya masalah ketidaksetaraan gender, salah satunya pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. Pemberdayaan perempuan akan meningkatkan kesetaraan gender, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada proses pembangunan ekonomi. Kesetaraan gender dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan dua arah. Dalam hal ini, bias gender akan menghambat pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi akan mendorong kesejahteraan gender (Duflo, 2012). Hasil akhir yang diharapkan dari pemberdayaan perempuan di sektor pertanian adalah perempuan yang berdaya. Perempuan berdaya adalah anggota rumah tangga pertanian yang tegas, dan dalam hal ini tingkat pemberdayaannya bergantung pada keyakinan dan kemampuan dirinya sendiri untuk mengendalikan berbagai dimensi pertanian, seperti produksi dan sumber daya pertanian (Mobarok dkk., 2021).



Index pemberdayaan perempuan di sektor pertanian

Women Empowerment in Agriculture Index (WEAI) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Indeks Pemberdayaan Perempuan dalam Pertanian merupakan ukuran multidimensi pemberdayaan perempuan di sektor pertanian (Alkire dkk., 2013; Martinez dkk., 2020). Indeks ini terdiri dari dua sub indeks: sub indeks yang menilai pemberdayaan di lima domain (produksi, sumber daya, pendapatan, kepemimpinan, dan waktu) dan sub indeks yang mengukur kesetaraan gender dalam rumah tangga (Alkire dkk., 2013). WEAI telah berkembang menjadi serangkaian indikator yang digunakan untuk melacak dan memantau pemberdayaan secara global (Martinez dkk., 2020). Namun, mengadaptasi WEAI ke konteks negara tertentu menghadirkan tantangan, termasuk modifikasi kuesioner dan pembuatan indeks (Gupta dkk., 2019).

Alkire dkk., (2013) menilai pemberdayaan perempuan sektor pertanian dalam lima domain. Lima domain tersebut adalah produksi, sumber daya, pendapatan, kepemimpinan, dan waktu.

1. Produksi, domain produksi menjelaskan mengenai pengambilan keputusan dalam produksi pertanian. Pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada dua hal yaitu, pengambilan keputusan untuk input produksi dan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan yang dia yakini. (1) pengambilan keputusan untuk input produksi dinilai dari apakah pengambilan keputusan dilakukan sendiri atau bersama-sama terkait produksi pertanian dan sejauh mana individu tersebut merasa mampu mengambil keputusan dalam aspek-aspek kehidupan rumah tangga jika dia ingin melakukan produksi pertanian. (2) kemampuan untuk bertindak sesuai dengan yang diyakini mencerminkan pemahaman seseorang mengenai situasi dan bagaimana dia menyeimbangkan motivasi yang berbeda-beda untuk menghindari hukuman atau ketidaksetujuan sosial dan bertindak sesuai dengan keyakinannya.
2. Sumber Daya, domain sumber daya ini terkait

dengan kepemilikan, akses, dan kekuasaan pengambilan keputusan mengenai sumber daya produktif. Sumber daya tersebut seperti tanah, ternak, peralatan pertanian, dan lain sebagainya. Indikator yang terdapat dalam domain ini antara lain, kepemilikan tanah dan aset; keputusan mengenai pembelian, penjualan, atau pengalihan tanah dan aset; dan akses dan pengambilan keputusan tentang kredit. Indikator kepemilikan tanah dan aset mengindikasikan apakah seseorang memiliki aset atas nama pribadi (tunggal) atau bersama. Indikator keputusan mengenai pembelian, penjualan atau pengalihan tanah dan aset menggambarkan siapa yang mengambil keputusan dalam pembelian, penjualan atau pengalihan tanah dan aset yang dimiliki. Terakhir indikator akses dan pengambilan keputusan tentang kredit untuk menganalisis bagaimana pengambilan keputusan untuk memperoleh kredit dan cara menggunakannya dari berbagai sumber kredit.

3. Pendapatan, domain pendapatan ini terkait dengan apakah penggunaan terkait pemasukan dan pengeluaran dikendalikan secara tunggal atau bersama-sama dalam rumah tangga. Domain ini mengukur pengambilan keputusan dalam penggunaan pendapatan dari hasil pertanian.
4. Kepemimpinan, dalam domain kepemimpinan menyangkut kepemimpinan dalam masyarakat. Kepemimpinan dapat diukur dari partisipasi dalam kelompok sosial, kelompok ekonomi, maupun kelompok keagamaan. Selain itu, kepemimpinan ini juga dapat diukur dengan kenyamanan individu untuk berbicara di depan umum atau mengungkapkan pendapatnya.
5. Waktu, domain ini terkait dengan alokasi waktu yang digunakan dalam kegiatan produksi, domestik dan kepuasan terhadap waktu yang tersedia untuk aktivitas dalam waktu luang. Indikator yang digunakan untuk menganalisis alokasi waktu adalah beban kerja untuk kegiatan produksi dan domestik yang diukur dengan membuat rincian aktivitas selama 24 jam. Selain itu, kepuasan individu dalam menghabiskan waktu luangnya untuk rekreasi (menonton TV, bercengkrama dengan tetangga, dll) juga menjadi indikator dalam domain waktu ini.

Tabel 1. Domain dan Indikator Indeks Pemberdayaan Perempuan dalam Pertanian

No.	Domain	Indikator
1.	Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan untuk input produksi • Otonomi dalam produksi
2.	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan aset • Keputusan mengenai pembelian, penjualan, atau pengalihan tanah dan aset • Akses dan pengambilan keputusan tentang kredit
3.	Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kendali atas penggunaan pendapatan
4.	Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan dalam kelompok masyarakat • Berbicara di depan umum
5.	Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Beban kerja • Waktu luang

Sumber: Alkire dkk. (2013)

Selain lima domain tersebut, (Alkire dkk., 2013) juga menilai pemberdayaan melalui *gender parity*. *Gender Parity* ini dimasukkan agar tidak kehilangan bagian penting yang berkontribusi dalam pelemahan pemberdayaan. Hal ini disebabkan adanya kerugian dalam mencapai tujuan pembangunan jika tidak memperhatikan kesetaraan gender. Beberapa penelitian menunjukkan ketimpangan gender akan berdampak pada produktivitas pertanian. Di Ethiopia, pengelola lahan laki-laki 23,4% lebih produktif daripada perempuan, dengan 10,1% disebabkan oleh perbedaan sumber daya dan karakteristik (Aguilar dkk., 2015). Kesenjangan serupa terjadi di Nigeria, Tanzania, dan Uganda yang disebabkan oleh kerugian petani perempuan dalam hal ukuran lahan, kualitas, dan penggunaan input (Mukasa & Salami, 2015). Ketidaksempurnaan pasar memperburuk kesenjangan ini, dengan akses terbatas ke pasar tenaga kerja dan kredit yang masing-masing menyumbang 34% dan 29% dari kesenjangan produktivitas (Palacios-López & López, 2015). Oleh karena itu, gender parity menjadi penting untuk dimuat dalam pengukuran WEAI.

Amber & Fakhar (2019) melakukan penelitian mengenai pemberdayaan perempuan dengan studi kasus di Punjab, Pakistan. Dia menganalisis keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kesetaraan gender dalam rumah tangga di sektor pertanian menggunakan WEAI. Hasil penelitian menemukan bahwa domain kepemimpinan, pendapatan, dan sumber daya berkontribusi paling besar terhadap ketidakberdayaan perempuan, dimana perempuan sangat dirugikan dalam kepemilikan aset dan pengambilan keputusan terkait transfer dana dan kredit. Laki-laki tidak sepenuhnya berdaya di

kelima domain tersebut tetapi secara relatif memiliki banyak keuntungan dalam banyak indikator dibandingkan pasangan mereka. Secara keseluruhan di Punjab, perempuan relatif lebih berdaya dalam domain waktu dan produksi.

(Shradha & Kumar, 2020) menggunakan WEAI untuk mengumpulkan data empiris terkait pemberdayaan perempuan di empat lokasi di India. Shradha & Kumar menemukan bahwa perempuan pada umumnya tidak berdaya di keempat lokasi dalam bidang pertanian. Kurangnya keterlibatan dalam kelompok swadaya masyarakat yang terkait dengan pertanian, kepemilikan tanah, dan pengelolaan pendapatan merupakan faktor utama pelemahan bagi perempuan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya menyesuaikan indeks dengan konteks pertanian tertentu agar dapat memberikan dampak yang berarti terhadap kebijakan publik.

Konsep pemberdayaan perempuan memiliki konteks atau keadaan dan terminologi yang berbeda. WEAI menjadi suatu alat untuk memantau pemberdayaan. Namun WEAI tidak sepenuhnya bisa menggambarkan waktu yang digunakan oleh petani perempuan. Penggunaan WEAI dengan metode survei perlu berfokus pada desain survei dan pentingnya memiliki staf yang terlatih untuk melaksanakan wawancara penggunaan waktu (Seymour dkk., 2020). Dalam penelitian penting untuk menyesuaikan indeks dengan konteks pertanian lokal untuk mendapatkan dampak kebijakan yang berarti (Gupta dkk., 2019). Terlepas dari tantangan, WEAI tetap menjadi alat yang berharga untuk mengukur pemberdayaan perempuan di bidang pertanian di berbagai situasi (Martínez dkk., 2020).

BAB III

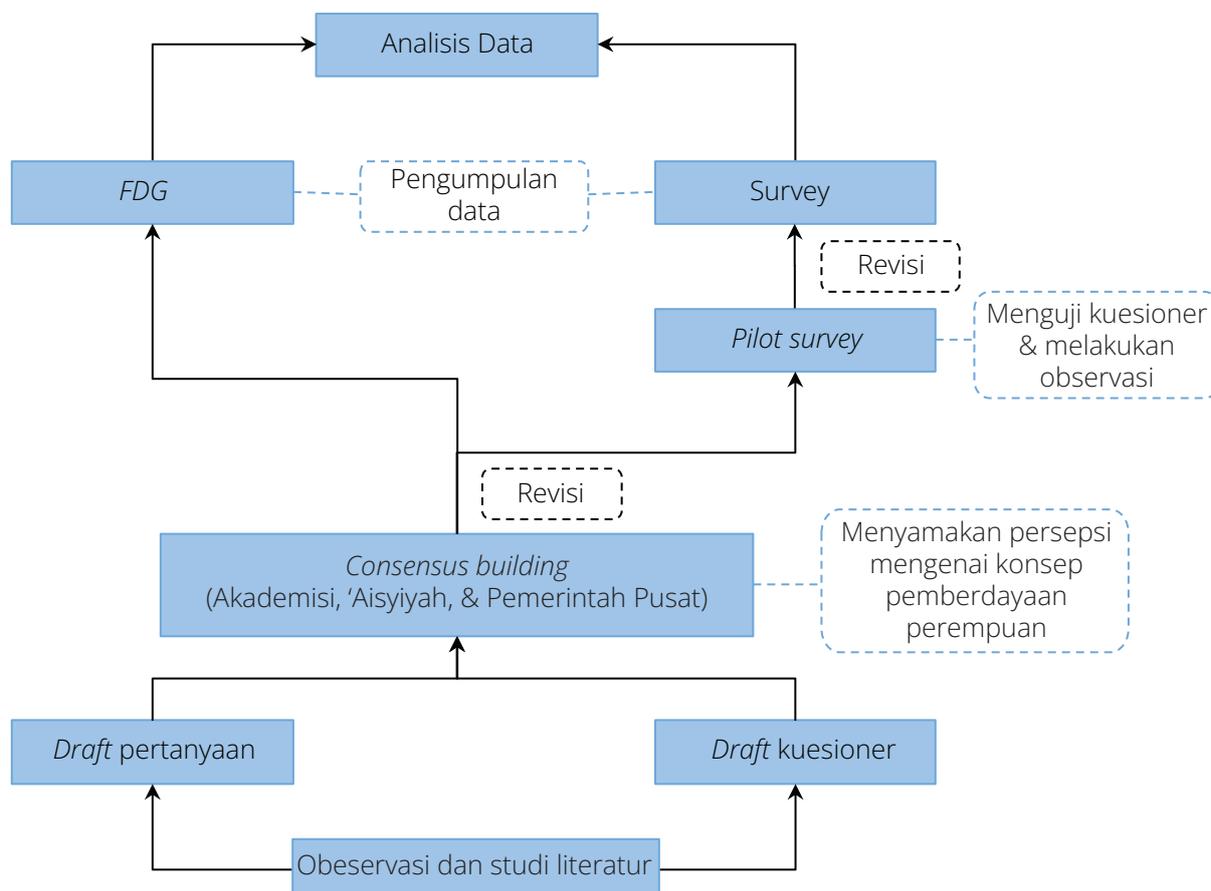
Data dan Metodologi



DATA

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu survei dan Focus Group Discussion (FGD). penggunaan kombinasi dua teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. Instrumen yang

digunakan untuk pengumpulan data disusun berdasarkan literatur yang ada dan diperkuat dengan melakukan consensus building dengan akademisi di bidang gender dan pertanian, perwakilan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, dan Kementerian terkait.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Survei

Survei dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari target responden, yaitu 1400 responden petani perempuan yang tersebar di empat kota/kabupaten daerah penelitian yaitu, 1. Probolinggo, Jawa Timur (400 responden); 2. Garut, Jawa Barat (300 responden); 3. Kolaka, Sulawesi Tenggara (400 responden); dan 4. Lahat, Sumatera Selatan (300 responden). Responden dibagi menjadi dua kategori, yaitu petani perempuan binaan 'Aisyiyah dan petani perempuan bukan binaan 'Aisyiyah. Dalam proses pengumpulan data, pihak mitra turut dilibatkan dan berperan penting dan proses pengambilan data seperti pada saat penentuan lokasi survei dan pemilihan petugas survei. Ada dua kelompok petugas yang terlibat dalam pengambilan data yaitu, enumerator dan supervisor. pengambilan data dilakukan

secara langsung oleh enumerator dan kemudian di konfirmasi oleh supervisor untuk memastikan keabsahan data.

Kuesioner dirancang secara komprehensif untuk dapat menggambarkan isu-isu dan dapat mengukur variabel-variabel yang relevan dengan pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. Instrumen survei terdiri dari 17 bagian yang mencakup profil individu dan rumah tangga responden, peran responden di dalam rumah tangga pertanian dan masyarakat, Keuangan dan akses kredit usaha tani, pengetahuan responden mengenai kesehatan dan teknologi digital.



Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion dilaksanakan untuk menggali data kualitatif dari kelompok kecil narasumber yang dipilih secara *purposive*. FGD diselenggarakan di lima kota/kabupaten dan di setiap kota/kabupaten ada dua FGD yang diselenggarakan secara bersamaan, yaitu FGD dengan pemerintah dan para petani perempuan & kelompok tani di daerah setempat. Tabel 2. menjelaskan secara lebih rinci mengenai FGD yang dilakukan dan narasumber yang terlibat dalam FGD tersebut.

FGD dilakukan sesuai dengan panduan yang telah disusun. panduan ini terdiri dari latar belakang & tujuan penelitian, jadwal, dan ketentuan FGD serta daftar pertanyaan yang akan disampaikan. pertanyaan-pertanyaan diskusi dirancang untuk menggali informasi yang mendalam mengenai pemberdayaan perempuan di sektor pertanian dari sudut pandang narasumber.

Tabel 2. Daftar Narasumber FGD

No	Kota/Kabupaten	Kelompok FGD	Jumlah Partisipan
1.	Probolinggo	Pemerintah	9
		Petani	12
2.	Garut	Pemerintah	11
		Petani	11
3.	Kolaka	Pemerintah	12
		Petani	10
4.	Lahat	Pemerintah	19
		Petani	10
5.	Hulu Sungai Utara	Pemerintah	8
		Petani	14

METODELOGI

Pendekatan Kuantitatif

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode analisis statistik dengan mengumpulkan data-data yang kemudian diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari penelitian yang dilakukan. Statistik deskriptif tersusun dari karakteristik kumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi sampel atau seluruh populasi. Dalam penelitian kuantitatif, terdapat dua langkah utama setelah melakukan pengumpulan data (Bhandari, 2020b). Langkah pertama adalah analisis statistik, yaitu melakukan deskripsi terhadap karakteristik dari data, seperti rata-rata, rentang, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian, serta hubungan antar variabel. Langkah selanjutnya adalah statistik inferensial, yaitu menentukan apakah data menerima atau menolak hipotesis penelitian dan apakah data tersebut dapat diterapkan secara umum ke populasi yang lebih besar.

Pada penelitian ini, terdapat tiga jenis statistik deskriptif utama.

(i) Distribusi Frekuensi

Distribusi frekuensi bertujuan untuk menyusun dan merangkum data, sehingga memudahkan dalam pemahaman mengenai frekuensi atau banyaknya objek tertentu dalam kumpulan data. Distribusi frekuensi menyajikan tabel atau grafik yang mencakup frekuensi setiap nilai dari suatu variabel dalam bentuk angka atau persentase. Dengan distribusi frekuensi, dalam penelitian dapat diidentifikasi mengenai pola umum dan anomali dalam data. Salah satu penggunaan distribusi frekuensi dalam penelitian yang dilakukan adalah terkait komposisi responden atau petani perempuan berdasarkan asal daerahnya, pada data tersebut mencakup jumlah responden dan persentasenya dari tiap-tiap daerah.

(ii) Tendensi Sentral

Pengukuran tendensi sentral mencakup perhitungan rata-rata, median, dan modus. Rata-rata (*mean*) adalah metode yang paling umum. Untuk menemukan rata-rata, jumlah dari semua angka dibagi dengan banyaknya angka.

$$\text{Mean} = \frac{(\text{Jumlah dari semua nilai})}{(\text{Total respons})}$$

Selain rata-rata, dalam bagian ini juga menghitung nilai tengah atau median dalam kumpulan data. Untuk menemukan median, setiap nilai dari data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nilai atau angka yang berada di tengah dari deretan nilai tersebut disebut dengan median. Jika ada dua angka di tengah, maka mencari rata-rata dari kedua angka tersebut dan dibagi dengan dua sebagai total dari banyaknya data. Sedangkan, modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam data. Kumpulan data bisa tidak memiliki modus, memiliki satu modus, atau lebih dari satu modus. Modus dapat ditemukan dengan mengurutkan data dari yang terendah hingga tertinggi dan mencari nilai atau angka yang paling sering muncul.

(iii) Variabilitas

Ukuran variabilitas memberikan informasi mengenai sebaran data. Dalam pengukuran ini terdapat tiga perhitungan yang mencerminkan aspek penyebaran yang berbeda-beda, yaitu *range*, *standard deviation*, dan *variance*. *Range* memberikan gambaran mengenai seberapa jauh data yang paling ekstrem. Cara menghitung *range* yaitu dengan melakukan pengurangan nilai tertinggi dengan nilai terendah. Selain itu, ada *standard deviation* (*s* atau *SD*), yaitu rata-rata variabilitas dalam kumpulan data. Perhitungan *standard deviation* bertujuan



untuk memberikan informasi terkait rata-rata, seberapa jauh setiap skor dari *mean*. Semakin besar *standard deviation*, maka kumpulan data semakin bervariasi. Untuk mendapatkan *standard deviation*, dapat dilakukan langkah-langkah berikut:

1. temukan rata-rata (*mean*) dari data,
2. kurangi setiap nilai dalam data dengan hasil rata-rata, maka didapatkan deviasi dari rata-rata,
3. kuadratkan setiap deviasi dan jumlahkan semua deviasi dalam bentuk kuadrat,
4. jumlah deviasi kuadrat dibagi dengan $N - 1$, dengan N adalah jumlah dari banyaknya tanggapan,
5. yang terakhir, temukan akar kuadrat dari angka yang ditemukan dari hasil perhitungan.

Variance adalah bentuk kuadrat dari *standard deviation*, maka dari itu simbol dari *variance* adalah s^2 . *Variance* menunjukkan tingkat penyebaran dalam kumpulan data. Ketika *variance* semakin besar hubungannya dengan *mean*, maka datanya semakin tersebar.

Analisis pemberdayaan perempuan di sektor pertanian memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan, antara lain karakter individu, karakter rumah tangga, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Dari tiap kriteria atau empat faktor besar tersebut dapat diuraikan menjadi atribut-atribut yang lebih kecil.

(a) Profil Demografi

Profil demografi merupakan informasi mengenai karakteristik individu yang terdiri dari beberapa atribut tertentu. Dalam penelitian ini, memasukkan beberapa atribut untuk mendukung penelitian, yaitu usia petani perempuan sebagai responden, asal daerah, hubungan responden dengan kepala rumah tangga, tingkat pendidikan terakhir responden dan pasangannya dalam rumah tangga, jenis pekerjaan yang tercantum pada KTP responden, serta status responden melakukan aktivitas bertani sehari-hari (pemilik lahan, penggarap lahan sendiri, atau buruh tani). Atribut-atribut tersebut menghasilkan data kuantitatif yang kemudian digunakan sebagai alat analisis penelitian.

Asal daerah berisi komposisi responden berdasarkan asal kecamatan. Tiap-tiap responden yang berasal dari kecamatan yang sama dijumlahkan dilakukan perhitungan persen

tase jumlah responden yang berasal dari kecamatan yang sama. Usia responden dikelompokkan tiap sepuluh tahun, sehingga terdapat enam kelompok usia, yaitu kurang dari 25 tahun, 25 – 34 tahun, 35 – 44 tahun, 45 – 54 tahun, 55 – 65 tahun, dan lebih dari 65 tahun. Untuk hubungan responden dengan kepala rumah tangga disesuaikan dengan status perkawinan saat ini. Tingkat pendidikan terakhir responden dan pasangannya dipisahkan, lalu dilakukan penjumlahan untuk tiap tingkat pendidikan berdasarkan individunya, yaitu pasangan atau responden. Sedangkan, informasi mengenai pekerjaan disesuaikan dengan dua hal, yaitu pekerjaan yang tercantum pada kartu identitas atau KTP dan status responden dalam bertani.

(b) Karakteristik Rumah Tangga

Karakteristik rumah tangga mencakup sejumlah informasi, antara lain status tempat tinggal, jumlah anak dalam rumah tangga, jumlah tanggungan kepala keluarga, status kepemilikan BPJS, dan status penerima bantuan. Informasi yang diperoleh bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi dari petani perempuan.

Status tempat tinggal terkait dengan hak kepemilikan rumah, seperti rumah milik keluarga atau orang tua, rumah kontrak atau sewa, atau milik sendiri. Jumlah anak dalam rumah tangga dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan kepala keluarga adalah dua hal yang berbeda. Jumlah anak adalah jumlah dari anak yang dimiliki dalam suatu rumah tangga, sedangkan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan kepala keluarga adalah semua anggota dalam rumah tangga yang masih dibiayai atau hidupnya masih ditanggung oleh kepala keluarga. Informasi mengenai BPJS termasuk status kepemilikan dan bentuk BPJS yang dimiliki. Untuk data status penerima bantuan, dengan melakukan perhitungan jumlah responden yang mendapatkan dan tidak mendapatkan program bantuan dari pemerintah.

(c) Keuangan Usaha Tani

Keuangan usaha tani menjadi salah satu indikator penting dalam mengetahui kondisi perekonomian petani perempuan. Atribut-atribut dalam keuangan usaha tani mencakup rata-rata modal



usaha pertanian, tanggapan mengenai layanan pinjaman atau kredit, pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan, dan perilaku menabung responden.

Rata-rata modal usaha pertanian dihitung dalam sekali produksi per meter persegi (m^2), hasilnya menunjukkan rata-rata modal usaha yang bervariasi tergantung pada komoditas yang ditanam. Tanggapan responden terhadap pinjaman dalam usaha tani juga diperhitungkan dengan mengumpulkan tanggapan responden mengenai apakah dengan adanya pinjaman dapat membantu responden dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Sedangkan, perilaku menabung mengumpulkan informasi mengenai tanggapan responden terhadap penyisihan uang untuk ditabung dan tempat menabung responden yang bervariasi. Pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan menjadi informasi tambahan yang penting untuk menilai pengetahuan responden terkait pengelolaan keuangan, dalam penelitian ini memperhitungkan tingkat frekuensi responden dalam mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan.

(d) Keterlibatan dalam Organisasi

Partisipasi responden dalam organisasi menjadi salah satu indikator faktor sosial. Keterlibatan dalam organisasi memiliki atribut-atribut tertentu, termasuk keterlibatan responden terhadap kelompok PKK dan kelompok tani, tingkat frekuensi dan bentuk bantuan yang diterima oleh responden selama bergabung dalam kelompok, serta kendala yang dialami oleh responden dalam kelompok.

Peneliti mengumpulkan informasi mengenai keikutsertaan responden pada kelompok PKK dan kelompok tani, lalu melakukan perhitungan frekuensi dan persentase responden yang merupakan anggota dari kelompok PKK atau kelompok tani dan bukan anggota dari kelompok PKK atau kelompok tani. Untuk responden yang merupakan anggota kelompok tani, maka dilakukan pengumpulan informasi mengenai program bantuan yang diterima oleh responden selama bergabung dalam kelompok tani tersebut. Selain bantuan yang diterima, informasi mengenai kendala yang dialami responden selama menjadi anggota kelompok tani juga diperlukan dalam penelitian ini.

(e) Usaha Tani

Di Indonesia, usaha tani bermacam-macam berdasarkan komoditasnya, seperti tanaman pangan, hortikultura, hingga perkebunan.

Komoditas tanaman pangan yang utama adalah padi, jagung, dan kedelai. Komoditas hortikultura yang utama adalah sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat. Komoditas perkebunan yang utama adalah kelapa sawit, karet, dan kopi. Pengumpulan data terkait usaha tani ini mencakup beberapa atribut, yakni komoditas yang dihasilkan dalam setahun terakhir, rata-rata pendapatan per bulan berdasarkan status lahan, dan jumlah jam kerja.

Melalui *survey* yang dilakukan, dapat diketahui proporsi dari komoditas yang dihasilkan dalam setahun terakhir dari total komoditas yang ditanam oleh responden. Untuk rata-rata pendapatan tiap panen ditinjau dari status lahan yang dikerjakan oleh responden. Status kepemilikan lahan ada dua, yaitu lahan milik sendiri dan lahan sewa. Rata-rata pendapatan tiap panen diklasifikasikan menjadi kelompok-kelompok pendapatan dengan rentang nominal pendapatan tertentu. Terakhir, waktu yang dihabiskan responden untuk ke sawah atau ladang untuk bertani setiap harinya bervariasi.

(f) Permasalahan yang Dihadapi dalam Usaha Tani

Dalam melakukan analisis, penelitian ini juga mengumpulkan informasi mengenai kendala atau permasalahan yang dialami oleh responden dalam pekerjaannya sebagai petani. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh responden





mulai dari penggunaan alat pertanian, perolehan bibit tanaman dan pupuk atau pestisida, kegiatan pasca panen, dan kerugian akibat dari gagal panen.

Kendala terkait penggunaan alat pertanian bermacam-macam. Beberapa kendala utama yang dialami oleh responden terkait penggunaan alat adalah tidak memiliki alat, adanya keterbatasan fisik untuk menjalankan alat yang berat, alat yang rusak atau kurang canggih, dan penggunaan alat yang terlalu susah untuk responden. Kemudian, responden juga mengalami permasalahan dalam memperoleh bibit dan pupuk atau pestisida. Informasi yang dikumpulkan terkait permasalahan bibit dan pupuk atau pestisida adalah penyebab dari kesulitan responden dalam memperoleh bibit dan pupuk atau pestisida. Kendala lainnya, seperti pelaksanaan kegiatan pasca panen juga mengumpulkan informasi mengenai alasan responden mengalami kesulitan dalam kegiatan pasca panen. Kendala terakhir yang dihadapi oleh responden adalah hasil panen yang buruk atau mengalami gagal panen dengan penyebab yang bervariasi. Frekuensi dan persentase responden yang mengalami setiap kendala dihitung dan diklasifikasikan berdasarkan penyebab terjadinya kendala.

(g) Kesehatan Ibu dan Bayi

Analisis kesehatan ibu dan bayi menjadi poin penting dalam melakukan penelitian terkait pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. Peneliti melakukan pengumpulan informasi dan data mengenai status responden terhadap aktivitas pertanian saat hamil dan pasca melahirkan, tanggapan responden mengenai penjagaan anak dan tempat penitipan anak, serta persepsi responden terhadap kesehatannya sendiri dan bayinya.

Status responden terhadap aktivitas pertanian saat hamil dan pasca melahirkan, serta alasan mereka melakukan aktivitas pertanian selama hamil dan pasca melahirkan menjadi informasi yang relevan untuk memperoleh pemahaman dan mendukung kegiatan analisis terkait pember-

dayaan perempuan di sektor pertanian. Hal tersebut penting dalam penelitian karena berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan responden, pembagian kerja dan gender di sektor pertanian, dampak ekonomi, serta kebijakan dan program pemberdayaan. Peneliti juga melakukan *survey* mengenai tanggapan responden tentang kebutuhannya terhadap layanan penitipan anak.

(h) Layanan Pendidikan

Jumlah anggota rumah tangga yang bersekolah, jarak fasilitas pendidikan dari lokasi tempat tinggal serta waktu tempuh menjadi determinan dari analisis layanan pendidikan. Responden memberikan informasi mengenai jumlah anggota rumah tangga yang sedang menempuh pendidikan, jika tidak ada yang sedang menempuh pendidikan, maka dapat dituliskan bahwa tidak ada anggota rumah tangga yang bersekolah. Jarak sekolah dari rumah responden juga diperhitungkan dalam analisis. Dalam penelitian ini, data jarak sekolah dari lokasi tempat tinggal menggunakan satuan meter. Sedangkan, waktu tempuh dari rumah ke sekolah dihitung dalam menit dan diklasifikasikan menjadi kelompok-kelompok dengan rentang menit tertentu.

(i) Melek Digitalisasi

Digitalisasi saat ini semakin mendominasi di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Teknologi-teknologi dalam sektor pertanian semakin berkembang dan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam perkembangannya. Melek digitalisasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Di era modern saat ini dengan perkembangan teknologi yang pesat, kemampuan tersebut penting untuk dimiliki setiap orang. Sehingga, dalam penelitian ini menghitung distribusi pengguna *smartphone*, jumlah *smartphone* dalam rumah tangga, rentang pengeluaran pulsa dan kemudahan akses internet oleh rumah tangga, pendapat responden mengenai penggunaan *smartphone*, penggunaan *smartphone* untuk menunjang kegiatan pertanian, jenis aktivitas penggunaan *smartphone* untuk pertanian dan nonpertanian, distribusi pengguna media sosial dan jenis media sosial yang digunakan oleh responden, pengalaman responden terkait jual beli di *platform online* dan *platform* jual beli yang digunakan, serta jumlah responden yang memiliki toko *online* dan *platform* toko *online* responden.

Distribusi penggunaan *smartphone* berupa persentase dari responden yang menggunakan *smartphone* dan responden yang tidak menggunakan *smartphone*. Penggunaan *smartphone* erat

hubungannya dengan keadaan akses internet dan nominal pengeluaran untuk pembelian pulsa atau paket internet, sehingga pendataan rentang pengeluaran pulsa dan internet diperlukan. Di sisi lain, kemudahan akses internet dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu (1) sangat mudah, (2) mudah, dan (3) sulit. Sedangkan, kemudahan dalam pengoperasian *smartphone* dibagi menjadi empat kategori, yaitu (1) sangat mudah, (2) mudah, (3) sulit, dan (4) sangat sulit. Kemudahan dalam pengoperasian *smartphone* ini dapat dihubungkan dengan distribusi penggunaan *smartphone*.

Fungsi lain dari *smartphone* oleh responden adalah untuk menunjang usaha tani. Dalam penelitian ini melihat distribusi responden yang menggunakan *smartphone* untuk usaha tani dan yang tidak. Untuk responden yang menggunakan *smartphone*, pertanyaan selanjutnya mengenai jenis aktivitas penggunaan *smartphone* untuk usaha taninya, seperti membeli bibit secara online, mencari informasi terkait pertanian, adanya kelompok sesama petani, dan lain sebagainya. Untuk responden yang menggunakan *smartphone*, tetapi tidak menggunakan *smartphone* untuk menunjang usaha tani juga diminta untuk memberikan informasi mengenai aktivitas atau fungsi dari *smartphone*, seperti sebagai alat komunikasi, hiburan, dan lainnya. Pengumpulan data mengenai distribusi responden yang menggunakan media sosial dan jenis media sosial yang digunakan juga menunjang penelitian yang dilakukan. Selain itu, salah satu aktivitas penggunaan *smartphone* lainnya adalah untuk kegiatan jual beli *online*. Peneliti menilik lebih lanjut mengenai distribusi responden yang menggunakan *smartphone* untuk keperluan jual beli *online* beserta *platform* yang digunakan dalam kegiatan jual beli *online* tersebut.

Berdasarkan informasi dari atribut-atribut yang diperoleh dan diolah menjadi data, hasil analisis ini akan menjadi acuan penting dalam pengembangan intervensi yang efektif dan tepat sasaran.

Penelitian ini akan membantu meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender, serta mendukung partisipasi perempuan terhadap keberlanjutan dan produktivitas di sektor pertanian.

Indeks pemberdayaan perempuan di sektor pertanian (5DE Index)

Penelitian ini menggunakan Women's Empowerment in Agriculture Index (WEAI) untuk mengukur pemberdayaan dan inklusi perempuan dalam sektor pertanian. Metodologi yang pertama kali diciptakan oleh Alkire *dkk.* (2013) ini mencakup dua subindeks, yaitu pengukuran pemberdayaan di sektor pertanian dalam lima domain atau 5DE (5 Domains of Empowerment) dan pengukuran kesetaraan gender (*gender parity*) dalam pemberdayaan di dalam rumah tangga (GPI). Bobot 5DE dan GPI masing-masing adalah 90% dan 10% yang mencerminkan bahwa pentingnya kesetaraan gender dalam aspek pemberdayaan serta menunjukkan perbedaan besaran indeks. Pada penelitian ini perhitungan pemberdayaan hanya berdasarkan 5DE yaitu lima domain pemberdayaan.

Lima domain yang digunakan sebagai pengukuran pemberdayaan dalam pertanian, mencakup (1) keputusan mengenai produksi pertanian, (2) akses dan kekuasaan dalam membuat keputusan tentang sumber daya produktif, (3) kontrol penggunaan pendapatan, (4) kepemimpinan dalam suatu komunitas, dan (5) alokasi waktu. Pada masing-masing domain memiliki indikator-indikator tertentu sebagai pengukurannya. Keputusan produksi didasarkan pada dua indikator, yakni input dalam keputusan produktif dan otonomi. Domain terkait akses dan kekuasaan dalam membuat keputusan mengenai sumber daya produktif terdiri dari tiga indikator, yaitu (1) kepemilikan tanah dan aset, (2) keputusan dalam melakukan pembelian, penjualan, atau transfer tanah dan aset, serta (3) akses kredit. Untuk kontrol atas penggunaan pendapatan memiliki indikator tunggal, yakni pengukuran tingkat input dalam keputu-



pexels/@pixabay

san penggunaan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas produktif atau kegiatan tertentu serta sejauh mana individu dapat membuat keputusan pribadi terkait pekerjaan yang menghasilkan upah. Kepemimpinan dalam komunitas dapat diukur melalui keanggotaan dalam kelompok ekonomi atau sosial dan kemampuan atau penguasaan berbicara di depan umum. Domain kelima terkait alokasi waktu memiliki dua indikator. Indikator pertama adalah beban kerja, yang diambil dari Lesotho Time Budget Study (Pemerintah Lesotho, 2003). Selain itu, indikator lain yang digunakan adalah menanyakan kepuasan individu secara subjektif dengan waktu yang tersedia untuk kegiatan rekreasi, individu dianggap memenuhi indikator ini jika individu puas dengan waktu luang yang dimiliki.

Bagian penting dalam pengukuran pemberdayaan perempuan adalah kesetaraan gender. Maka dari itu, pengukuran kesetaraan gender dalam rumah tangga menjadi salah satu subindeks yang mendukung WEAI. GPI merupakan alat ukur yang menunjukkan ketimpangan 5DE antara laki-laki dan perempuan dewasa dalam suatu rumah tangga. GPI berupa persentase seberapa besar perempuan mencapai kesetaraan dengan pasangan mereka. Jika dalam suatu rumah tangga tidak memiliki pasangan laki-laki dan perempuan dewasa, maka dikecualikan dari pengukuran ini.

5DE Index

Subindeks 5DE menghitung seberapa berdayanya perempuan dalam lima domain, yaitu produksi, sumber daya, pendapatan, kepemimpinan, dan waktu. Pengukuran 5DE ini kemudian dapat menunjukkan ketidakberdayaan perempuan dan indikator yang harus diatasi untuk mencapai perempuan yang berdaya atau meningkatkan pemberdayaan. Perhitungan 5DE dapat diperoleh sebagai berikut.

$$5DE = 1 - M_0$$

Indeks ketidakberdayaan di lima domain ditunjukkan dengan M_0 .

5DE dapat digambarkan dengan dua notasi. Notasi "positif" fokus pada persentase perempuan yang berdaya dan kecukupan di antara yang tidak berdaya. Sedangkan, notasi "negatif" berfokus pada persentase perempuan yang tidak berdaya dan kurang mencapai kecukupan. Dalam studi Alkire dan Foster (2011a, b), menggunakan pengukuran M_0 , sehingga konstruksi 5DE digambarkan dengan notasi "negatif". Diasumsikan

bahwa indikator kecukupan bernilai 1 (satu) jika individu kurang mencapai kecukupan dalam indikator terkait dan 0 (nol) jika individu mencapai kecukupan dalam indikator terkait. *Inadequacy score* (c_i) atau skor ketidakcukupan diperoleh dari penjumlahan ketidakcukupan masing-masing individu terhadap semua indikator, dengan tiap indikatornya memiliki bobot.

$$c_i = w_1 I_{1i} + w_2 I_{2i} + \dots + w_d I_{di}$$

Individu mencapai kecukupan atau tidaknya ditunjukkan dengan I_{di} , di mana $I_{di} = 1$ jika individu tidak mencapai kecukupan pada indikator terkait dan $I_{di} = 0$ sebaliknya. w_d menunjukkan bobot dari indikator terkait dengan $\sum_{d=1}^D w_d = 1$ atau jumlah dari semua bobot indikator adalah 1 (satu). Hasil dari *inadequacy score* berkisar antara 0 hingga 1. Jika skor bernilai 1, maka dapat diketahui bahwa individu tidak mencapai kecukupan dari 10 indikator yang ada. Skor bernilai 0 ketika individu berhasil mencapai kecukupan dari semua indikator.

Adanya ambang batas ketidakberdayaan digunakan untuk menilai seberapa tidak berdayanya seorang perempuan. Dalam hal ini, ambang batas ketidakberdayaan ditandai dengan k . Individu yang memiliki *inadequacy score* (c_i) kurang dari atau sama dengan ambang batas (k), maka skor diganti dengan 0 (nol) dan ketidakcukupan tidak dimasukkan dalam "censored headcounts". Notasi $c_i(k)$ menunjukkan *inadequacy score* yang disensor, untuk membedakan *inadequacy score* yang sebenarnya dengan yang disensor. Ketika $c_i > k$, maka $c_i(k) = c_i$, tetapi jika $c_i \leq k$, maka $c_i(k) = 0$.

Berdasarkan struktur pengukuran *Adjusted Headcount* dari Alkire dan Foster (2011a, b), M_0 menggabungkan dua komponen utama, termasuk (1) proporsi individu dalam suatu populasi tertentu yang memiliki ketidakcukupan berbobot lebih dari ambang batas ketidakberdayaan (k) dan (2) intensitas ketidakcukupan individu-individu dalam populasi tersebut, atau rata-rata proporsi ketidakcukupan berbobot yang dialami.



unsplash/@RidwanAbdurrohman



Komponen yang pertama adalah *disempowered headcount ratio* (H_p) yang dapat dihitung sebagai berikut :

$$H_p = \frac{q}{n}$$

q adalah jumlah individu yang tidak berdaya, dan n menunjukkan total populasi.

Komponen yang kedua adalah intensitas dari ketidakberdayaan (A_p). Intensitas ketidakberdayaan merupakan nilai rata-rata *inadequacy score* dari individu yang tidak berdaya.

$$A_p = \frac{\sum_{i=1}^q c_i(k)}{q}$$

$c_i(k)$ adalah *inadequacy score* yang disensor dari individu i dan q adalah jumlah individu yang tidak berdaya.

Indeks ketidakberdayaan (M_0) diperoleh dengan mengalikan kedua komponen tersebut.

$$M_0 = H_p \times A_p$$

Sehingga, indeks 5DE dapat dituliskan sebagai berikut :

$$5DE = H_e + H_p \times A_e$$

Dengan H_e adalah *empowered headcount ratio* atau dapat dituliskan dengan $(1 - H_p)$. A_e adalah rata-rata *adequacy score* (skor kecukupan) dari individu yang tidak berdaya atau dapat dituliskan dengan $(1 - A_p)$.

Ambang batas ketidakberdayaan yang lebih tinggi menandakan total individu yang tidak berdaya lebih rendah, dan *empowered headcount ratio* serta 5DE yang lebih tinggi. Setelah dilakukannya uji sensitivitas klasifikasi pemberdayaan dengan ambang batas yang berbeda, maka dipilih ambang batas ketidakberdayaan sebesar 20% (Alkire *dkk.*, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa individu dianggap berdaya dalam 5DE jika mencapai kecukupan dalam empat dari lima domain dengan jumlah dari beberapa kombinasi indikator berbobot mencapai 80% atau lebih, atau

adequacy score sebesar 80 atau lebih.

Penguraian dari M_0 menjadi komponen (indikator tersensor untuk mengungkapkan bagaimana individu tidak berdaya) menurut komposisi dari indikator yang individu tidak mencapai kecukupan. Dalam menguraikan berdasarkan indikator, perlu menghitung *censored headcount ratio* dari tiap indikator. *Censored headcount ratio* dari tiap indikator adalah jumlah individu yang tidak berdaya yang mengalami ketidakcukupan pada indikator terkait dibagi dengan total populasi. Jika *censored headcount ratio* dari tiap indikator telah dihitung, maka dapat diketahui bahwa melalui jumlah berbobot dari *censored headcount ratio* dapat diperoleh populasi M_0 , di mana M_0 terdiri dari 10 indikator.

$$M_{0population} = w_1CH_1 + w_2CH_2 + \dots + w_{10}CH_{10}$$

w_1 adalah bobot dari indikator 1, dan CH_1 adalah *censored headcount ratio* dari indikator 1, dan seterusnya, dengan $\sum_{d=1}^D wd = 1$.

Persentase kontribusi setiap individu terhadap keseluruhan ketidakberdayaan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase kontribusi indikator } d \text{ terhadap } M_0 \\ = \frac{w_d CH_d}{M_{0population}} \end{aligned}$$

Total persentase kontribusi dari seluruh indikator adalah 100%. Ketika kontribusi ketidakberdayaan dari indikator tertentu jauh melebihi bobotnya, hal ini menandakan bahwa individu yang tidak berdaya lebih tidak memadai dalam indikator terkait dibandingkan dengan indikator yang lainnya. Indikator dengan ketidakcukupan yang tinggi menunjukkan area yang perlu untuk dilakukannya intervensi guna meningkatkan pemberdayaan.

Statistik Inferensial

(1) Teknik estimasi Logit

Analisis regresi merupakan metode untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya (Suyono, 2015). Analisis regresi logistik merupakan metode analisis statistika untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel



terikat yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih peubah bebas berskala kategori atau kontinu (Hosmer, 2000). Regresi logistik disebut juga regresi biner karena variabel dependen merupakan variabel biner atau kategoris. Pada model logit, variabel dependennya merupakan log dari rasio peluang, yaitu sebuah fungsi linear dari variabel independen (Gujarati, 1988).

Persamaan regresi logistik dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Li = \ln \left(\frac{p_i}{1 - p_i} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \mu_i$$

Keterangan:

Li = log dan rasio peluang

P_i = kemungkinan terjadinya suatu peristiwa

β_0 = konstanta

X_1, X_2, \dots = variabel independen

μ_i = error

Pada penelitian ini, analisis regresi logistik digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang penentu pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. Kelompok besar faktor penentu pemberdayaan perempuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakter individu dan karakter rumah tangga. Pada karakter individu, beberapa faktor yang digunakan adalah keikutsertaan dalam organisasi masyarakat (dalam hal ini menjadi anggota Aisyiyah dan PKK), pendidikan, status perkawinan, usia, status dalam sektor pertanian, akses terhadap pelatihan dan kepemilikan tabungan. Untuk karakter rumah tangga, faktor yang digunakan adalah siapa kepala rumah tangga, status pekerjaan suami, pendidikan suami, kepemilikan rumah, jumlah anak dan jumlah tanggungan keluarga.



unsplash/@RidwanAbdurrohman

Analisis regresi logistik dimulai dengan pembua-tan rumusan masalah dan desain penelitian. Pemilihan variabel dalam analisis regresi logistik harus memenuhi beberapa syarat yaitu variabel independen berupa data metrik dan variabel dependen berupa dan non-metrik. Ukuran sampel yang digunakan akan semakin baik jika jumlahnya semakin banyak. Pada analisis regresi logistik tidak terdapat uji asumsi, namun terdapat estimasi model dan kelayakan model. Estimasi model regresi logistik akan dilakukan dengan melakukan uji signifikansi tiap variabel independen. Jika nilai signifikansi kurang dari 0.05 berarti variabel independen memiliki pengaruh terhadap dependen.

2) Teknik estimasi Two-Stages Least Square (2SLS)

Salah satu poin penting yang ada pada riset ini adalah mengangkat adanya potensi endogenitas antara indeks ketidakberdayaan dengan kemampuan petani perempuan dalam mendapatkan akses terhadap bantuan dan pelayanan publik. Hal tersebut dapat membuat model yang sudah dibangun menjadi bias dan memberikan hasil yang tidak konsisten.

Dalam konteks penelitian ini, masuk akal jika terdapat hubungan timbal balik antara ketidakberdayaan dan kemampuan petani perempuan

dalam mendapatkan akses terhadap bantuan dan pelayanan publik. Individu dengan tingkat pemberdayaan yang lebih rendah mungkin cenderung tidak menegaskan hak atau pendapat mereka, sehingga memperkuat status ketidakberdayaan mereka. Sebaliknya, mereka yang mampu mengekspresikan diri dengan percaya diri dan mengadvokasi kebutuhan mereka mungkin cenderung mencapai tingkat pemberdayaan yang lebih tinggi. Hubungan dua arah ini menciptakan potensi masalah endogenitas.

Persamaan dasar : $Y_{ij} = \alpha_0 + \alpha_1 cik_i + \varepsilon_{ij}$

first-stage : $cik_{ij} = + \beta_1 KR_i + \beta_2 KRT_i + \delta_j + \mu_{ij}$

second-stage : $Y_{ij} = \alpha_0 + \alpha_1 \widehat{cik}_i + \varepsilon_{ij}^*$

Dimana:

Y = variabel dependen (Terdiri dari beberapa proksi: kepemilikan BPJS; mendapatkan bantuan PKH; mendapatkan BNPT; permasalahan administrasi kependudukan)

cik = indeks ketidakberdayaan (variable endogen)

\widehat{cik} = nilai estimasi cik pada tahap *first-stage regression*

KR = kelompok variabel karakteristik responden

KRT = kelompok variabel karakteristik rumah tangga

α_0, β_0 = Konstanta

$\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Parameter

ε, μ = error term

δ_j = variabel dummy untuk mengontrol perbedaan potensial di tingkat kabupaten

i, j = observasi individual; kabupaten

Langkah yang diambil untuk mengatasi masalah mengenai hubungan endogen antara independen variabel dan dependen variabel dalam riset ini adalah dengan menggunakan metode regresi *Two-Stage Least Square* (2SLS). Metode ini biasanya dipakai ketika metode *Ordinary Least Square* (OLS) kemungkinan besar akan menghasilkan bias dan estimasi yang tidak konsisten karena adanya korelasi antara error term dan variabel independen yang ada pada model (Gujarati & Porter, 2009). As restriction

Tabel 2.1 Jenis Variabel

Variabel	Keterangan
BPJS (1= mempunyai BPJS; 0=lainnya)	Variabel dependen
PKH (1= mendapat PKH; 0=lainnya)	Variabel dependen
BPNT (1= mendapat BPNT; 0=lainnya)	Variabel dependen
Masalah administrasi (1= mengalami masalah administrasi ; 0=lainnya)	Variabel dependen
Indeks Ketidakberdayaan	Variabel endogen
Karakteristik Responden (KR)	
Keanggotaan di 'Aisyiyah (1=binaan 'Aisyiyah; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Pendidikan dasar (1=Pendidikan terakhir adalah SD; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Pendidikan Menengah (1=Pendidikan terakhir adalah SMP/SMA; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Pendidikan Tinggi (1=Pendidikan terakhir adalah perguruan tinggi; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Status Perkawinan (1=menikah; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Status sebagai kepala rumah tangga (1=perempuan sebagai kepala rumah tangga; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Umur	Variabel instrumental
Status di Pertanian (Buruh=1; Lainnya=0)	Variabel instrumental
Keikutsertaan dalam pelatihan (1=mengikuti pelatihan; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Keaktifan menabung (1=menabung; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Keanggotaan PKK (1=anggota PKK; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Karakteristik Rumah Tangga (KRT)	
Kepemilikan rumah (1=milik sendiri; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Jumlah anak	Variabel instrumental
Jumlah tanggungan	Variabel instrumental

Langkah awal pada *first-stage regression*, indeks ketidakberdayaan yang merupakan variabel endogen di regresikan terhadap variabel instrumental. Instrumen-instrumen ini dipilih berdasarkan relevansi teori dan juga studi terdahulu terhadap variabel endogen dan asumsi bahwa variabel tersebut adalah variabel eksogen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubavhan dan timbulnya variabel terikat (endogen), baik secara positif maupun secara negatif. Lebih detail mengenai variabel apa saja yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2. Kemudian, nilai estimasi yang dihasilkan pada saat *first-stage regression* digunakan sebagai instrumen untuk variabel indeks ketidakberdayaan pada *second-stage regression*.

Second-stage regression memodelkan para variabel dependen sebagai fungsi dari indeks ketidakberdayaan. Koefisien hasil estimasi pada model ini akan memberikan hasil nilai yang konsisten dan tidak bias mengenai efek kausalitas dari indeks ketidakberdayaan dengan para variabel dependen.

Pendekatan kualitatif

Focus Group Discussion (FGD)

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan *focus group discussion* (FGD) sebagai pendekatan kualitatif. *Focus group discussion* (FGD) merupakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data di mana sekelompok orang yang memenuhi klasifikasi tertentu membahas topik atau isu yang telah ditentukan secara mendalam, dan difasilitasi oleh moderator eksternal yang profesional di bidang topik atau isu terkait. Dilaksanakannya FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan dan persepsi mengenai pemberdayaan perempuan di sektor pertanian antar individu dalam kelompok yang sulit diperoleh dengan wawancara individu. Metode FGD pertama kali digunakan oleh Emory S. Bogardus (1926) dalam melakukan wawancara kelompok untuk penelitian psikologi sosial yang bertujuan mengembangkan skala jarak sosial (Wilkinson, 2004). Pada awalnya, *focus group* digunakan sebagai metode

penelitian akademis, tetapi sejak tahun 1950-an, metode ini lebih sering digunakan pada penelitian pasar (Munday, 2006). Banyak peneliti yang mengembangkan dan menggunakan metode ini untuk memenuhi kebutuhan penelitiannya. Berdasarkan pesertanya, jenis FGD dapat dibagi menjadi dua (van Eeuwijk & Angehrn, 2017):

- a. *Natural groups*. FGD terdiri dari peserta yang termasuk dalam kelompok informal atau formal yang sudah ada sebelum penelitian dilakukan. Dalam diskusi kelompok berfokus untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan pendapat antar individu dan bagaimana individu merespons individu lainnya. Ketika melakukan analisis data dengan *natural groups*, maka peneliti perlu mempertimbangkan potensi adanya bias.
- b. *Expert groups*. FGD terdiri dari beberapa individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat baik dan luas mengenai topik atau isu yang dibahas. FGD dengan kelompok ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang spesifik, meskipun pernyataan dari peserta yang cenderung bervariasi.

Penelitian ini menggunakan metode FGD dengan *expert groups* dikarenakan FGD dilakukan bersama dengan petani dan pemerintah daerah, kelompok tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. FGD kelompok ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dan data spesifik mengenai pemberdayaan perempuan di sektor pertanian dilihat dari sudut pandang praktis (petani) dan kebijakan serta pengetahuan (pemerintah daerah).

Terdapat beberapa teknis pelaksanaan FGD:

- a. Membuat rumusan pertanyaan penelitian dan panduan diskusi
Studi kualitatif dengan metode FGD memungkinkan untuk mengubah pertanyaan penelitian untuk menghasilkan hipotesis baru dan mendapatkan pengetahuan baru guna memperoleh data yang diperlukan, tetapi perubahan





Pexels/@QuangNguyenVinh

pertanyaan penelitian tidak dapat dilakukan selama sesi FGD aktif. Merumuskan pertanyaan penelitian diperlukan sebagai acuan dalam melaksanakan FGD dengan pertanyaan penelitian yang diharapkan adalah pertanyaan yang umum dan terstruktur dengan baik untuk mencapai keberhasilan studi kualitatif. Sehingga, sebelum FGD dilaksanakan, dilakukan perumusan pertanyaan penelitian.

Pertanyaan penelitian dan pertanyaan yang diajukan selama FGD berbeda. Peneliti tidak dapat mengajukan keseluruhan dari pertanyaan penelitian dan mendapatkan jawaban secara langsung, sehingga diperlukan panduan diskusi. Panduan diskusi dapat berisi pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada peserta diskusi yang dikembangkan dari pertanyaan penelitian.

- b. Perencanaan operasional FGD, meliputi beberapa teknis (Dawson dkk., 1993)
 - i. Menyiapkan protokol pelaksanaan FGD.
 - ii. Mendapatkan persetujuan dari peserta FGD, yaitu pemerintah daerah dan petani perempuan dari lima kabupaten.
 - iii. Memberikan instruksi kepada staf pendukung, seperti moderator, notulis, dan pengamat.
 - iv. Merencanakan waktu dan tempat dilaksanakannya FGD.
 - v. Mempersiapkan peralatan untuk merekam, baik visual maupun audio.
 - vi. Memperhitungkan anggaran dana untuk kebutuhan peneliti maupun peserta.
- c. Pengambilan sampel peserta diskusi (*sampling*)

Peserta dari FGD disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian. Peserta dipilih berdasarkan kriteria yang dibuat transparan, seperti karakteristik tertentu, peran, atau pengetahuan. Pengambilan sampel yang didasarkan pada karakteristik tertentu disebut dengan purposive

sampling. Peserta dari FGD penelitian ini tidak diambil secara acak, tetapi ada karakteristik yang membatasi. Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk membentuk kelompok diskusi, yaitu homogenitas dan heterogenitas atau keragaman dalam kelompok (Khan & Manderson, 1992 ; Barbour, 2005). FGD yang dilakukan mengambil pendekatan homogenitas sebagai dasar membentuk kelompok, di mana diskusi antara petani dan pemerintah dibedakan.

FGD harus menghasilkan data yang memungkinkan untuk dianalisis dan menghasilkan ide-ide teoritis (Barbour, 2005). Pelaksanaan FGD menjadi kesempatan bagi peneliti mengulik informasi lebih dalam. Bahkan, lebih baik ketika FGD mencapai saturasi, yaitu diskusi kelompok berikutnya tidak dapat memberikan wawasan baru dan menandakan pengumpulan data dapat diakhiri.

d. Pelaksanaan FGD

Kunci dari kualitas sebuah FGD yang utama adalah moderator, moderator memiliki peran memastikan topik atau isu yang didiskusikan dapat dibahas secara mendalam dan menjaga agar diskusi tetap inklusif. Moderator harus dapat menciptakan dinamika dalam kelompok agar peserta FGD mendiskusikan topik dengan lancar tanpa harus bergantung pada moderator untuk mengajukan pertanyaan satu per satu. FGD dilaksanakan sebagai berikut.

- i. Perkenalan staf pendukung dan peserta, serta meminta persetujuan dari peserta untuk melakukan perekaman video atau audio.
- ii. Memperkenalkan topik utama dan pertanyaan penelitian oleh moderator.
- iii. Mengajukan pertanyaan berdasarkan panduan FGD yang telah dibuat.
- iv. Mengucapkan terima kasih kepada peserta.

Selain moderator, peran notulis juga penting dalam FGD. Notulis berperan dalam menulis poin-poin penting selama FGD berlangsung. Beberapa FGD juga melibatkan pengamat untuk memantau dinamika kelompok FGD.

e. Analisis hasil FGD.

Analisis data kualitatif yang diperoleh dari hasil FGD dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

i. Melakukan transkrip diskusi dari rekaman dalam bentuk visual atau audio ke bentuk dokumen tertulis yang rinci, mencakup pertanyaan, pernyataan, dan pihak yang memberikan pernyataan atau mengajukan pertanyaan.

ii. Memberikan kode untuk hasil transkrip. Kode ini membantu untuk menyusun data. Dalam penelitian ini, kode yang digunakan berdasarkan isu-isu yang dibahas, meliputi pemberdayaan perempuan, pertanian, peran pemerintah, rumah tangga, dan keuangan.

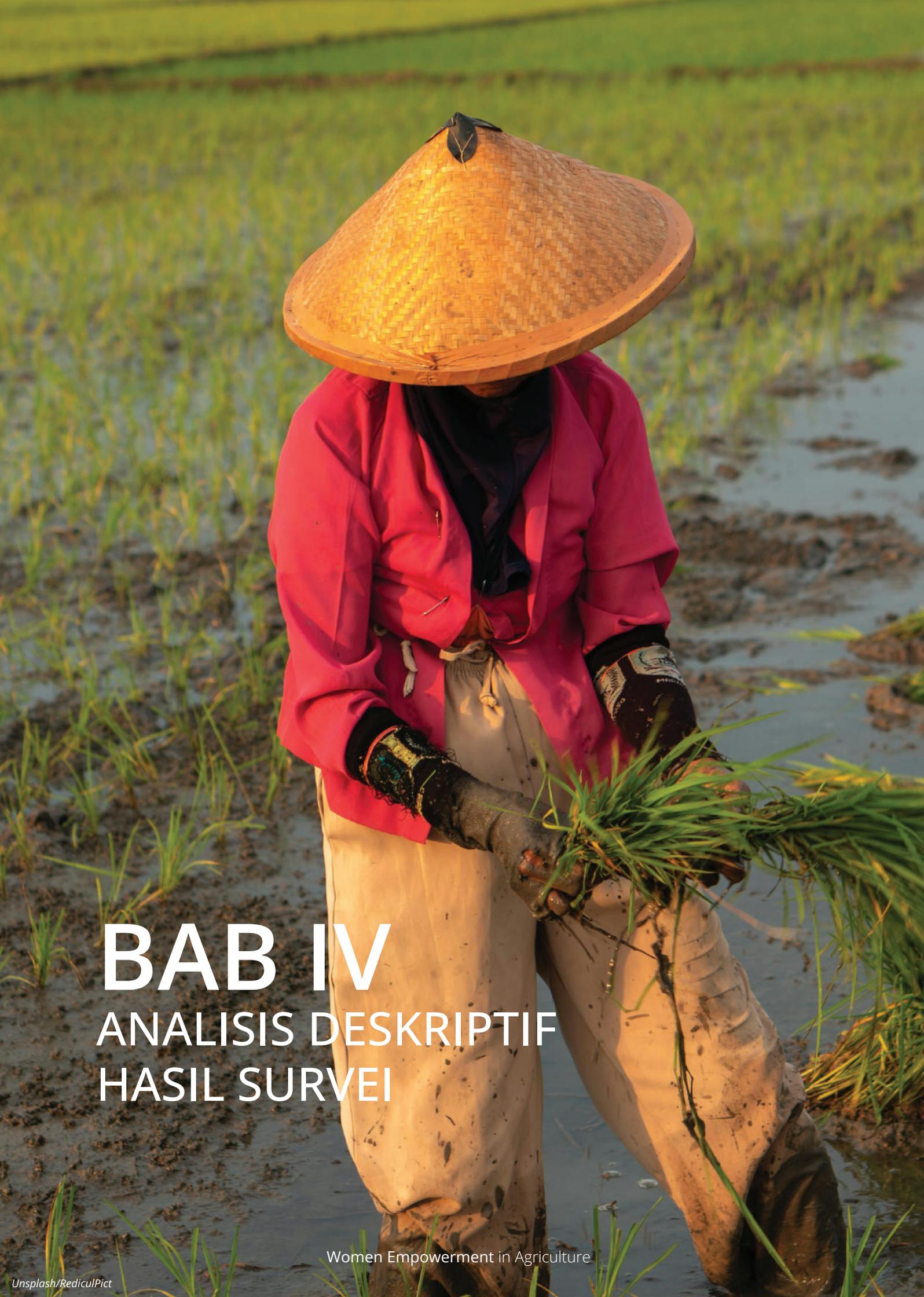
iii. Menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif.

iv. Menetapkan validitas dan melakukan pengecekan responden guna validasi hasil, sehingga hasil dan kesimpulan yang dibuat oleh peneliti sesuai dengan kondisi dan data sebenarnya.

v. Membandingkan hasil penelitian kualitatif menggunakan FGD dengan temuan dari teknik lain. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Sehingga, hasil dari FGD dapat dibandingkan dengan hasil dari metode kuantitatif. Membandingkan antar hasil penelitian ini dapat disebut sebagai *cross-validation*.



pexels/@pixabay



BAB IV

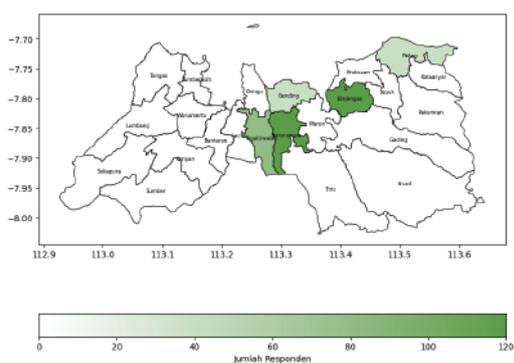
ANALISIS DESKRIPTIF HASIL SURVEI

Women Empowerment in Agriculture

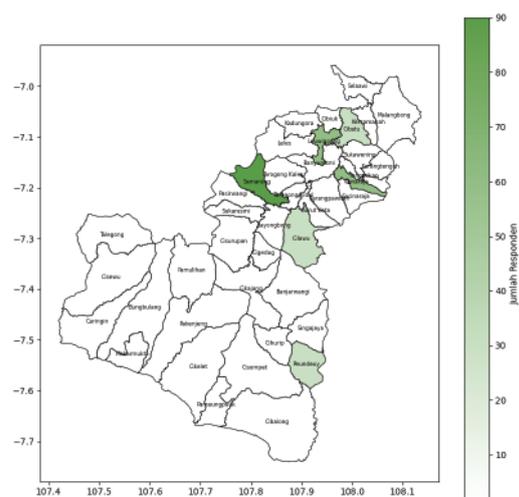
Profil Demografi

Survei petani perempuan dilakukan di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Garut, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Kolaka. Jumlah responden yang berhasil diperoleh dari survei di Kabupaten Probolinggo sebanyak 400 responden. Responden tersebut berasal dari Kecamatan Banyuwayar, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Gending, Kecamatan Tegalsiwalan, dan Kecamatan Paiton. Untuk wilayah Kabupaten Garut, jumlah responden yang diperoleh dari hasil survei sebanyak 300 responden yang tersebar di Kecamatan Samarang, Kecamatan Leuwigoong, Kecamatan Wanaraja, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Cilawu, dan Kecamatan Peundeuy.

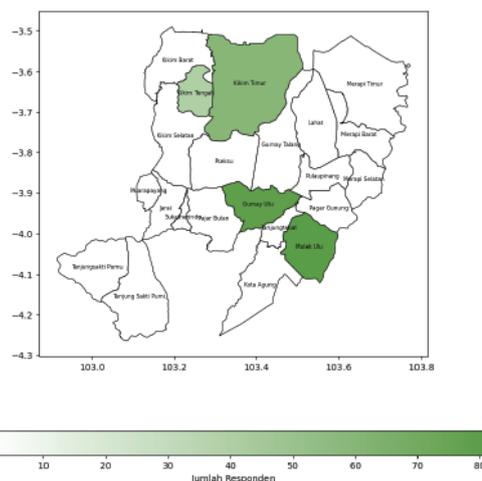
Gambar 2. Komposisi Responden Berdasarkan Asal Daerah



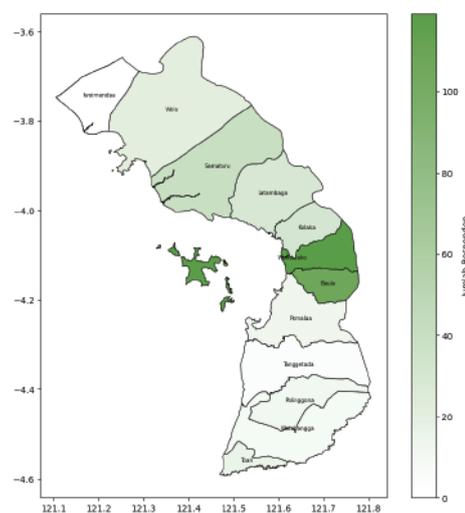
Probolinggo



Garut



Lahat



Kolaka

Responden di Kabupaten Lahat tersebar di lima kecamatan, antara lain Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Utara, Kecamatan Gumay Ulu, Mulak Sebingkai, dan Kecamatan Mulak Ulu. Total responden yang diperoleh dari hasil survei di Kabupaten Lahat sebanyak 300 responden. Kabupaten terakhir, yaitu Kabupaten Kolaka, jumlah responden yang diperoleh sebanyak 400 responden yang tersebar di sebelas kecamatan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Baula, Kecamatan Kolaka, Kecamatan Latambaga, Kecamatan Polinggona, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Tanggetada, Kecamatan Toari, Kecamatan Watubangga, Kecamatan Wolo, dan Kecamatan Wundulako. Sehingga total responden di empat kabupaten daerah survei sebanyak 1.400 responden.



Tabel 3. Distribusi Usia Responden

Usia	Semua Sampel		Probolinggo		Garut		Kolaka		Lahat	
	Freq.	(%)	Freq.	(%)	Freq.	(%)	Freq.	(%)	Freq.	(%)
< 25	35	2.50%	6	1.50%	12	4.00%	10	2.50%	7	2.33%
25 - 34	202	14.43%	49	12.25%	33	11.00%	76	19.00%	44	14.67%
35 - 44	376	26.86%	111	27.75%	59	19.67%	121	30.25%	85	28.33%
45 - 54	417	29.79%	110	27.50%	84	28.00%	129	32.25%	94	31.33%
55 - 65	276	19.71%	88	22.00%	83	27.67%	54	13.50%	51	17.00%
> 65	94	6.71%	36	9.00%	29	9.67%	10	2.50%	19	6.33%
Total	1400	100.00%	400	100.00%	300	100.00%	400	100.00%	300	100.00%

Berdasarkan distribusi usia responden, secara keseluruhan responden mayoritas berusia pada rentang 45 hingga 54 tahun. Di Kabupaten Garut, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Kolaka sebagian besar berusia pada rentang 45 hingga 54 tahun, sedangkan di Kabupaten Probolinggo sebagian besar responden berusia 35 hingga 44

tahun. Jumlah responden dengan rentang usia kurang dari 25 tahun dan lebih dari 65 tahun memiliki jumlah yang paling sedikit yaitu kurang dari 10% dari total responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada beberapa perempuan yang bekerja sebagai petani di usia tidak produktif.

Tabel 4. Status Pernikahan

Status Pernikahan	Semua Sampel		Probolinggo		Garut		Kolaka		Lahat	
	Freq.	(%)	Freq.	(%)	Freq.	(%)	Freq.	(%)	Freq.	(%)
Belum Menikah	8	0.57%	0	0.00%	2	0.67%	6	1.50%	0	0.00%
Cerai hidup	32	2.29%	6	1.50%	3	1.00%	21	5.25%	2	0.67%
Cerai mati	157	11.21%	39	9.75%	46	15.33%	39	9.75%	33	11.00%
Menikah	1203	85.93%	355	88.75%	249	83.00%	334	83.50%	265	88.33%
Total	1400	100.00%	400	100.00%	300	100.00%	400	100.00%	300	100.00%

Tabel diatas menunjukkan bahwa petani perempuan di empat kabupaten lokasi survei sebagian besar telah menikah. Lebih dari 80% responden petani perempuan memiliki status menikah. sebagian kecil responden ada yang berstatus cerai mati maupun cerai hidup dan

kurang dari 1% responden yang belum menikah. di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lahat tidak ada responden yang belum menikah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden petani perempuan telah berkeluarga.

Tabel 5. Status Responden sebagai Binaan 'Aisiyiah

Status Responden	Semua Sampel		Probolinggo		Garut		Kolaka		Lahat	
	Freq.	(%)	Freq.	(%)	Freq.	(%)	Freq.	(%)	Freq.	(%)
Ya	599	42.79%	122	30.50%	105	35.00%	222	55.50%	150	50.00%
Tidak	801	57.21%	278	69.50%	195	65.00%	178	44.50%	150	50.00%
Total	1400	100.00%	400	100.00%	300	100.00%	400	100.00%	300	100.00%

Pada survei petani perempuan ini juga menganalisis adanya responden yang berstatus sebagai binaan 'Aisiyiah. Berdasarkan hasil survei secara keseluruhan lebih dari 50% responden merupakan binaan 'Aisiyiah. Di Kabupaten Probolinggo dan Garut lebih dari 60% responden

adalah binaan 'Aisiyiah sedangkan di Kabupaten Kolaka lebih dari 50% bukan binaan 'Aisiyiah. Kabupaten Lahat merupakan satu-satunya Kabupaten yang memiliki responden dengan jumlah yang sama antara responden binaan 'Aisiyiah dan bukan binaan 'Aisiyiah.



Tabel 6. Komparasi Pendidikan Terakhir Responden dan Suami

Pendidikan Terakhir	Semua Sampel	Garut	Kolaka	Lahat	Probolinggo
Lebih rendah dari suami	343	78	94	71	100
Lebih tinggi dari suami	284	64	108	57	55
Sama dengan suami	731	153	166	167	245
Total	1358	295	368	295	400

Ditinjau dari sisi pendidikan, mayoritas petani perempuan menempuh pendidikan terakhir yang sama dengan suami. Di Kabupaten Garut, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Probolinggo, jumlah responden dengan pendidikan lebih rendah dari suami lebih besar

daripada responden dengan pendidikan lebih tinggi dari semua. Di sisi lain, jumlah responden Kabupaten Kolaka yang menempuh pendidikan terakhir lebih tinggi dari suami lebih besar dibandingkan jumlah responden dengan pendidikan terakhir lebih rendah dari suami.

Tabel 7. Jenis Pekerjaan yang Tercantum di KTP

Jenis Pekerjaan	Semua Sampel	Probolinggo	Garut	Kolaka	Lahat
Mengurus Rumah Tangga	75.86%	74.75%	96.67%	87.50%	41.00%
Petani / Pekebun	20.00%	22.25%	0.33%	6.25%	55.00%
Belum / Tidak Bekerja	0.86%	0.00%	1.00%	1.00%	1.67%
Pelajar / Mahasiswa	0.79%	0.00%	1.00%	1.75%	0.33%
Wiraswasta	0.71%	1.50%	0.00%	0.50%	0.67%
Pegawai Negeri Sipil	0.64%	0.00%	0.00%	2.25%	0.00%
Perdagangan	0.50%	1.50%	0.00%	0.25%	0.00%
Pensiunan	0.21%	0.00%	0.33%	0.50%	0.00%
Guru	0.21%	0.00%	0.67%	0.00%	0.33%
Karyawan Honorer	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%
karyawan swasta	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.33%
Grand Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Berdasarkan Tabel 7 di atas, mayoritas jenis pekerjaan responden di tiga kabupaten (Probolinggo, Garut, dan Kolaka) yang tercantum di KTP adalah mengurus rumah tangga. Berbeda dengan tiga kabupaten tersebut, mayoritas responden di Kabupaten Lahat mencantumkan

petani/pekebun sebagai pekerjaan mereka. Dari hasil survei di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tiga pekerjaan utama yang tercantum di KTP adalah mengurus rumah tangga, petani/pekebun, dan belum/tidak bekerja.

Tabel 8. Status dalam Pertanian

Status Responden	Semua Sampel		Probolinggo		Garut		Kolaka		Lahat	
	Freq.	(%)	Freq.	(%)	Freq.	(%)	Freq.	(%)	Freq.	(%)
Buruh tani	269	19.21%	147	36.75%	78	26.00%	31	7.75%	13	4.33%
Keduanya	263	18.79%	50	12.50%	55	18.33%	30	7.50%	128	42.67%
Penggarap lahan sendiri	868	62.00%	203	50.75%	167	55.67%	339	84.75%	159	53.00%
Total	1400	100.00%	400	100.00%	300	100.00%	400	100.00%	300	100.00%

Berdasarkan status responden terhadap kepemilikan lahan, mayoritas responden merupakan penggarap lahan sendiri. Lebih dari 50% responden di empat kabupaten lokasi survei merupakan petani perempuan yang mengolah lahan pertaniannya sendiri. Di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Garut, dan Kabupaten

Kolaka, persentase status responden sebagai buruh tani lebih tinggi dibandingkan responden yang menjadi keduanya (buruh tani dan penggarap lahan sendiri). Di Kabupaten Lahat, responden dengan status buruh tani lebih rendah dibandingkan responden yang menjadi buruh tani dan juga menggarap lahan sendiri.

Karakteristik Rumah Tangga

Karakteristik rumah tangga yang pertama adalah status rumah yang ditempati oleh petani perempuan di empat lokasi survei. Lebih dari 90% responden menempati rumah milik sendiri, sedangkan sisanya secara berurutan menempati rumah keluarga dan menyewa/kontrak. Persentase responden yang menyewa atau mengontrak rumah sangat kecil, tidak sampai 1% di keempat lokasi survei.



Tabel 9. Status Tempat Tinggal

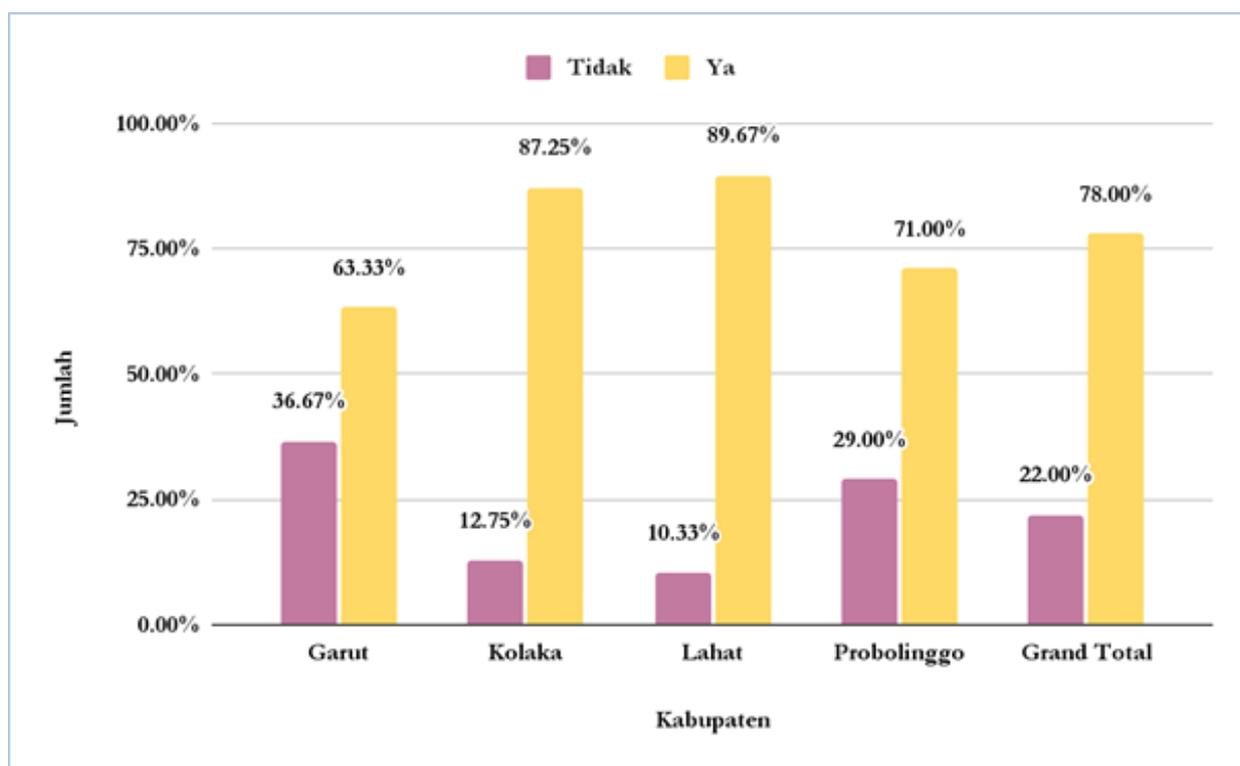
Status Rumah yang Ditempati	Semua Sampel (n=1400)	Garut (n=300)	Kolaka (n=400)	Lahat (n=300)	Probolinggo (n=400)
Menempati Rumah keluarga	6.79%	6.67%	8.25%	6.33%	5.75%
Menyewa/Kontrak	0.21%	0.33%	0.50%	0.00%	0.00%
Milik Sendiri	93.00%	93.00%	91.25%	93.67%	94.25%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel 10. Jumlah Anak dalam Rumah Tangga dan Tanggungan Kepala Rumah Tangga

Jumlah	Jumlah Anak dalam Rumah Tangga					Jumlah Tanggungan Kepala Rumah Tangga				
	Semua Sampel	Garut	Kolaka	Lahat	Probolinggo	Semua Sampel	Garut	Kolaka	Lahat	Probolinggo
0 - 2	63.21%	51.33%	52.00%	62.67%	83.75%	45.86%	49.00%	46.00%	44.00%	44.75%
6-Mar	35.64%	44.33%	47.25%	37.33%	16.25%	52.14%	49.33%	51.50%	55.33%	52.50%
> 6	1.14%	4.33%	0.75%	0.00%	0.00%	2.00%	1.67%	2.50%	0.67%	2.75%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel di atas memuat informasi mengenai jumlah anak dalam rumah tangga dan jumlah tanggungan kepala rumah tangga responden survei. Secara keseluruhan, mayoritas responden memiliki 0 hingga 2 anak dalam rumah tangganya. Responden survei di Kabupaten Probolinggo maksimal memiliki anak dalam rumah tangga sebanyak tiga hingga 6 anak. Kelompok responden dengan jumlah anak lebih

dari enam didominasi responden dari Kabupaten Garut. Adapun mayoritas responden memiliki jumlah tanggungan sebanyak tiga hingga enam orang untuk satu kepala rumah tangga. Di keempat lokasi survei, hanya sekitar 0,67% hingga 2,75% responden saja yang memiliki jumlah tanggungan kepala rumah tangga lebih dari enam orang.



Gambar 3. Kepemilikan BPJS

Berdasarkan Gambar 3, jumlah responden yang memiliki maupun tidak memiliki BPJS. Secara keseluruhan, jumlah responden yang memiliki BPJS jauh lebih besar daripada jumlah responden yang tidak memiliki BPJS. Adapun kota dengan selisih responden yang memiliki BPJS dan tidak memiliki BPJS tertinggi

adalah Kabupaten Kolaka. Di sisi lain, kota yang selisih kepemilikan BPJSnya paling rendah adalah Kabupaten Garut. orang untuk satu kepala rumah tangga. Di keempat lokasi survei, hanya sekitar 0,67% hingga 2,75% responden saja yang memiliki jumlah tanggungan kepala rumah tangga lebih dari enam orang.



Unsplash/MarthaDominguez

Tabel 11. Bentuk BPJS

Bentuk BPJS	Semua Sampel	Garut	Kolaka	Lahat	Probolinggo
Kesehatan (JKN/KIS)	1080	187	341	269	283
Ketenagakerjaan - Jaminan Hari Tua	9	4	3	1	1
Ketenagakerjaan - Jaminan Kecelakaan Kerja	12	5	3	2	2
Ketenagakerjaan - Jaminan Kematian	11	7	2	1	1
Ketenagakerjaan - Jaminan Pensiun	12	3	8		1

Selaras dengan pertanyaan survei sebelumnya mengenai kepemilikan BPJS, bentuk BPJS yang dimiliki responden didominasi BPJS Kesehatan (JKN/KIS). Dari data yang terhimpun, dapat disimpulkan bahwa beberapa responden

memiliki keanggotaan ganda, yakni BPJS kesehatan (JKN/KIS) dan BPJS Ketenagakerjaan. Kabupaten Kolaka menjadi lokasi survei dengan jumlah responden pemilik BPJS tertinggi di antara ketiga kota lainnya.

Tabel 12. Pemanfaatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pemanfaatan SKTM	Semua Sampel	Garut	Kolaka	Lahat	Probolinggo
Tidak memanfaatkan	1042	215	276	267	284
Tidak punya SKTM	107	45	14	3	45
Tidak Tahu	35	5	4	3	23
Memanfaatkan SKTM	216	35	106	27	48
Total	1400	300	400	300	400

Berdasarkan hasil survei terkait pemanfaatan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), secara keseluruhan 74% responden tidak pernah memanfaatkan SKTM yang bisa diperoleh dari desa. Kabupaten Kolaka merupakan satu-satunya kabupaten yang

respondennya memanfaatkan SKTM terbanyak yaitu 26% dari total responden di Kabupaten Kolaka. Sebanyak 6% dari total responden Kabupaten Probolinggo tidak tahu pemanfaatan dari SKTM.

Keuangan Usaha Tani

Survei terhadap petani perempuan di empat kabupaten juga bertujuan untuk menganalisis keuangan dari usaha tani yang dijalankan. Beberapa pertanyaan diajukan terkait keuangan usaha tani seperti rata-rata modal usaha dalam sekali produksi, persepsi terhadap pinjaman untuk usaha tani, frekuensi pelatihan pengelolaan keuangan, dan penyisihan hasil panen untuk ditabung atau disimpan.



Tabel 13. Rata-rata Modal Usaha Responden dalam Sekali Produksi per m²

Rata-rata modal	Semua Sampel (n=1400)	Garut (n=300)	Kolaka (n=400)	Lahat (n=300)	Probolinggo (n=400)
< 1,000	24.93%	7.67%	38.25%	24.67%	24.75%
1,000 - 11,000	60.36%	88.67%	47.75%	67.67%	46.25%
11,000 - 21,000	9.57%	2.00%	3.25%	5.67%	24.50%
21,000 - 31,000	2.07%	1.00%	3.50%	0.67%	2.50%
31,000 - 41,000	0.43%	0.00%	0.00%	0.33%	1.25%
41,000 - 50,000	1.36%	0.67%	3.25%	0.67%	0.50%
> 50,000	1.29%	0.00%	4.00%	0.33%	0.25%
Grand Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sebagian besar rata-rata modal usaha yang dikeluarkan untuk sekali produksi pertanian per m² di empat kabupaten lokasi survei pada rentang Rp1.000-Rp11.000. Ada sebagian kecil responden yang mengeluarkan modal rata-rata

dalam sekali produksi kurang dari Rp1.000 per m², atau bisa dikatakan tanpa modal. Namun sebagian kecil lainnya juga ada yang mengeluarkan modal rata-rata lebih dari Rp11.000 per m² dalam sekali produksi.

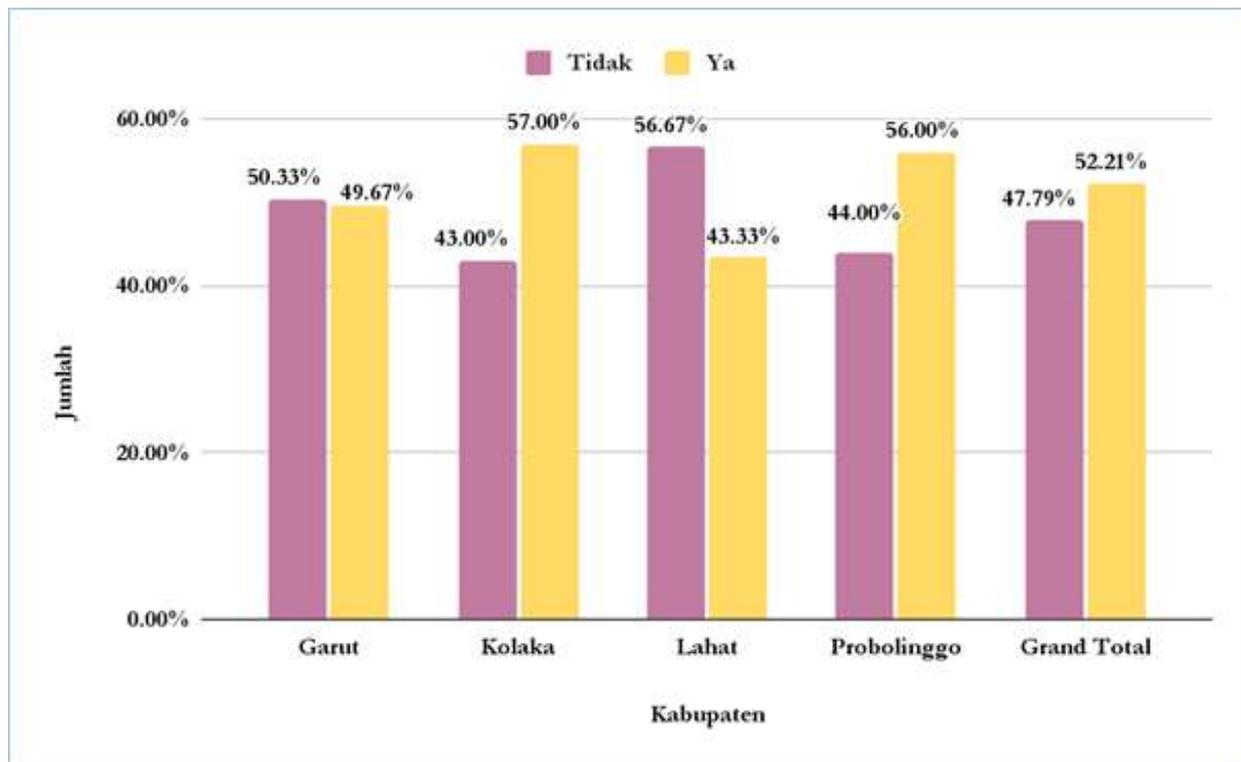
Tabel 14. Rata-Rata Persepsi terhadap Pinjaman Usaha Tani dan Frekuensi Pelatihan Pengelolaan Keuangan

Pernyataan	Semua Sampel (n=1400)	Garut (n=300)	Kolaka (n=400)	Lahat (n=300)	Probolinggo (n=400)
Pinjaman usaha tani ¹	2.97	2.70	2.74	3.35	3.11
Frekuensi pelatihan pengelolaan keuangan ²	1.10	1.08	1.12	1.18	1.05

Catatan: ¹Rata-rata diambil dari skala likert 1-4. Skala 1 → pinjaman tidak membantu, skala 4 → pinjaman sangat membantu. ²Rata-rata diambil dari skala likert 1-5. Skala 1 → tidak pernah, skala 5 → sangat sering

Tabel diatas menunjukkan persepsi responden terhadap pinjaman usaha tani dan frekuensi pelatihan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di empat kabupaten. Secara keseluruhan, responden jarang mendapat pinjaman usaha tani dan jarang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan. Namun secara

terpisah, responden di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Probolinggo cukup sering mendapat pinjaman usaha tani. Sedangkan di Kabupaten Garut maupun Kolaka, responden jarang mendapatkan pinjaman usaha tani maupun mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan.



Gambar 4. Penyisihan Hasil Panen untuk Ditabung/Disimpan

Berdasarkan gambar diatas secara keseluruhan lebih dari 50% responden menyisihkan sebagian hasil panennya untuk ditabung atau disimpan. Di Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Probolinggo lebih dari 50% responden menyisihkan uang hasil panen

pertanian untuk ditabung. Sedangkan di Kabupaten Garut dan Lahat lebih dari 50% responden tidak menabung atau menyimpan sebagian kecil dari hasil panen pertanian yang mereka dapatkan.

Keterlibatan Responden dalam Organisasi

Tabel 15. Keterlibatan Responden terhadap Kelompok PKK dan Kelompok Petani

Kelompok	Semua Sampel (n=1400)	Garut (n=300)	Kolaka (n=400)	Lahat (n=300)	Probolinggo (n=400)
Keikutsertaan di kelompok PKK	0.31	0.13	0.42	0.57	0.13
Keikutsertaan di di kelompok tani	0.45	0.56	0.58	0.60	0.13

Catatan: Semakin mendekati 1.00 maka semakin banyak responden yang terlibat di dalam kelompok tersebut, begitupun sebaliknya

Tabel diatas menunjukkan keterlibatan petani perempuan dalam kelompok PKK maupun kelompok petani. Secara keseluruhan responden cenderung tidak ikut serta dalam kelompok PKK maupun kelompok tani. Namun secara terpisah, Kabupaten Lahat merupakan satu-satunya kabupaten yang respondennya ikut serta baik di

kelompok PKK maupun kelompok tani. Sedangkan di Kabupaten Garut dan Kolaka, responden cenderung ikut serta dalam kelompok tani. Di Kabupaten Probolinggo, responden tidak terlibat baik dalam kelompok PKK maupun kelompok tani.

Tabel 16. Frekuensi Bantuan untuk Kelompok Tani

Pernyataan	Semua Sampel (n=633)	Garut (n=167)	Kolaka (n=231)	Lahat (n=181)	Probolinggo (n=53)
Frekuensi bantuan untuk Kelompok tani	2.24	1.92	2.26	2.55	2.15

Catatan: Jika nilai lebih dari 3.00 → rata-rata responden sering menerima bantuan, kurang dari 3.00 → rata-rata responden jarang menerima bantuan

Responden petani perempuan di empat kabupaten cenderung jarang mendapatkan bantuan kelompok tani. Nilai frekuensi bantuan untuk kelompok tani yang kurang dari 3.00 menunjukkan bahwa responden cenderung jarang mendapatkan bantuan untuk kelompok

tani, sedangkan nilai frekuensi yang lebih dari 3.00 menunjukkan cukup sering mendapatkan bantuan untuk kelompok tani. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan kepada kelompok tani masih kurang.

Tabel 17. Program Bantuan paling dibutuhkan

Program Bantuan	Semua Sampel	Garut	Kolaka	Lahat	Probolinggo
Bantuan dana/pinjaman	255	84	74	78	19
Akses terhadap bibit/pupuk	258	71	85	78	24
Akses informasi terkait usaha tani	31	6	16	7	2
Pemasaran produk pertanian	14	2	8	3	1
Pelatihan	65	1	47	15	2
Lainnya	5	4	1	0	0
Total	628	168	231	181	48

Tabel diatas menunjukkan program bantuan yang dibutuhkan oleh petani perempuan di empat kabupaten. program bantuan berupa dana/pinjaman dan akses terhadap bibit/pupuk menjadi program bantuan yang paling dibutuhkan. 40% responden menyebutkan bahwa bantuan dana/pinjaman

adalah program yang paling dibutuhkan, 41% responden mengungkapkan akses terhadap bibit/pupuk sebagai program paling dibutuhkan. Program bantuan yang paling dibutuhkan selanjutnya secara berturut-turut adalah pelatihan, akses informasi terkait usaha tani, dan pemasaran produk pertanian.





Usaha Tani

Salah satu pertanyaan mengenai usaha tani yang dilakukan oleh responden petani perempuan adalah jenis komoditas yang dihasilkan dalam setahun terakhir. Berdasarkan tabel di bawah ini, komoditas yang dihasilkan dalam setahun terakhir cukup bervariasi. Akan

tetapi, hasil survei menunjukkan bahwa padi menjadi tanaman utama di tiga lokasi survei, yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Kolaka. Di Kabupaten Kolaka, tanaman utama para petani adalah sayur-sayuran.

Tabel 18. Komoditas yang Dihasilkan oleh Rumah Tangga dalam Setahun Terakhir

Rangking	Garut	Kolaka	Lahat	Probolinggo
Rangking 1	Padi	Sayur-sayuran lain	Kopi	Padi
Rangking 2	Cabai	Padi	Karet	Jagung
Rangking 3	Singkong	Rempah-rempah	Buah-buahan lain	Tembakau

Namun jika dilihat pada tabel, tanaman padi merupakan tanaman utama yang diproduksi di keempat kabupaten survei. Setiap kabupaten memiliki tanaman utama masing-masing selain padi. Seperti di Garut, selain padi, tanaman utama di kabupaten tersebut adalah cabai dan singkong sedangkan di Lahat ada karet dan

buah-buahan. Untuk wilayah Probolinggo memiliki jagung dan tembakau sedangkan di Kolaka ada sayur-sayuran lain dan rempah-rempah. Tanaman utama yang dihasilkan di masing-masing daerah tersebut dipengaruhi oleh faktor tanah dan juga iklim di daerah tersebut.

Tabel 19. Jumlah Jam kerja Ke Sawah

Lama di sawah dalam satu hari	Semua Sampel (n=1400)	Garut (n=300)	Kolaka (n=400)	Lahat (n=300)	Probolinggo (n=400)
< 2 jam	4.93%	0.67%	1.75%	19.33%	0.50%
2 - 5 jam	38.21%	29.00%	46.00%	20.00%	51.00%
5 - 8 jam	41.14%	66.00%	35.50%	25.33%	40.00%
8 - 9 jam	13.29%	3.67%	12.75%	32.33%	6.75%
> 9 jam	2.43%	0.67%	4.00%	3.00%	1.75%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel di atas menunjukkan jumlah jam kerja responden ke sawah dalam sehari. Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menghabiskan waktu sekitar lima hingga delapan jam kerja di sawah. Persentase responden yang menghabiskan waktu sekitar dua hingga lima jam di sawah juga tidak terlalu jauh dibandingkan responden di kategori lima hingga delapan jam sehari. Ditinjau dari masing-masing lokasi survei, hanya Kabupaten Probolinggo yang mayoritas petani perempuannya menghabiskan waktu dua hingga lima jam di sawah.

Permasalahan yang dihadapi dalam Usaha Pertanian

Berbagai kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh responden yaitu mulai dari penggunaan alat pertanian, perolehan bibit tanaman, perolehan pupuk/pestisida, pelaksanaan kegiatan pasca panen, hingga mengalami kerugian akibat gagal panen.

Dalam konteks penggunaan alat pertanian, seperti yang terlihat pada Tabel di bawah ini, responden menyatakan tidak mengalami kendala dalam penggunaan alat pertanian. Namun di daerah Kabupaten Garut menyatakan bahwa mereka mengalami kendala. Hal tersebut dilihat dari nilai total sebesar 0.58 yang menunjukkan adanya kendala dalam penggunaan alat pertanian. Kendala yang sering dialami sehubungan dengan penggunaan alat



pertanian meliputi: tidak memiliki alat, alat yang terlalu berat (keterbatasan secara fisik), alat terlalu canggih, sedangkan yang dimiliki mereka tidak canggih, dan harga alat pertanian yang mahal.

Kemudian pada kasus menghadapi permasalahan terkait perolehan bibit tanaman, secara sebagian menyatakan ada kendala sebagian tidak. Kabupaten Lahat dan Probolinggo tidak mengalami kendala dalam memperoleh bibit tanaman, sedangkan di Kabupaten Garut dan Kolaka mengalami kendala dalam memperoleh bibit tanaman. Kendala dalam memperoleh bibit tanaman biasanya berupa mahalnya harga bibit dan sulitnya memperoleh benih yang berkualitas.

Tabel 20. Tanggapan Responden terhadap Permasalahan dalam Usaha Pertanian

Pernyataan	Semua Sampel (n=1400)	Garut (n=300)	Kolaka (n=400)	Lahat (n=300)	Probolinggo (n=400)
Apakah Ibu/Sdri pernah mengalami kerugian?	0.88	0.97	0.83	0.94	0.84
Apakah Ibu/Sdri mengalami kendala untuk mendapatkan pupuk/pestisida?	0.72	0.79	0.63	0.68	0.80
Apakah Ibu/Sdri mengalami kendala untuk mendapatkan bibit tanaman?	0.50	0.70	0.52	0.37	0.44
Dalam melakukan kegiatan usaha pertanian apakah Ibu/Sdri mengalami kendala dalam menggunakan alat pertanian?	0.48	0.58	0.43	0.48	0.46
Apakah Ibu/Sdri mengalami kendala dalam melakukan kegiatan pasca panen?	0.47	0.52	0.40	0.53	0.45

Catatan: Semakin mendekati 1.00 maka semakin banyak responden yang setuju terhadap pernyataan tersebut, begitupun sebaliknya

Di sisi yang lain, terkait permasalahan ketersediaan pupuk/pestisida, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk/pestisida. Berdasarkan jawaban responden, kesulitan dalam mendapatkan pupuk/pestisida disebabkan oleh mahalnnya harga dan terbatasnya persediaan. Selain itu, beberapa responden menyatakan bahwa nama mereka tidak terdaftar sebagai kelompok tani sehingga mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk/pestisida.

Kendala lain seperti dalam melakukan kegiatan pasca panen, sebagian menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan setelah melakukan kegiatan pasca panen sebagian lagi tidak. Di Kabupaten Kolaka dan Probolinggo cenderung tidak memiliki kendala tersebut. Namun dua kabupaten lain mengalami kendala tersebut. Responden merasa memiliki kendala karena menghadapi kendala finansial seperti modal untuk penanaman pasca panen, teknik pengolahan hasil panen, dan kendala dalam pemasaran.

Kendala terakhir yang dihadapi oleh responden adalah hasil panen yang buruk atau

mengalami gagal panen. Di keempat kabupaten, responden berpendapat bahwa mereka pernah mengalami gagal panen. Berdasarkan hasil survei, responden menjawab tentang penyebab utama mereka mengalami gagal panen, antara lain faktor cuaca, wabah penyakit tanaman, hama seperti tikus, wereng, dan lainnya, serta kekeringan/kekurangan air.

Kesehatan Ibu dan Bayi Responden

Pada survei, responden juga diminta untuk memberikan tanggapan terkait keterlibatan responden dalam bertani selama kehamilan, pasca kelahiran, dan selama menyusui. Secara keseluruhan, responden melakukan kegiatan bertani selama kehamilan dan menyusui. Namun responden tidak setuju jika melakukan kegiatan bertani pasca melahirkan. Responden tetap melakukan aktivitas bertani selama kehamilan karena membantu suami atau keluarga. Selama menyusui, responden tetap melakukan aktivitas bertani namun tetap memperhatikan kebutuhan ASI bayi responden.

Tabel 21. Tanggapan Responden tentang Kegiatan Bertani selama Menyusui, Penjagaan Bayi, dan Tempat Penitipan Anak

Pernyataan	Semua Sampel (n=1400)	Garut (n=300)	Kolaka (n=400)	Lahat (n=300)	Probolinggo (n=400)
Tetap bertani selama kehamilan	0.50	0.47	0.37	0.77	0.46
Tetap bertani pasca kelahiran	0.13	0.22	0.13	0.00	0.17
Tetap bertani selama menyusui	0.51	0.48	0.41	0.70	0.51
Ada seseorang yang menjaga bayi ketika responden bertani	0.52	0.52	0.44	0.56	0.58
Kebutuhan terhadap tempat penitipan anak	0.09	0.16	0.05	0.11	0.07

Catatan: Semakin mendekati 1.00 maka semakin banyak responden yang setuju/mengiyakan terhadap pernyataan tersebut, begitupun sebaliknya



Selain itu, responden juga menjawab terkait kesediaan seseorang untuk menjaga bayi dan kebutuhan penitipan anak. Untuk pertanyaan kesediaan seseorang menjaga bayi ketika responden bertani, secara keseluruhan menjawab bersedia. Responden memiliki anggota keluarga atau lainnya yang bersedia untuk menjaga bayi responden ketika responden

bertani. Adapun terkait dengan kebutuhan akan tempat penitipan anak ketika mereka melakukan aktivitas pertanian, di seluruh kabupaten memilih tidak memerlukan tempat penitipan anak. Responden berpikir bahwa biaya menitipkan anak mahal dan kurangnya kepercayaan terhadap orang lain untuk merawat anak-anak mereka.

Tabel 22. Persepsi Responden terhadap Kesehatan Ibu dan Bayi

Pernyataan	Semua Sampel (n=1400)	Garut (n=300)	Kolaka (n=400)	Lahat (n=300)	Probolinggo (n=400)
Saya merasa aman ketika melakukan kegiatan bertani saat hamil	2.41	2.36	2.35	2.67	2.31
Saya mengetahui risiko kesehatan ketika melakukan aktivitas bertani saat hamil	3.05	3.02	3.15	3.07	2.97
Ketika hamil, saya memakai alat pelindung diri saat bertani untuk melindungi dari bahaya pestisida	3.21	3.28	3.30	3.20	3.10
Saya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) misalnya sarung tangan, topi, penutup hidung/masker, sepatu dsb untuk keselamatan dan kesehatan saya	3.25	3.35	3.43	3.19	3.05

Catatan: Rata-rata diambil dari skala likert 1-4. Skala 1 → sangat tidak setuju, skala 4 → sangat setuju

Berdasarkan tabel persepsi terhadap kesehatan ibu dan bayi di empat kabupaten secara keseluruhan setuju dengan pernyataan yang diungkapkan. Pada pernyataan pertama, responden setuju bahwa mereka merasa aman ketika melakukan aktivitas pertanian selama hamil.

Responden juga setuju dengan pernyataan kedua, ketiga, dan keempat yaitu terkait risiko dan bahaya selama melakukan aktivitas di masa hamil dan memakai alat pelindung saat bertani di masa hamil untuk kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden mengetahui dan peduli terkait kesehatan dan keselamatan dirinya dan bayinya walaupun tetap beraktivitas sebagai petani.

Layanan Pendidikan

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah anggota rumah tangga responden yang sedang bersekolah. Lebih dari 50% responden memiliki anggota keluarga yang sedang bersekolah, meskipun jumlahnya berbeda-beda. Sebanyak 31% responden memiliki satu anggota keluarga yang sedang bersekolah. Berikutnya, sebanyak 27%

dari jumlah responden memiliki dua anggota keluarga yang bersekolah. Namun, ada juga mereka yang tidak memiliki anggota keluarga yang bersekolah, yaitu sebanyak 36% responden. Hanya 4% dari jumlah responden yang memiliki tiga anggota keluarga yang bersekolah.



Unsplash/NRediculPict

Tabel 23. Jumlah Anggota Rumah Tangga Responden yang Sedang Bersekolah

Jumlah Anggota RT yang Sedang Bersekolah	Semua Sampel (n=1400)	Garut (n=300)	Kolaka (n=400)	Lahat (n=300)	Probolinggo (n=400)
0	36.86%	46.67%	23.50%	38.67%	41.50%
1	31.29%	29.33%	35.25%	30.33%	29.50%
2	25.86%	20.00%	30.50%	26.33%	25.25%
3	4.86%	3.33%	8.25%	3.67%	3.50%
4	0.71%	0.33%	2.00%	0.33%	0.00%
5	0.43%	0.33%	0.50%	0.67%	0.25%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Berdasarkan tabel diatas juga dapat diketahui bahwa di Kabupaten Garut, Lahat, dan Probolinggo lebih dari 30% responden tidak memiliki anggota keluarga yang sedang bersekolah. Sedangkan di Kabupaten Kolaka

kurang dari 30% responden yang memiliki anggota keluarga tidak bersekolah. Sisanya adalah responden yang memiliki anggota keluarga yang sedang bersekolah dengan jumlah yang berbeda-beda.

Tabel 24. Jarak Sekolah dari Lokasi Tempat Tinggal Responden

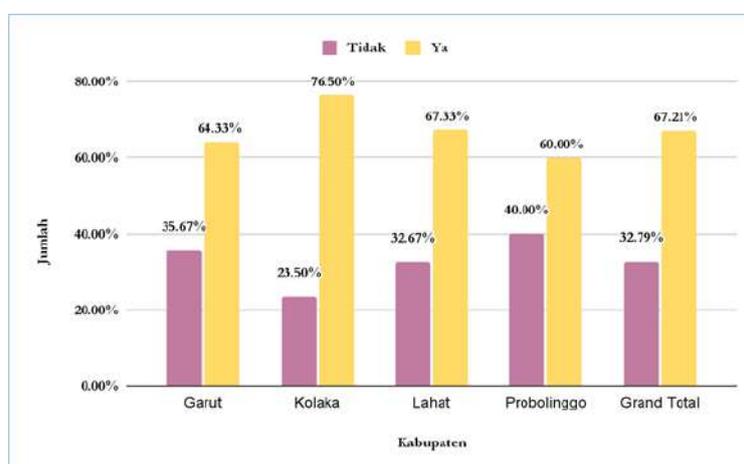
Pernyataan	Semua Sampel	Garut	Kolaka	Lahat	Probolinggo
Jarak rumah dengan fasilitas pendidikan	6.60 km	2.24 km	7.72 km	5.34 km	2.82 km

Mengenai jarak rumah ke sekolah yang ditunjukkan pada tabel di atas, mayoritas responden menyatakan bahwa jarak rumah ke sekolah cukup dekat. Rata-rata jarak rumah menuju sekolah secara keseluruhan sekitar 6.6 km.

Berdasarkan empat kabupaten survei, Kabupaten Kolaka merupakan kabupaten yang respondennya memiliki rata-rata jarak rumah ke sekolah terjauh yaitu 7.72 km. Sedangkan Kabupaten Garut dan Kabupaten Probolinggo rata-rata jarak rumah ke sekolah tidak lebih dari 3 km.

Melek Digitalisasi

Di era modern ini, para petani dituntut untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi atau melek digital, dimana para petani setidaknya harus memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Berdasarkan hasil survei, 67% responden memiliki dan menggunakan smartphone. Sementara itu, sisanya tidak memiliki dan menggunakan smartphone. Dari keseluruhan kabupaten, mayoritas petani perempuan telah memiliki dan menggunakan smartphone.



Gambar 5. Status Kepemilikan dan Penggunaan Smartphone



Tabel 25. Persepsi Responden Terhadap Keadaan Internet dan Kemudahan Pengoperasian Smartphone

Pernyataan	Semua Sampel (n=1400)	Garut (n=300)	Kolaka (n=400)	Lahat (n=300)	Probolinggo (n=400)
Keadaan akses internet	2.91	2.95	3.19	2.12	3.22
Kemudahan saat mengoperasikan <i>smartphone</i>	2.63	2.53	3.00	2.51	2.43

Catatan: Rata-rata diambil dari skala likert 1-4. Skala 1 → sangat sulit, skala 4 → sangat mudah.

Tabel diatas menunjukkan persepsi petani perempuan terhadap keadaan internet di daerah responden serta kemudahan mengoperasikan *smartphone*. Secara keseluruhan, di empat kabupaten keadaan akses

internet cenderung mudah didapatkan dan mudah mengoperasikan *smartphone*. Tidak ada daerah yang mengalami kesulitan akses internet dan seluruh responden merasa mudah mengoperasikan *smartphone* yang mereka miliki.

Tabel 26. Persepsi Responden Terhadap Penggunaan Smartphone

Pernyataan	Semua Sampel (n=1400)	Garut (n=300)	Kolaka (n=400)	Lahat (n=300)	Probolinggo (n=400)
Penggunaan <i>smartphone</i> untuk menunjang usaha tani	0.32	0.36	0.40	0.27	0.24
Penggunaan media sosial	0.55	0.60	0.65	0.49	0.44
Penggunaan <i>smartphone</i> untuk jual beli online	0.24	0.31	0.33	0.19	0.15
Kepemilikan toko di e-commerce	0.02	0.02	0.04	0.02	0.01

Catatan: Semakin mendekati 1.00 maka semakin banyak responden yang setuju/mengiyakan terhadap pernyataan tersebut, begitupun sebaliknya

Apabila dilihat dari pemanfaatan *smartphone*, petani perempuan cenderung menggunakan *smartphon*enya untuk media sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai 0.55 yang menunjukkan bahwa responden cenderung memanfaatkan *smartphon*enya untuk media sosial. Namun, *smartphone* yang dimiliki dan digunakan oleh responden cenderung tidak digunakan untuk menunjang usaha tani, untuk jual beli online, maupun untuk membuka to

e-commerce. Tidak digunakannya *smartphone* untuk beberapa kegiatan tersebut dapat dilihat dari nilai yang kurang dari 0.5 yang mengindikasikan banyaknya responden tidak memanfaatkan *smartphone* untuk kegiatan tersebut. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa petani perempuan belum memanfaatkan *smartphone* yang mereka miliki untuk menunjang usaha tani maupun usaha lain yang dapat meningkatkan perekonomian responden.

An aerial photograph of a rural village nestled in a valley. The landscape is dominated by lush green terraced rice fields that curve around the hillsides. In the center of the village, there are several traditional wooden houses with steeply pitched, dark roofs. A narrow dirt path winds through the fields, leading towards the buildings. The overall scene is peaceful and depicts a typical agricultural community.

BAB V

BAGAIMANAKAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI SEKTOR PERTANIAN?



Indeks pemberdayaan perempuan di sektor pertanian yang dihitung pada penelitian ini adalah berdasarkan pemberdayaan dalam 5 Dimensi. Pada hasil perhitungan didapatkan bahwa pada keseluruhan sample (gabungan dari semua daerah) terdapat 16 persen petani perempuan yang dikategorikan berdaya. Sebaliknya 84 persen perempuan petani adalah masih belum berdaya. Hasil yang tidak jauh beda jika dilihat di setiap wilayah lokus penelitian. Di Probolinggo, sebanyak 19 persen sampel terkategori berdaya. Sedangkan di Garut sebanyak 84 persen petani perempuan masih belum berdaya. Di Lahat dan Kolaka, proporsi perempuan yang berdaya adalah sama yaitu 21 persen dari sampel. Rata-rata skor ketidakberdayaan adalah sekitar 31 persen – 36 persen. Hal ini berarti, dari perempuan yang tidak berdaya, maka mereka tidak berdaya di 31 persen – 36 persen keseluruhan domain.

Table 27. Indeks Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian

	All Samples	Probolinggo	Garut	Lahat	Kolaka
Perempuan berdaya (%)	16	19	16	21	21
Perempuan yang tidak berdaya (%)	84	81	84	79	79
Rata-rata skor ketidakberdayaan	0.33	0.33	0.33	0.31	0.36
Index ketidakberdayaan	0.28	0.27	0.28	0.24	0.28
Index pemberdayaan	0.72	0.73	0.72	0.76	0.72

Sumber: Perhitungan Penulis

Untuk melihat lebih dalam, diperlukan analisis lebih jauh terkait dimensi pembentuk indeks pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. Terdapat 5 dimensi besar yaitu komponen 1) Produksi yaitu komponen yang terkait kegiatan di sektor pertanian; 2) Sumberdaya yaitu terkait kepemilikan, pembelian dan penjualan aset, serta akses dan keputusan kredit; 3) Control terhadap pendapatan; 4) Kepimpinan yaitu meliputi keanggotaan terhadap kelompok masyarakat dan bicara di depan umum serta 5) Alokasi waktu yaitu tentang beban kerja dan waktu luang.

Tabel 27 menunjukkan proporsi perempuan yang tidak berdaya berdasarkan setiap komponen. Pada tabel tersebut dapat dilihat secara umum proporsi perempuan yang tidak berdaya dengan nilai relatif kecil (di bawah 10 persen) pada seluruh sampel penelitian adalah pada komponen control terhadap pendapatan yang dimiliki.

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan petani di seluruh lokus pertanian berdaya dalam hal kontrol terhadap pendapatan yang dimiliki. Hal ini selaras dengan temuan FGD bahwa mayoritas pengelolaan pendapatan diserahkan kepada istri/perempuan baik pendapatan yang dihasilkan pribadi ataupun dihasilkan oleh pasangan.

Selanjutnya, terdapat proporsi yang tidak sama antar lokus pertanian sehingga hal ini bersifat unik di setiap daerah. Misalnya pada komponen kepemilikan aset, proporsi perempuan yang tidak berdaya cukup besar (lebih dari 10 persen) di Lahat dan Kolaka. Namun, hal ini tidak ditemukan di Probolinggo dan Garut serta keseluruhan sampel. Kondisi yang berbeda ini dapat dikaitkan dengan budaya bahwa di kepemilikan aset diserahkan kepada perempuan/istri. Selanjutnya, ditemukan bahwa banyak perempuan yang tidak berdaya dalam hal keikutsertaan terhadap kelompok masyarakat di daerah Probolinggo dan Kolaka. Sehingga hal ini mengindikasikan kesempatan keikutsertaan dalam kelompok masyarakat belum merata di semua daerah. Sebagai contoh, keikutsertaan petani perempuan di Kabupaten Probolinggo dan di Kabupaten Garut sangat berbeda. Di Kabupaten Probolinggo petani perempuan relatif sulit untuk bergabung di dalam kelompok tani. Bahkan petani perempuan kesulitan berpendapat jika dalam satu forum kemasyarakatan dengan laki-laki, seperti forum musyawarah desa.

"...Susahnya petani perempuan untuk masuk ke kelompok petani. Di daerah Kulon, kelompok taninya terkesan eksklusif, susah mau masuk perempuannya..."

-Petani Perempuan Kab. Probolinggo

"...Ketika pra-musyawarah desa, kami (Pemda) mendorong ibu-ibu yang selama ini belum diundang di musdes, kita kumpulkan supaya menyampaikan usulannya kepada pak Kepala Desa. Nah kemarin ketika berkumpul dengan ibu-ibu petani, banyak usulan yang didapat. Hanya saja, ketika perwakilan petani perempuan dicampur dengan bapak-bapak, usulan yang disiapkan itu hilang. Apalagi bapak-bapak itu sering ngomong kepada ibu-ibu, "mau kemana, ngapain ngomong, coba dengarkan". Itu bahasa yang sering didengar. Nah akhirnya kalo seperti itu kan pendapat ibu-ibu dipatahkan, jadi nggak bersuara..."

-Pemerintah Kab. Probolinggo

Sementara itu, di daerah lainnya seperti Garut, petani perempuan cukup aktif terlibat pada beberapa kelompok kemasyarakatan. Seperti, keikutsertaan petani perempuan di Gapoktan (Gabungan kelompok tani), Pembentukan kelompok wanita tani, hingga keikutsertaan petani perempuan pada program-program yang meningkatkan pemberdayaan petani perempuan seperti Program "Harum Madu" dan "Teras Pangan". Pembentukan kelompok tani tersebut sangat didukung oleh pemerintah kabupaten Garut.

"Adanya program Harum Madu. dari Pemerintah. (pemanfaatan halaman rumah terpadu) Bantuan untuk program dari tahun 2017 kalau tidak salah pernah dilombakan, nah sekarang Harum Madu di desa kami masuk 10 besar. Program Harum Madu dari desa biasa swadaya atau patungan."

-Petani Perempuan Kab. Garut

"... Program Harum Madu ini dilatarbelakangi bahwa inflasi harga kebutuhan pokok sangat dipengaruhi harga - harga komoditas pertanian seperti cabe. Cabe dan bawang komoditas utama di program harum madu. Tujuan harum madu ini agar stok 2 komoditas ini stabil. Garut juga ada kasus stunting, dalam ikut berpartisipasi mencegah stunting kita gunakan memenuhi kebutuhan sayuran selain itu, itu ada protein hewani seperti lele dalam ember, ternak ayam dll hingga terpadu itu di situ. Pelaksana di lapangan itu sebagian besar kelompok wanita tani."

-Pemerintah Kab. Garut

".... Terkait masalah partisipasi jadi ibu dari Kelompok Wanita Tani (KWT) kami mengupayakan petani perempuan membentuk kelompok - kelompok tani perempuan yang ada legalitasnya. Dengan adanya kelompok - kelompok yang legalitas ini menjadikan kelompok tersebut mudah



Pixabay.com/kirildobrev

mengakses bantuan dari pemerintah. Karena program pemerintah itu turunnya ke legal dan kelompok tani yang berdiri sendiri itu nanti tidak bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah sehingga salah satu kami dorong kelompok - kelompok itu menjadi legal menjadi KWT. ..."

-Pemerintah Kab. Garut

".... Program "Teras Pangan" adalah kegiatan KWT yang berorientasi pada output. Para petani perempuan mengelola lahan pekarangan dengan komoditas pertanian. Harapannya, hasil pertanian di pekarangan bisa dikonsumsi oleh rumah tangga dan kelompok tersebut, jadi harus dijamin konsumsi mereka terpenuhi dulu baru mereka bisa memasarkan keluar. Jadi outputnya adalah ada gizi dalam rumah tangga tersebut..."

-Pemerintah Kab. Garut

Kemudian terkait beban kerja, ditemukan bahwa proporsi perempuan yang tidak berdaya adalah cukup besar hanya di Garut saja. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja (dalam hitungan waktu) masih cukup besar di daerah ini, tidak di daerah lain. Salah satu penyebab beban petani perempuan yang dirasa tidak berdaya khususnya terkait beban kerja bagi petani perempuan di Kabupaten Garut adalah karena peran ganda yang dihadapi oleh petani perempuan sebagai petani yang bekerja di lahan pertanian dan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan rumah tangga setiap harinya. Beban bekerja sebagai petani dan mengurus rumah dan anak ini menjadi tambahan beban perempuan sebagai petani.

"...Jadi kalau biasanya perempuan itu jarang yang menggarap sawah sampai hektar jadi mungkin di pekarangan depan rumah atau dinding bisa ditanami selada dengan bekas minuman digantung itu bisa, kemudian bawahnya punya kolam luasnya setengah ruangan ini misalnya bawahnya kolam atasnya bisa tanaman hidroponik, jadi variasi tanaman itu sebenarnya bisa menghasilkan banyak sebetulnya. Kemudian kalau skala hektar kita butuh tenaga kerja jadi posisinya sebagai petani besar jadi beda lagi ceritanya. Selain bertani, kami (petani perempuan) juga mengurus rumah dan kebutuhan anak...."

-Petani Kab. Garut

Sebaliknya, hasil yang cukup konsisten didapatkan di semua daerah adalah proporsi perempuan yang tidak berdaya masih cukup besar (lebih dari 10 persen) terkait komponen produksi, pembelian dan penjualan aset, akses dan keputusan kredit, bicara di depan umum dan waktu luang. Pada komponen produksi mayoritas perempuan tidak berdaya dalam memberikan input terkait keputusan produktif pada kegiatan pertanian. Selain itu mayoritas perempuan petani tidak memiliki otonomi dalam kegiatan produksi. Hal ini berarti motivasi yang dilakukan adalah berasal dari motivasi eksternal dan sosial. Untuk komponen pembelian/penjualan aset dan akses kredit, proporsi perempuan yang tidak berdaya juga cukup besar. Dari hasil FGD ditemukan karena mayoritas keputusan pembelian/penjualan aset merupakan keputusan bersama dengan pasangan atau keluarga. Jarang sekali perempuan bisa memberikan keputusan sendiri untuk hal ini.

Terkait akses dan keputusan kredit, perempuan petani banyak yang tidak berdaya dikarenakan untuk memperoleh kredit pada lembaga keuangan diperlukan persetujuan suami/pasangan. Selain itu suami/pasangan juga sebagai penjamin atas kredit yang diajukan. Sehingga sangat wajar bahwa masih banyak

Sehingga sangat wajar bahwa masih banyak perempuan petani yang tidak berdaya terkait akses dan keputusan kredit.

Dari hasil FGD juga terlihat bahwa akses pengajuan kredit cukup terbuka bagi petani perempuan di berbagai daerah penelitian, namun masih banyak tantangan yang dihadapi bagi petani perempuan memperoleh akses kredit, terutama terkait bagaimana syarat pengajuan dimana memerlukan persetujuan suami/pasangan. Hampir di seluruh daerah penelitian, pengajuan kredit oleh petani perempuan sering kali membutuhkan persetujuan dan tanda tangan suami, terutama untuk pinjaman dalam jumlah besar atau yang diakses melalui bank formal. Misalnya, di Kolaka dan Lahat, izin suami diperlukan untuk pengajuan kredit di bank, yang menunjukkan adanya keterikatan perempuan pada persetujuan pasangan dalam keputusan finansial.

".... Ketika ibu – ibu petani mengajukan pinjaman ke Bank, maka diperlukan persetujuan bapak. Biasanya pengajuan kredit ke bank BRI. Tapi jika pinjaman selain di bank yang tanpa persetujuan suami itu ada sih.. seperti pinjaman dari kelompok menabung. Tapi ya kalau membutuhkan modal tambahan untuk bertani dan mengajukan kredit ke Bank, memang aturan nya memerlukan tanda tangan suami, karena itukan pengambilan keputusan besar, kita kredit dalam jumlah yang besar untuk tambahan modal. Apabila mengajukan kredit di Bank tanpa tanda tangan suami, kami tidak berani karena mengajukan kredit dalam jumlah besar ..."

-Petani Perempuan Kab. Kolaka

".... Pernah (kami) mengajukan kredit ke bank, seperti Bank Mekar, BTPN Syariah, dan MBK. Pengajuan Kredit Usaha Rakyat juga menyesuaikan dengan kemampuan petani, biasanya sesuai agunan yang dimiliki, itu jika kami ingin mengajukan kredit modal dalam jumlah yang besar. Lamanya angsuran itu



[Pixabay.com/ignartonosbg](https://www.pixabay.com/ignartonosbg)

juga tergantung dengan agunan yang dimiliki, kalau sampai ratusan juta bisa sampai 3 tahun. Tapi untuk mengajukan kredit tersebut perlu izin dari suami, karena kalau tidak, tidak bisa. ..."

-Petani Perempuan Kab. Lahat

Selanjutnya, banyak perempuan petani yang dikategorikan tidak berdaya karena merasa tidak nyaman bicara di depan umum (lebih dari 40 persen dari keseluruhan responden). Dari hasil FGD dapat digambarkan bahwa secara umum, meskipun ada upaya untuk melibatkan perempuan dalam musyawarah dan beberapa program desa (dimana indikator bagaimana petani perempuan mampu berbicara di depan umum), namun masih terdapat tantangan bagi petani perempuan dalam hal kepemimpinan perempuan dan kebebasan mereka untuk menyuatkan pendapat di depan umum, terutama dalam forum yang didominasi laki-laki. Kemampuan berpendapat di depan umum bagi petani perempuan masih terbatas dimana kegiatan atau pun forum yang didominasi perempuan seperti kegiatan PPK, Posyandu maupun kegiatan sebagai Kader Pemberdayaan Manusia (KPM). Bahkan di beberapa daerah, petani perempuan tidak mampu bersuara jika dalam satu forum bersama laki-laki.

"... Di Probolinggo, partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan musyawarah desa terlihat cukup signifikan, khususnya peran mereka di kegiatan seperti PPK, Posyandu, dan Kader Pemberdayaan Manusia (KPM). Setiap desa di Probolinggo memiliki satu kader yang ditugaskan mengurus isu-isu penting seperti stunting..."

-Pemerintah Daerah Kab. Probolinggo

"... Meskipun perempuan secara aktif dilibatkan dalam kegiatan desa seperti PPK, Posyandu, Musyawarah Desa jika perangkat desa juga perempuan, Kami (Petani perempuan) sering kali masih merasa takut untuk menyuatkan pendapat, terutama dalam forum yang melibatkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya kaderisasi dan pelibatan perempuan, tantangan masih ada dalam hal kebebasan berpendapat dalam musyawarah desa..."

-Petani Perempuan Kabupaten Probolinggo

"... Petani Perempuan sudah dilibatkan dalam kegiatan musyawarah desa. kami tetap ditampung suaranya misalnya 75% suara ibu juga dipertimbangkan. Perwakilan ibu-ibu sering dapat ke musdes. tapi jika ada suatu forum dan kita ingin memberikan solusi, kami merasa lebih bebas jika forumnya sesama perempuan, kalau dengan bapak-bapak itu pola pikirnya biasanya berbeda. Jika satu forum dengan ibu-ibu kan bisa diskusi ini itu (permasalahan anak, keluarga atau yang lain), kalau bapak lebih monoton."

-Petani Perempuan Kabupaten Lahat

Dan yang terakhir adalah proporsi cukup besar juga terdapat pada komponen waktu luang. Hal ini mengindikasikan banyak perempuan petani yang belum puas dengan pembagian waktu yang ada karena mereka ingin menambah waktu luang untuk diri sendiri. Perempuan petani memiliki beban kerja ganda baik di sektor pertanian dan keluarga. Hal ini membuat mereka memiliki keterbatasan waktu luang untuk diri sendiri. Sehingga cukup banyak perempuan petani yang dikategorikan tidak berdaya pada komponen ini.

Berdasarkan hasil Focus Discussion Group (FGD), pengalokasian waktu luang petani perempuan dalam terlihat implisit dalam FGD. Pengalokasian waktu luang petani perempuan sangat tergantung pada bagaimana peran ganda yang harus dilakukan, yaitu bertani dan mengurus rumah tangga. Hampir semua petani perempuan di lokus penelitian merasa sulit untuk meluangkan waktu untuk dirinya sendiri dikarenakan peran ganda bertani dan mengurus keluarga. Seperti yang terjadi di Kabupaten Lahat. Petani perempuan bekerja di sawah atau kebun sejak pagi hingga sore, kemudian melanjutkan pekerjaan rumah tangga. Waktu luang sangat terbatas, dan mereka masih aktif bekerja selama kehamilan, terkadang atas kemauan sendiri.



"... Waktu bekerja sebagai petani, yaitu jam 7 atau 8 pulang set 4. Untuk pekerjaan rumah kita sendiri kalau pagi suami berangkat kita juga berangkat jadi mengurus anak suami tetap dikerjakan sendiri... bahkan ketika hamil kami pun sering pergi ke kebun ke sawah...."

-Petani Perempuan Kabupaten Lahat

"...Ketika bekerja di lahan pertanian, petani perempuan memang mempunyai pembagian tugas sendiri. biasanya suami melakukan pembersihan lahan, menyemprot insektisida, sedangkan kami menyemai, menanam, bantu juga untuk memanen (dengan memakai alat tradisional, pakai sabit, tidak pakai mesin). Selain bertani, kami (petani perempuan) juga membantu dalam mengurus hewan ternak. Tapi ya gitu, setelah bekerja di lahan pertanian kami (Petani Perempuan juga harus mengurus anak dan rumah, apalagi terkait mengasuh anak, pembagian tugas di rumah tetap di ibu yang lebih besar, meski suami tetap membantu...."

-Petani Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tidak hanya terjadi pada petani perempuan di luar Jawa, petani perempuan di Jawa juga merasakan hal yang tidak jauh berbeda.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Garut. Banyak petani perempuan yang merasa waktu luang mereka sangat terbatas, bahkan selama kehamilan, karena mereka masih harus bertani dan mengurus anak, sering kali membawa anak ke kebun karena kurang percaya pada penitipan anak. Hal ini terjadi karena petani perempuan menghadapi beban kerja yang cukup berat, di mana mereka harus bertani, mengurus rumah, dan bahkan ada petani perempuan yang juga bekerja sebagai guru.

"... Kalau saya kan sebagai guru dan harus menjadwal dan pagi harus mempersiapkan kebutuhan anak suami begitu trus pagi habis subuh 5.30-6.30 saya membantu di kebun setelah itu mempersiapkan anak-anak, kemudian mengajar sampai jam 12 kemudian istirahat sampai jam 2 kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi di masyarakat seperti majelis taklim dan banyak tergali potensi dari ibu-ibu habis itu ke sekolah agama sampai 3.30 kemudian balik ke kebun lagi sampai set 5 jadi selebihnya kerjaan rumah tangga kalau malah penuh dengan rumah tangga. Jadi bingung saya kalo ditanya waktu luang...."

-Petani Perempuan Kabupaten Garut

Tabel 28. Proporsi Perempuan Yang Tidak Berdaya Berdasarkan Komponen

	Produksi		Sumberdaya		Pendapatan		Kepemimpinan		Alokasi Waktu	
	Input dalam keputusan produktif	Otonomi pada kegiatan produksi	Kepemilikan aset	Pembelian dan Penjualan Aset	Akses dan keputusan kredit	Kontrol pendapatan	Anggota kelompok masyarakat	Bicara di depan umum	Beban kerja	Waktu luang
All samples	72.5%	61.9%	7.6%	25.8%	39.5%	2.7%	18.3%	40.6%	8.4%	37.7%
Probo	70.8%	61.0%	3.0%	27.8%	24.5%	3.3%	24.0%	41.0%	5.0%	44.5%
Garut	84.7%	56.0%	5.3%	27.3%	43.3%	3.0%	4.7%	35.3%	14.3%	47.0%
Lahat	64.3%	64.0%	11.0%	17.0%	32.0%	0.3%	6.7%	45.7%	8.3%	37.0%
Kolaka	71.3%	65.5%	11.5%	29.3%	57.3%	3.8%	31.5%	40.3%	7.5%	24.5%

Sumber: Perhitungan Penulis

Gambar 6 menunjukkan kontribusi setiap komponen indikator untuk pembentukan indeks pemberdayaan perempuan. Jika kontribusi setiap komponen melebihi dari bobot yang dimiliki, hal ini berarti bahwa pada komponen tersebut secara umum perempuan memiliki tingkat ketidakberdayaan yang tinggi. Pada Gambar ditunjukkan bahwa terdapat konsistensi di semua observasi (keseluruhan daerah, Probolinggo, Garut, Lahat dan Kolaka) bahwa terdapat tiga komponen indikator yang kontribusinya melebihi bobot indeks, yaitu komponen 1) input dalam keputusan produktif; 2) otonomi pada kegiatan produksi dan 3) Bicara di depan umum. Hal ini berarti, ke tiga komponen tersebut berperan sangat besar terhadap kondisi ketidakberdayaan perempuan di sektor pertanian di seluruh lokasi penelitian.

Komponen input dalam keputusan yang produktif meliputi (1) apakah individu tersebut memiliki input tunggal atau bersama dalam membuat keputusan tentang (a) pertanian tanaman pangan, (b) pertanian tanaman komersial, (c) pemeliharaan ternak, dan (d) budidaya ikan dan (2) sejauh mana individu merasa ia dapat membuat keputusan pribadinya sendiri tentang aspek-aspek kehidupan rumah tangga berikut ini jika ia ingin: (a) produksi pertanian, (b) masukan apa yang harus dibeli, (c) jenis tanaman apa yang harus ditanam untuk produksi pertanian, (d) kapan harus mengambil atau siapa yang akan membawa hasil panen ke pasar, dan (e) apakah akan terlibat dalam pemeliharaan ternak (Alkire, 2011).

Dari hasil FGD, dalam konteks pengambilan keputusan di sektor pertanian di beberapa daerah penelitian, terlihat bahwa keputusan terkait pertanian dan kegiatan peternakan seringkali melibatkan dinamika antara input tunggal dan bersama. Dalam konteks pertanian tanaman pangan, Di beberapa wilayah seperti Garut dan Hulu Sungai Utara, keputusan mengenai pertanian tanaman pangan sering kali merupakan hasil dari input bersama antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Namun, peran perempuan dalam menanam padi dan sayuran seringkali dipicu oleh kepuasan pribadi dan kebutuhan keluarga, seperti yang terlihat di Garut, di mana perempuan memilih menanam padi dan sayur untuk kebutuhan konsumsi pribadi dan keluarga.

"...Kebetulan di Garut itu daerah dataran tinggi dan dataran rendah hampir fifty-fifty. Garut disebut sebagai negara agraris karena kebanyakan penduduknya petani. Apalagi Garut sangat potensi. 70% penduduk Garut bekerja sebagai petani dan dukungan dominan dari ibu-ibu, ibu-ibu suka bertani karena daya tarik bertani sangat luar biasa, misal ibu menanam padi ibu pasti ingin hasilnya. Memetik cabai milik sendiri di depan rumah, walaupun di pasar juga bisa cepat begitu tinggal beli. bahkan sayuran juga tersedia namun ketika bisa memetik sendiri itu merasa bangga. dan tadi juga memang di desa tidak ada pilihan kenapa menjadi petani..."

-Petani Perempuan Kabupaten Garut

Sebaliknya, di Hulu Sungai Utara, dengan lahan yang didominasi oleh rawa, pilihan tanaman pangan terbatas pada padi, yang didasarkan pada kondisi lingkungan. Di sini, keputusan sering kali bersifat bersama, dengan perempuan memainkan peran penting dalam menanam dan memanen, sementara laki-laki lebih terlibat dalam penjualan hasil panen. Ini menunjukkan adanya pengambilan keputusan terkait input pertanian di Hulu Sungai Utara yang seimbang antara anggota rumah tangga dalam membuat keputusan terkait pertanian tanaman pangan.

"... Di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini kan termasuk daerah yang 89% itu adalah rawa, maka mayoritas pekerjaan masyarakat HSU itu bertani padi dan beternak di lahan rawa. Sebagai gambaran di Hulu Sungai Utara ada sentra ternak itik, itu di desa Mamar. Kemudian untuk di kecamatan-kecamatan di sekitar sungai pandan itu juga banyak yang berprofesi sebagai petani ternak. selain itu, masyarakat yang biasanya bercocok tanam padi, biasanya hanya bisa menanam satu kali dalam satu tahun paling tidak, tidak seperti petani yang ada di Jawa yang bisa dua atau tiga kali bertani. Hal ini dikarenakan pertanian disini bergantung pada kualitas rawa dan curah hujan, ya



Pixabay.com/pb29

karena rawa itu biasanya lahan pertaniannya bergantung dari tadah hujan dan kadar humus. Kalau memang terjadi musim hujan secara terus-menerus ya kami tidak bisa bertani, karena memang air tidak bisa ditampung, jadi sama kayak sungai. jadi biasanya orang disini ya sudah tahu kapan dan apa yang cocok ditanam di sini. sehingga masa bertanian di HSU ini rata-rata ini boleh dikatakan 80% ini dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun Nah tantangannya kalau mereka tidak bisa bercocok tanam mereka ganti dengan beternak, mengiwak (mencari ikan), dan sebagainya. Ketika bercocok tanam ya meng-iwak berhenti dulu..."

-Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam pertanian tanaman komersial seperti di Garut dan Lahat, keputusan mengenai tanaman komersial seringkali didasarkan pada input bersama. Di Garut, perempuan petani terlibat dalam menanam jagung hibrida dan tanaman komersial lainnya, di mana pemilihan komoditas sering kali merupakan hasil dari kesepakatan antara petani dan kelompok tani (GAPOKTAN). Keputusan untuk menanam tanaman komersial seperti jagung, cabai, atau tembakau, biasanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan akses pasar.

"...Komoditas utama di Garut : jagung, padi, cabai, bawang, tembakau (kurang lebih 4000 dari musim tanam itu pemasaran nya bekerjasama dengan Jombang , Klaten). Kelompok tani biasa menanam jagung hibrida. Kalau jagung hibrida, yang saya amati ketika panen raya ada pengumpul - pengumpulnya, biasanya ketua kelompok yang juga menjadi pengumpul. Di Kabupaten Garut ini sudah ada GAPOKTAN yang mewadahi dan menyalurkan ke POKTAN itu letaknya Gapoktan bagendit. Biasanya yg mendapat bibit dari pemerintah itu sebagian hasilnya dijual ke gapoktan..."

-Petani Perempuan Kabupaten Garut

Di Lahat, perempuan petani sering kali menjual hasil pertanian komersial seperti karet, sawit, dan kopi, sembari menunggu hasil panen

tanaman lain. Meskipun keputusan terkait komoditas yang ditanam cenderung bersifat bersama antara suami dan istri, faktor ekonomi sangat berperan dalam menentukan tanaman yang ditanam dan dijual. Dengan demikian, keputusan untuk menanam tanaman komersial biasanya melibatkan input bersama yang mempertimbangkan keuntungan ekonomi keluarga.

"... di Lahat, ada beberapa komoditas pertanian kopi, padi, ada pula yang menanam sawit dan karet. Biasanya ya kami tanam ya keputusan dengan suami, tergantung musim dan lahan yang kita garap juga.."

-Petani Perempuan Kabupaten Lahat.

Dalam pemeliharaan ternak, keputusan sering kali diambil secara bersama, terutama dalam hal kepemilikan dan penjualan. Peran perempuan dalam pemeliharaan ternak cenderung lebih ke arah membantu merawat ternak, sementara laki-laki lebih dominan dalam menjualnya. Namun, meskipun perempuan mungkin tidak memiliki hak kepemilikan atas ternak, mereka tetap berkontribusi dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama, terutama dalam hal perawatan sehari-hari.

Di Kolaka, misalnya, tidak ada hak kepemilikan yang jelas terkait ternak, dan keputusan untuk menjual ternak biasanya melibatkan persetujuan bersama antara suami dan istri.

"...Kalau keputusan untuk memelihara ternak tidak ada keharusan, tapi ya pasti diskusi dulu sih dengan suami. Hewan ternak di Kolaka masih ayam saja.."

-Petani Perempuan Kabupaten Kolaka.

Di Lahat, meskipun tidak ada kepemilikan resmi, keputusan untuk menjual ternak juga memerlukan diskusi dan persetujuan bersama, serta hasil penjualannya digunakan bersama dalam keluarga.

"...Memiliki hewan ternak, seperti ayam, itik, dan kambing. Jika mau dijual harus izin suami terlebih dahulu. Tidak ada kepemilikan karena hasilnya dipakai bersama kalau yang merawat orang lain baru berbagi.."

-Petani Perempuan Kabupaten Lahat

Di wilayah seperti Hulu Sungai Utara, budidaya ikan adalah salah satu kegiatan pertanian yang penting, terutama karena kondisi lahan rawa yang mendukung kegiatan ini. Keputusan terkait budidaya ikan seringkali didasarkan pada keputusan bersama antara



Pixabay.com/arjunreddy223344

suami dan istri didasarkan pada kepemilikan peralatan untuk menangkap ikan atau memelihara seperti perahu, atau alat perikanan rawa.

"... Kebanyakan petani di Hulu Sungai Utara punya perahu. Setiap rumah memiliki perahu, biasanya digunakan untuk bertani, mencari ikan. Nah biasanya jika ingin menangkap ikan ya harus punya modal untuk membuat perahu itu sendiri.."

-Petani Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sementara itu, terkait bagaimana petani perempuan mampu mengambil keputusan dalam beberapa hal. Dari hasil FGD, tampak bahwa petani perempuan di berbagai daerah merasa bahwa mereka memiliki keterlibatan aktif dalam banyak keputusan rumah tangga terkait pertanian, tetapi otonomi mereka sering kali terbatas oleh tradisi, kebutuhan ekonomi, dan struktur keluarga. Di daerah seperti Kolaka, petani perempuan cenderung memiliki otonomi lebih besar dalam beberapa keputusan terkait pertanian karena dorongan dari program-program lokal. Program pelatihan yang dibuat untuk meningkatkan pemberdayaan petani perempuan membuat perempuan lebih percaya diri dan mampu mengambil keputusan sendiri terkait aktivitas pertanian.

"... Adanya program inklusi di Desa Cikongo, saya diajak menanam tidak usah membeli di pasar. Belajar menanam di P2R, lahan di rumah tidak digunakan untuk menanam bunga saja tetapi juga menanam sayur. (Pernah mengikuti pelatihan). Sehingga dengan hasil menanam sayur ini bisa berkurang minta uang ke suami karena hasil panen menanam sayur ini bisa dijual. Sehingga kegiatan menanam setiap sore ini bisa mengurangi gossip setiap hari. Kalau menurut pribadi saya daripada tinggal dirumah, saya lebih baik ikut suami untuk berkebun dan bertani. Membantu di kebun cengkeh dan merica.."

-Petani Perempuan Kabupaten Kolaka

Namun, di daerah seperti Garut dan Kolaka, keputusan-keputusan tersebut lebih sering diambil secara kolektif dengan suami atau keluarga. Di Garut misalnya pemilihan tanaman apa yang harus dipilih biasanya hasil diskusi antara petani perempuan dan kepala keluarga dan di kolaka.

"...di musim ini keluarga ini ingin menanam hortikultura itu misal Cabe nah yang memutuskan pemilihan kepala rumah tangga jadi di ibu mengikut saja. Karena untuk pemasaran, pembiayaan modal itu biasanya bapak – bapak nya. Ibu mensupport di sekitar dapur nya untuk menyediakan makanan untuk pekerja. ..."

-Petani Perempuan Kabupaten Garut

"....Di mana dalam mengambil keputusan bisayang kami melakukan diskusi terlebih dahulu (antara petani perempuan dan suami. Terlebih masalah penting baik dalam rumah tangga seper ketika anak hendak memilih jurusan kuliah pasti diskusi bersama..."

-Petani Perempuan Kabupaten Kolaka

Terlihat dari hasil FGD bahwa keputusan dalam rumah tangga terkait aktivitas pertanian maupun keputusan dalam rumah tangga seringkali diambil bersama keluarga atau suami, dengan alasan tradisi keluarga dan kebutuhan untuk mendukung ekonomi rumah tangga secara kolektif.

Sehingga disimpulkan bahwa petani perempuan rata-rata belum berdaya dalam memberikan input terkait kegiatan di sektor pertanian baik saat proses sebelum tanam, tanam dan pasca panen.

Otonomi pada kegiatan produksi mencerminkan kemampuan perempuan untuk bertindak berdasarkan apa yang ia hargai. Indikator ini menguji pemahaman perempuan tersebut terhadap situasi dan bagaimana ia menyeimbangkan berbagai motivasi—untuk menghindari hukuman atau ketidaksetujuan sosial dan untuk bertindak berdasarkan nilai-nilainya sendiri (Alkire, 2007). Komponen ini menunjukkan apakah motivasi perempuan dalam melakukan kegiatan pertanian merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri dengan nilai-nilai yang dipercaya atukah berasal dari orang lain berdasarkan nilai dari orang lain juga.

Dari hasil FGD ditemukan meskipun ditemui motivasi untuk menjadi petani perempuan adalah sebagai kepuasan pribadi, masih banyak ditemui bahwa perempuan menjadi petani dikarenakan aspek tradisi budaya, keluarga, dan kebutuhan ekonomi. Dalam diskusi dengan petani, meskipun beberapa petani perempuan di Kabupaten Garut dan di Kabupaten Probolinggo, menyatakan bahwa mereka merasa puas dan senang bertani, namun alasan utama menjadi petani adalah alasan tradisi keluarga yang turun temurun dan lingkungannya. Sementara di daerah lain, perempuan menjadi petani dikarenakan dorongan untuk membantu suami dan perekonomian keluarga

"...Saya sebetulnya jadi petani karena turun temurun dari keluarga. Kalau di desa kan ya karena turun temurun dari orang tua karena di desa kebanyakan jadi petani, kalau orang tua sudah pensiun jadi diteruskan anaknya apalagi punya sendiri jadi udah orang tua sudah meninggal pasti dibagi ke anaknya jadi anaknya harus mau melanjutkan. kesenangan jadi petani itu misal kita punya saudara datang dari kota bisa memberikan beras ke saudara yang ada di kota dengan rasa bangga karena kita bisa petik dari lahan milik sendiri jadi merasa ada kepuasan sendiri, karena kalau di pasar kan sudah dicampur kalau kita kan masih asli..."

-Petani Perempuan Kabupaten Garut

"...Kalau saya petani itu mulai sebelum lulus sekolah sudah sering diajak jadi kita saya sangat suka sekali di sawah suasana mungkin beda. di sawah itu saya sudah terbiasa di sawah bertani sampai lulus sekolah pun saya mencari pekerjaan lain mungkin kurang minat ya. jadi saya bisa senang karena dari awal sudah main di sawah biasa melihat terus main-main di sawah main-main di sawah jadi suka banget..."

-Petani Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Utara

"...menjadi petani perempuan kami mau membantu suami, membantu ekonomi rumah tangga. Selain itu dari kecil sudah bertani hingga punya suami, turun temurun. Tidak ada pekerjaan yang lain, dan dari kecil sudah diajarkan sebagai petani..."

-Petani Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Utara

"...Saya memilih bertani karena peluang dari usaha saya selaku perempuan terutama karena lahan pekarangan rumah, kalau ditanam sayur itu juga menopang agar tidak belanja sayur. Ibu-ibu memilih menjadi petani dikarenakan latar belakang tempat tinggi yang memiliki lahan pekarangan rumah dan menekan pengeluaran untuk konsumsi..."

-Petani Perempuan Kabupaten Lahat



Pixabay.com/mxwegele

Dari hasil survey dan FGD ditunjukkan bahwa rata-rata motivasi perempuan dalam melakukan kegiatan pertanian karena motivasi eksternal sehingga dianggap masih tidak berdaya dalam hal otonomi kegiatan pertanian.

Komponen ketiga yang berkontribusi besar pada ketidakberdayaan perempuan adalah bicara di depan umum. Apakah seseorang merasa nyaman berbicara di depan umum terdiri dari tanggapan terhadap pertanyaan tentang kemudahan seseorang dalam berbicara di depan umum untuk membantu memutuskan infrastruktur (seperti sumur kecil, jalan) yang akan dibangun, untuk memastikan pembayaran upah yang layak untuk pekerjaan umum atau program serupa, dan untuk memprotes perilaku buruk pihak berwenang. Responden dianggap cukup mampu berbicara di depan umum jika ia merasa nyaman berbicara di depan umum untuk setidaknya satu dari isu-isu ini. Meskipun tidak mencakup seluruh rentang kemungkinan keterlibatan publik, variabel ini memberikan beberapa indikasi tentang agensi responden dalam menyuarakan pendapat dan terlibat dalam tindakan kolektif.

Pada hasil FGD terkait kemampuan bicara di depan umum, terlihat bahwa perempuan mempunyai kesulitan atau ketidaknyaman dalam untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum, terlebih ketika menyampaikan di forum-forum dimana banyak laki-laki yang hadir seperti forum pembangunan desa atau musyawarah desa. Seperti pendapat petani perempuan yang ditangkap ketika dilakukannya FGD di Kabupaten Probolinggo dan Garut.

"...Suara petani perempuan dalam musyawarah sering kali tidak didengarkan. Keterlibatan mereka dalam permasalahan publik, seperti pembuatan MCK, jarang mendapatkan perhatian serius karena forum tersebut didominasi oleh laki-laki. Perempuan petani jarang dilibatkan dalam musyawarah pengembangan desa, sehingga aspirasi mereka tidak tersalurkan dengan baik...."

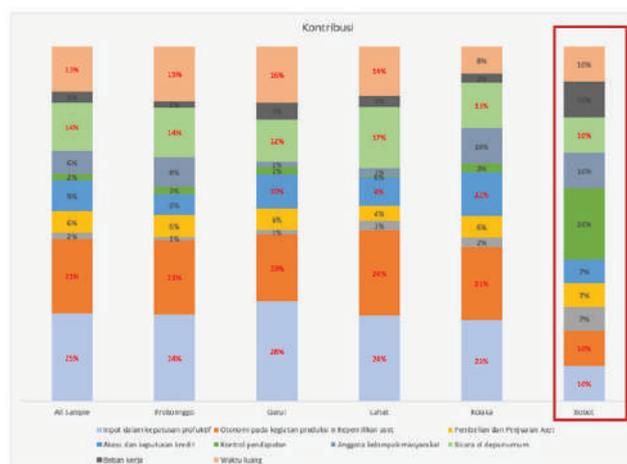
-Petani Perempuan Kabupaten Garut

"...Petani perempuan sulit untuk menyampaikan gagasan ketika musyawarah bersama laki-laki. Ketika kita pramusdes kemarin, kita mendorong ibu-ibu yang selama ini belum diundang di musdes ini kita kumpulkan supaya menyampaikan usulannya kepada pak kades. Nah kemarin ketika sama-sama ibu-ibu ngumpul, itu banyak usulan yang didapat. Cuma ketika perwakilan ketika dicampur dengan bapak-bapak, itu hilang. Apalagi bapak-bapak itu sering ngomong 'mau kemana, ngapain ngomong, coba dengarkan'. Itu bahasa yang sering didengar. Nah akhirnya kalo ibu-ibu dipatahkan begitu kan nggak bersuara...."

-Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

Dengan adanya kontribusi yang cukup besar terhadap ketidakberdayaan perempuan, dan proporsi perempuan yang tidak berdaya pada komponen ini, maka sangat penting untuk dijadikan pembelajaran bahwa perempuan di sektor pertanian harus lebih ditingkatkan keterlibatannya dalam menyuarakan pendapat dan tindakan kolektif.

Gambar 6. Kontribusi Setiap Komponen dan Bobot pada Indeks



BAB VI

MENGAPA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI SEKTOR PERTANIAN PENTING?



Menurut Narayan (2007), pemberdayaan memainkan peran penting dalam meningkatkan tata kelola, akses terhadap layanan, dan pengentasan kemiskinan (Narayan, 2007). Pada penelitian dapat dilihat bagaimana pemberdayaan mempengaruhi petani perempuan dalam mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, bantuan ekonomi dan akses terhadap administrasi kependudukan. Untuk melihat bagaimana pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap pelayanan Kesehatan, pada penelitian ini dilakukan estimasi hubungan pemberdayaan perempuan dan kepemilikan BPJS Kesehatan. Hasil analisis menunjukkan secara konsisten di semua sampel bahwa semakin petani perempuan berdaya maka kecenderungan untuk memiliki BPJS semakin tinggi. Hal terlihat dari parameter yang bernilai negatif dan signifikan pada derajat kesalahan 1 persen di keseluruhan sample, Probolinggo, dan Garut. Parameter yang bernilai negatif berarti jika indeks ketidakberdayaan semakin besar (artinya semakin tidak berdaya) maka kemungkinan individu perempuan petani memiliki BPJS Kesehatan semakin berkurang. Kepemilikan BPJS bersifat volunteer bagi sebagian besar petani perempuan yang bekerja di sektor informal. Sehingga membutuhkan kesadaran pribadi untuk memiliki jaminan Kesehatan ini. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, jika petani perempuan semakin berdaya maka kesadaran untuk memiliki jaminan Kesehatan juga tinggi. Hasil estimasi dapat dilihat pada tabel 29.

Tabel 29. Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Akses Bantuan Pemerintah - BPJS

	All samples	Probo	Garut	Lahat	Kolaka
	bpjs	bpjs	bpjs	bpjs	bpjs
Indeks Ketidakberdayaan	-5.615*** (0.234)	-1.917** (0.956)	-4.102*** (1.063)	-2.055 (1.594)	-0.985 (2.390)
_cons	1.810*** (0.0480)	1.013*** (0.238)	1.418*** (0.269)	1.656*** (0.351)	1.480*** (0.507)
Kab FE	YES				
N	1400	400	300	400	300

Catatan:

- Tabel di atas adalah hasil estimasi second stage antara cik (indeks ketidakberdayaan) dengan kemungkinan individu memiliki BPJS
- () adalah standar error
- *, **, *** adalah signifikan secara statistik pada level 10 persen, 5 persen dan 1 persen

Akses selanjutnya yang dilihat adalah akses terhadap bantuan pemerintah yang bersifat peningkatan kesejahteraan yaitu PKH dan BPNT. Hasil estimasi pada Tabel 30 dan Tabel 31 menunjukkan bahwa jika petani perempuan semakin berdaya maka kemungkinan petani perempuan mendapatkan bantuan pemerintah terkait kesejahteraan adalah semakin berkurang.

Secara khusus, terhadap bantuan PKH, hasil estimasi di keseluruhan sample, Probolinggo dan Kolaka menunjukkan hasil parameter yang bernilai positif dan signifikan secara statistik pada derajat kesalahan 1 persen. Hal ini berarti, jika



indeks ketidak berdayaan semakin tinggi maka kemungkinan individu mendapatkan PKH juga semakin tinggi. Sama halnya dengan BPNT, hasil estimasi menunjukkan parameter yang positif dan signifikan yang berarti bahwa semakin tidak berdaya maka kemungkinan mendapatkan BPNT juga semakin besar. Namun ditemukan hasil yang berbeda baik untuk PKH dan BPNT pada daerah Garut dan Lahat. Di Garut, pemberdayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PKH. Namun bernilai negatif signifikan terhadap penerimaan BPNT yang berarti jika perempuan semakin tidak berdaya maka kemungkinan mendapatkan BPNT semakin kecil. Hal ini perlu pendalaman lebih jauh untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi. Sedangkan di Lahat, baik untuk PKH dan BPNT, pemberdayaan perempuan tidak berpengaruh signifikan. Secara garis besar dapat dilihat, jika akses layanan bersifat afirmasi, yaitu pemberian bantuan, maka petani perempuan yang tidak berdaya cenderung menerima bantuan tersebut. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa salah satu komponen pemberdayaan adalah terkait kegiatan ekonomi dan produksi. Jika pada komponen ini tidak berdaya maka kecenderungan menerima bantuan yang bersifat peningkatan kesejahteraan akan semakin tinggi.

Tabel 30. Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Akses Bantuan Pemerintah – PKH

	All samples	Probo	Garut	Lahat	Kolaka
	PKH	PKH	PKH	PKH	PKH
Indeks Ketidakberdayaan	5.804*** (0.342)	3.599*** (0.799)	-3.614 (2.342)	5.209*** (0.314)	-2.294 (2.803)
_cons	-1.746*** (0.0451)	-1.405*** (0.197)	0.402 (0.774)	-1.719*** (0.0903)	0.216 (0.755)
Kab FE	YES				
N	1400	400	300	400	300

Catatan:

- Tabel di atas adalah hasil estimasi second stage antara cik (indeks ketidakberdayaan) dengan kemungkinan individu menerima bantuan pemerintah berupa Paket Keluarga Harapan (PKH)
- () adalah standar error
- *, **, *** adalah signifikan secara statistik pada level 10 persen, 5 persen dan 1 persen.

Tabel 31. Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Akses Bantuan Pemerintah – BPNT

	All samples	Probo	Garut	Lahat	Kolaka
	BPNT	BPNT	BPNT	BPNT	BPNT
Indeks Ketidakberdayaan	5.047*** (0.404)	4.067*** (0.670)	-5.728*** (1.376)	4.392*** (0.494)	-2.110 (1.744)
_cons	-1.598*** (0.0834)	-1.345*** (0.175)	1.442*** (0.489)	-1.541*** (0.117)	0.0631 (0.487)
	(0.0607)	(0.140)	(0.179)	(0.107)	(0.141)
Kab FE	YES				
N	1400	400	300	400	300

Catatan:

- Tabel di atas adalah hasil estimasi second stage antara cik (indeks ketidakberdayaan) dengan kemungkinan individu menerima bantuan pemerintah berupa Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)
- () adalah standar error
- *, **, *** adalah signifikan secara statistik pada level 10 persen, 5 persen dan 1 persen.

Akses terhadap administrasi kependudukan juga penting untuk dilihat karena permasalahan administrasi kependudukan dapat berpengaruh pada aspek yang lain. Estimasi pada keseluruhan sampel dan Lahat menunjukkan bahwa jika indeks ketidakberdayaan semakin tinggi maka kemungkinan individu perempuan mengalami permasalahan administrasi kependudukan, yaitu kesalahan dalam penulisan pekerjaan di KTP, akan semakin tinggi. Parameter indeks ketidakberdayaan bernilai positif dan signifikan secara statistik pada derajat 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jika petani perempuan tidak berdaya secara umum di lima dimensi maka kemungkinan adanya kesalahan dalam identifikasi pekerjaan sebagai petani di KTP akan semakin besar. Kesalahan ini dapat berdampak pada kesalahan identifikasi terkait pemanfaatan bantuan/program yang diberikan pemerintah terkait kegiatan di sektor pertanian. Sedangkan untuk daerah lain pemberdayaan tidak berpengaruh signifikan secara statistik.

Tabel 32. Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Permasalahan Administrasi

	All samples	Probo	Garut	Lahat	Kolaka
	Admin Problem	Admin Problem	Admin Problem	Admin Problem	Admin Problem
Indeks Ketidakberdayaan	6.040*** (0.117)	-0.513 (1.232)	-6.547 (6.407)	-2.606 (2.191)	6.106*** (0.457)
_cons	-1.514*** (0.0567)	0.898*** (0.325)	5.163** (2.114)	2.018*** (0.263)	-1.536*** (0.118)
Kab FE	YES				
N	1400	400	300	400	300

Catatan:

- Tabel di atas adalah hasil estimasi second stage antara cik (indeks ketidakberdayaan) dengan kemungkinan individu mengalami permasalahan administrasi kependudukan (ketidaksesuaian identitas pekerjaan pada KTP)
- () adalah standar error
- *, **, *** adalah signifikan secara statistik pada level 10 persen, 5 persen dan 1 persen.



Pixabay.com/TruongDinhAnh

BAB VII

APAKAH FAKTOR PENENTU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI SEKTOR PERTANIAN?



Pada bab sebelumnya, telah dibuktikan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki dampak yang signifikan terhadap akses pelayanan publik mendasar yaitu kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu penting untuk diketahui bahwa faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi pemberdayaan perempuan di sektor pertanian pada sampel yang diteliti. Pada penelitian ini kelompok besar faktor penentu pemberdayaan perempuan adalah karakter individu dan karakter rumah tangga. Pada karakter individu, faktor yang dilihat adalah keikutsertaan dalam organisasi masyarakat (dalam hal ini menjadi anggota Aisyiyah dan PKK), pendidikan, status perkawinan, usia, status dalam sektor pertanian, akses terhadap pelatihan dan kepemilikan tabungan. Sedangkan karakter rumah tangga adalah siapa kepala rumah tangga, status pekerjaan suami, pendidikan suami, kepemilikan rumah, jumlah anak dan jumlah tanggungan keluarga.

Hasil yang menarik dapat dilihat pada karakter individu yang dapat mempengaruhi pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. Keikutsertaan perempuan dalam organisasi masyarakat terutama menjadi anggota Aisyiyah memiliki peran yang signifikan secara statistik dalam peningkatan pemberdayaan perempuan. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai parameter yang negatif signifikan pada derajat kesalahan 1 persen pada hasil estimasi semua sampel. Ini berarti bahwa jika perempuan menjadi anggota Aisyiyah maka nilai indeks ketidakberdayaan mereka semakin kecil yang artinya mereka semakin berdaya. Jika dilihat di setiap lokus penelitian, bisa terlihat bahwa parameter yang signifikan ditemukan di Probolinggo dan Lahat. Pada kedua lokus ini terbukti bahwa peranan Aisyiyah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan adalah signifikan secara statistik. Sedangkan untuk dua lokus penelitian yang lain yaitu Garut dan Kolaka, parameternya juga bernilai negatif namun tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti keanggotaan Aisyiyah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan namun masih perlu ditingkatkan secara ukuran dan keefektifan program. Selanjutnya, untuk keanggotaan PKK memiliki potensi meningkatkan pemberdayaan perempuan namun hasil estimasi tidak terbukti dapat mencerminkan kondisi keseluruhan populasi. Hal ini diantaranya karena keanggotaan PKK cukup terbatas yaitu hanya 30 persen dari keseluruhan sampel penelitian yang menyatakan merupakan anggota PKK

Dari hasil FGD juga terlihat bagaimana program pemberdayaan petani untuk berdaya. Sebagai contoh, program Sekolah Tani yang



pexels/ihsanaditya

diadakan oleh Aisyiyah di Kabupaten Probolinggo untuk para petani perempuan. Program Sekolah Tani bagi petani perempuan disini sangat membantu petani perempuan untuk berdaya. Khususnya dalam membantu untuk mengatasi kelangkaan pupuk, sekolah tani ini melatih petani perempuan untuk membuat pupuk organik. Pelatihan pupuk organik ini pada awalnya berawal dari kegiatan kebun gizi yang ingin membantu menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk. Selain itu, dari kegiatan ini juga banyak inisiatif dari petani perempuan yang muncul seperti keinginan untuk membentuk Kelompok Wanita Tani di Kab. Probolinggo, bahkan sekolah tani pun diadakan untuk para suami untuk mengedukasi para suami untuk saling bantu meringankan pekerjaan petani perempuan baik di rumah atau di lahan pertanian.

"...Kami (Perwakilan Aisyiyah Kab. Probolinggo) sudah mengadakan pelatihan sekolah tani untuk khusus wanita tani. Terutama untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Kami membuat pelatihan, bagaimana cara membuat pupuk organik dengan bekerja sama dengan dinas pertanian. Di sana (Sekolah Tani) kegiatannya macem-macem mulai dari mengundang PPL, bagaimana cara membuat pupuk organik, karena supaya bapak-bapaknya nggak bingung ketika nggak ada pupuk. Ibu-ibunya yang bikin pupuk. Terus pestisida nabati. Kemarin kita terapkan di kebun gizi. Jadinya awalnya kita bikin kebun gizi. Karena nyari pupuk susah, terus ada sekolah tani, akhirnya dari situ ingin membuat kelompok tani...."

Perwakilan Aisyiyah Kab. Probolinggo

"...Alhamdulillah, kemarin kita (perwakilan Aisyiyah) sudah melakukan edukasi bapak-bapak. Edukasinya terkait bagaimana caranya bapak-bapak mau membantu ibu yang ada pekerjaan dirumah. Alhamdulillah setelah kami mengadakan edukasi kemarin itu, hasilnya dari ibu-ibu yang mengatakan "alhamdulillah bu, suami saya sudah mau membantu pekerjaan rumah gitu"...."

Perwakilan Aisyiyah Kab. Probolinggo



unsplash/isengrapher

Sementara itu, di Kabupaten Lahat, Aisyiyah berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga petani. Program Rumah gizi memberikan pelatihan bagaimana petani perempuan dapat memanfaatkan lahan disekitar rumah untuk berkebun ataupun berternak untuk memenuhi gizi keluarga. Selain itu, Aisyiyah juga mampu mendorong petani perempuan untuk lebih berperan dalam forum forum pembangunan desa di Lahat.

"...dengan adanya program rumah gizi dari Aisyiyah, hampir seluruh desa mengadopsi program ketahanan pangan rumah giz tersebut. dimana kawasan di sekitar rumah dimanfaatkan untuk beternak lele, bebek, ayam atau menanam sayur mayur, sehingga dapat mencegah stunting di desa. Selain itu sekarang dalam diskusi/rapat yang melibatkan perempuan, suara perempuan lebih didengarkan..."

Perwakilan Aisyiyah Kab. Probolinggo

Karakter individu yang juga berperan penting dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan adalah tingkat pendidikan. Dari hasil estimasi dihasilkan bahwa jika perempuan memiliki tingkat pendidikan menengah yaitu SMA/ sederajat maka nilai indeks ketidakberdayaan mereka akan lebih kecil, yaitu ditunjukkan dengan parameter yang bernilai negatif dan signifikan pada derajat kesalahan 1 persen untuk hasil di keseluruhan sampel. Hal ini berarti jika petani perempuan secara umum memiliki pendidikan setingkat SMA maka mereka akan lebih berdaya. Sama halnya dengan pendidikan menengah, nilai koefisien pada pendidikan tinggi adalah negatif dan signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa jika petani perempuan memiliki pendidikan minimum Diploma maka mereka akan semakin berdaya. Dan dari nilai koefisien semua variabel pendidikan dapat dilihat bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi merupakan perempuan yang paling berdaya. Hal yang menarik adalah, jika perempuan petani

memiliki pendidikan jenjang dasar yaitu setara SD dan SMP, nilai dari indeks ketidakberdayaan mereka tidak berbeda signifikan dengan individu yang tidak tamat SD. Hal ini terlihat dari parameter pendidikan dasar yang tidak signifikan secara statistik.

Selanjutnya, ditemukan bahwa usia perempuan juga memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat ketidakberdayaan di sektor pertanian. Dari hasil estimasi keseluruhan sampel dihasilkan bahwa usia memiliki bentuk U dalam pengaruhnya terhadap pemberdayaan perempuan (signifikan secara statistic dengan derajat kesalahan 1 persen). Hal ini berarti pada usia tertentu sebelum usia batas, usia memiliki pengaruh negatif terhadap ketidakberdayaan. Namun setelah melewati usia batas, usia memiliki pengaruh positif terhadap ketidakberdayaan. Berdasarkan perhitungan estimasi secara umum dihasilkan bahwa usia batas adalah 48 tahun. Hal ini berarti jika petani perempuan berusia 19 – 48 tahun, maka semakin bertambahnya usia maka petani perempuan akan semakin berdaya. Namun jika usia mereka melebihi 48 tahun maka angka keberdayaan mereka akan semakin berkurang.

Aspek lain yang muncul adalah status dalam pekerjaan di sektor pertanian. Terbukti signifikan secara statistik bahwa jika petani perempuan berstatus buruh saja (tidak menggarap lahan sendiri) maka indeks pemberdayaan mereka akan semakin besar. Hal ini menunjukkan status buruh tani secara statistik terbukti memiliki tingkat pemberdayaan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perempuan yang buruh dan (atau) menggarap lahan sendiri. Dari hasil FGD juga terlihat bahwa petani buruh di beberapa daerah terlihat tidak mampu berdaya lebih, karena petani buruh hanya melakukan aktivitas pertanian di lahan orang lain sehingga tidak mampu memiliki otonom untuk kapan musim tanam dimulai, tanaman apa yang akan ditanam atau bahkan pendapatannya. Petani buruh

biasanya akan sangat bergantung pada pemilik lahan dalam bertani. Oleh karena itu, status sebagai petani buruh menunjukkan ketidakperdayaan petani. Petani perempuan di beberapa daerah kebanyakan statusnya adalah petani buruh, tidak banyak petani perempuan yang sebagai pemilik lahan. Termasuk juga pengelolaan waktu dalam bekerja.

"...Di Probolinggo ada beberapa macam petani. Ada buruh tani dan petani. Nah yang disebut petani itu biasanya ada petani penggarap, petani pemilik. Saya misalkan, saya punya sawah, saya yang mengerjakan juga, artinya saya petani pemilik. Ada yang petani yang tidak punya sawah tapi bisa mengusahakan pertanian dengan cara sewa atau gadai itu namanya petani garap, biasanya kalo panen bagi hasil dengan pemilik lahan. Ada yang tidak punya sawah, tapi dia bertani, petani ini biasanya yang disebut dengan buruh tani. Kalo buruh tani sudah tidak mengetahui inputnya. tidak tahu apa yang harus ditanam, ikut pemilik lahan lah biasanya. Pokoknya bekerja disitu. Ada barang (bibit tanaman) ya mereka akan tanam, ada pekerjaan bisa yang mereka kerjakan (menanam, menyemai) ya mereka akan lakukan, ya mereka dibayar sesuai pekerjaan saya oleh pemilik lahan...."

Pemerintahan Daerah Kab. Probolinggo

"..Pemilik lahan bebas datang ke lahannya jam berapa saja dan tergantung waktu luang. Sedangkan untuk buruh tani datang ke lahan dan pulang dengan jam yang ketat, yaitu jam 6 hingga jam 10....."

Petani perempuan Kab. Probolinggo

Berbeda di Hulu Sungai Utara, biaya bertani biasanya akan ditanggung oleh buruh tani, sementara pemilik lahan akan meminta hasil bersih dari lahan yang digarap oleh buruh tani. Sehingga dapat terlihat dari hasil FGD bahwa buruh tani tampak sangat tidak berdaya dalam bertani.

"...Pemilik lahan hanya menerima bersih (tidak tahu apa-apa), biaya untuk modal (pestisida, insektisida, dll) tidak dicover oleh pemilik lahan, ditanggung oleh yang mengerjakan..."

Petani perempuan Kab. Hulu Sungai Utara

Selanjutnya keikutsertaan petani perempuan dalam pelatihan perencanaan keuangan memiliki potensi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Hal ini terlihat dari nilai parameter yang negatif namun tidak signifikan secara statistik. Kondisi menunjukkan bahwa keikutsertaan pelatihan belum tercermin besar dalam keseluruhan populasi walaupun parameternya bernilai negatif yaitu mampu menurunkan indeks ketidakberdayaan. Hal ini tercermin dari masih sedikitnya sampel petani perempuan yang pernah mengikuti pelatihan keuangan, yaitu hanya 6.9 persen dari total 1400 sampel petani perempuan. Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa paparan terhadap pelatihan masih perlu diperluas lagi. Faktor terakhir pada karakter individu adalah kepemilikan tabungan. Faktor ini digunakan sebagai proksi paparan layanan lembaga keuangan yang dapat diakses oleh petani perempuan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa memiliki tabungan mempunyai potensi untuk meningkatkan pemberdayaan petani

Foto oleh Yohanes Deobi:
<https://www.pexels.com/id-id/@yohanes-deobi-1228708/>





pixabay/vietnguyenbui

perempuan namun hasilnya belum mencerminkan keseluruhan sampel, karena hanya signifikan di Garut saja. Hal yang perlu digaris bawahi adalah, dari keseluruhan sampel yang menyatakan memiliki tabungan, 63 persen menyatakan bahwa mereka hanya menabung di rumah (tidak menabung di tempat lain). Kondisi ini yang perlu menjadi perhatian bahwa mayoritas petani perempuan tidak memiliki akses ke lembaga keuangan untuk melakukan investasi (tabungan).

Kelompok karakter kedua yang dapat mempengaruhi pemberdayaan perempuan petani adalah karakter rumah tangga. Berdasarkan hasil ditemukan bahwa status kepala rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemberdayaan perempuan petani. Sama halnya dengan pendidikan suami, secara umum tidak berpengaruh terhadap kondisi pemberdayaan perempuan kecuali di daerah Kolaka. Dimana didapatkan hasil bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan suami, maka semakin rendah indeks ketidakberdayaan petani perempuan. Selanjutnya, didapatkan bahwa status pekerjaan suami merupakan determinan yang signifikan menjelaskan tingkat ketidakberdayaan perempuan. Jika suami bekerja, maka tingkat pemberdayaan perempuan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan yang suaminya tidak bekerja. Hal ini mungkin dapat dijelaskan secara tidak langsung dari hasil FGD terkait alasan menjadi petani perempuan. Dari beberapa hasil FGD tampak bahwa faktor ekonomi menjadi dasar bagi perempuan untuk lebih berdaya di sektor pertanian. Salah satu alasan perempuan bekerja di sektor pertanian adalah membantu suami untuk bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Didasarkan alasan tersebut, perempuan juga mempunyai pekerjaan sampingan

selain menjadi petani untuk membantu ekonomi keluarga. Bahkan, di Probolinggo, beberapa suami dari petani perempuan bekerja sebagai perangkat desa, mereka selain bertani juga mempunyai pekerjaan sampingan lainnya serta aktif di kegiatan-kegiatan pembangunan desa

"... beberapa petani perempuan disini, suaminya ada yang menjadi perangkat desa. Nah.. biasanya ibu-ibunya selain menjadi petani juga mempunyai pekerjaan sampingan seperti berdagang. jadi hal ini cukup membantu ekonomi keluarga ..."

Petani perempuan Kab. Probolinggo

"...Kalau menurut pribadi saya daripada tinggal dirumah, saya lebih baik ikut suami untuk berkebun dan bertani. Membantu di kebun cengkeh dan merica. kami menjadi petani karena kami ikut suami ke kebun kakao (Coklat) untuk menambah ekonomi keluarga...."

Petani perempuan Kab. Kolaka

"... kami menjadi petani karena kami ingin membantu suami yang telah bekerja, itung itung bisa membantu ekonomi keluarga..."

Petani perempuan Kab. Hulu Sungai Utara

Dari beberapa statement petani perempuan tersebut, terlihat jika mereka lebih berdaya dengan mempunyai pekerjaan lainnya untuk membantu suaminya bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan status pekerjaan suami mampu mendorong tingkat pemberdayaan petani perempuan,

Faktor lain yang menjadi proksi karakter rumah tangga adalah kepemilikan rumah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa parameter kepemilikan rumah adalah negatif dan signifikan pada

derajat kesalahan 5 persen. Hal ini berarti, petani perempuan yang memiliki rumah sendiri cenderung memiliki indeks ketidakberdayaan yang lebih rendah jika dibandingkan petani perempuan yang tidak memiliki rumah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada kepemilikan harta maka petani perempuan akan semakin berdaya. Dua faktor lain yang berhubungan adalah jumlah anak dan jumlah tanggungan keluarga. Terdapat hasil yang menarik untuk kedua faktor ini. Pada hasil estimasi didapatkan hasil bahwa jumlah anak berpotensi meningkatkan pemberdayaan perempuan. Jadi semakin banyak jumlah anak maka indeks ketidakberdayaannya semakin rendah. Parameter ini tidak signifikan di keseluruhan sampel namun signifikan di Garut. Salah satu penyebabnya adalah petani perempuan di Kabupaten Garut mempunyai kecintaan yang besar menjadi petani meskipun peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan petani menjadi beban tersendiri bagi petani perempuan. Hal tersebut terlihat dari bagaimana pola asuh anak oleh petani perempuan di Kabupaten Garut. Keberadaan anak bagi petani perempuan menjadi salah satu faktor untuk lebih berdaya. Petani perempuan di Kabupaten Garut masih bekerja di lahan pertanian meskipun dalam kondisi hamil, dengan alasan pergi ke sawah untuk lebih banyak bergerak dan lebih sehat bagi kandungannya. Mereka tetap bekerja dengan hati-hati menghindari unsur-unsur kimia yang berbahaya seperti pestisida.

"...Saking cintanya kami dengan bertani, ketika kami hamil pun kami masih sering melakukan kegiatan bertani, biasanya itu kami ikut bantu jemur padi sambil olahraga. tapi kalo bantu-bantu yang berhubungan dengan pestisida kami sih enggak sampai berinteraksi dengan zat zat kimia yang berbahaya membantunya."

Petani perempuan Kab. Garut

Bahkan setelah melahirkan pun, anak-anaknya tetap menjadi motivasi untuk berdaya sebagai petani perempuan. Membawa anak ke ladang untuk menemani petani perempuan bekerja menjadi hal yang biasa, dikarenakan dengan membawa anak bermain di ladang petani perempuan masih bisa memantau tumbuh kembang anaknya. Ditambah lagi dengan budaya menitipkan anak di Tempat Penitipan Anak di Kabupaten Garut masih belum memadai. Kalau ada pun, petani perempuan enggan untuk menitipkan anaknya karena masih belum bisa percaya pada orang lain untuk memantau tumbuh kembang anak.

"...Setelah hamil kamipun biasanya bekerja kembali di lahan pertanian. yah,, biasanya jika anaknya sudah usia paling tidak 1 tahun ya. bahkan ada yang dari usia 7 bulan sudah diajak ke sawah juga. Ini ada cerita kakak ipar saya dulu punya bayi usia 7 bulan dibawa ke kebun, tapi sekarang anaknya juga sudah jadi dokter, nah hal itu sudah jadi budaya. itu tetap masih ada, ada yang 1 tahun sudah jalan mainnya tetep di kebun kebetulan di kebun nggak terlalu panas. Jadi ya jadi semangat saya bertanya dan juga anak bisa lebih terpantau ..."

Petani perempuan Kab. Garut

".. Jikalau ada tempat penitipan anak, bagi kami lebih baik anak kami bawa ke kebun, ya kami sulit percaya jika kami tinggal anak kami di tempat penitipan anak. jadi menurut saya masa pertumbuhan anak itu penting lo, jadi walaupun ada penitipan dan gratis saya memilih tidak menitipkannya, mending saya bawa ke kebun masa perkembangan dan pertumbuhan anak tidak bisa terulang lagi ..."

Petani perempuan Kab. Garut

Namun sebaliknya, di Kolaka, semakin banyak jumlah anak maka petani perempuan semakin tidak berdaya dengan parameter yang signifikan pada derajat kesalahan 1 persen. Hasil FGD dengan petani perempuan di Kolaka, mereka menyatakan bahwa sebagai petani dan ibu rumah tangga, petani perempuan harus pintar dalam mengatur waktu.

"... Untuk membagi waktu kita harus pintar-pintarnya saja bagi waktu bagaimana bisa mengatur semua nya selesai urusan rumah tangga kita baru melanjutkan yg lainnya ..."

Petani perempuan Kab. Kolaka

Dari pernyataan petani perempuan terse-



pixabay/truongdinhhanh

but terlihat bahwa petani perempuan masih harus mengatur waktunya untuk berbagi peran. Tentunya, bagi ibu yang memiliki banyak anak, beban ini bisa jauh lebih berat. Jika anak-anak masih kecil, mereka bahkan harus membawa anak-anak ke kebun atau meminta bantuan nenek atau kerabat untuk mengasuh, namun tidak semua orang memiliki akses ke dukungan tersebut.

Faktor terakhir adalah jumlah tanggungan keluarga. Sama halnya dengan jumlah anak, jumlah tanggungan keluarga juga berpotensi meningkatkan pemberdayaan perempuan petani. Parameter yang bernilai negatif dan signifikan didapatkan di lokus Lahat dan Kolaka. Hal ini berarti di dua daerah tersebut tanggungan keluarga signifikan secara statistik untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. Dari hasil jumlah anak dan jumlah tanggungan keluarga dapat disimpulkan bahwa anak dan tanggungan keluarga bukanlah penghalang bagi perempuan petani untuk berdaya. Sebaliknya anak dan tanggungan keluarga dapat menjadi motivasi untuk mereka semakin berdaya.

Hasil lengkap estimasi terkait faktor penentu tingkat ketidakberdayaan perempuan dapat dilihat pada Appendix 5.

Foto oleh Joe Fikar:
<https://www.pexels.com/id-id/@joe-fikar-799933673/>

BAB VIII

KESIMPULAN PENELITIAN & REKOMENDASI PRAKTIS



Kesimpulan Penelitian

Pertanyaan penelitian 1: Bagaimana kontribusi perempuan dalam sektor pertanian di Indonesia?

1. Berdasarkan hasil survey, adapun kontribusi perempuan dalam sektor pertanian di Indonesia dapat disimpulkan menjadi beberapa poin:
 - a. Mayoritas petani perempuan menggarap lahan sendiri. Namun luas lahan yang dimiliki mayoritas petani perempuan adalah kurang dari 2.500 m²
 - b. Mayoritas responden petani perempuan mengeluarkan modal kurang dari Rp11.000/m²
 - c. Petani perempuan menghabiskan waktu untuk bekerja di sektor pertanian secara rata-rata adalah 5-8 jam sehari untuk bekerja di sektor pertanian.
 - d. Range pendapatan sekali panen petani perempuan ini adalah antara 1 - 6 juta sekali panen untuk komoditas padi
 - e. Mayoritas responden menjual langsung hasil panen, hanya sebagian yang melakukan proses pengolahan.
2. Kendala yang dihadapi oleh petani perempuan:
 - a. Akses mendapatkan bibit, pupuk, pestisida
 - b. Kegiatan pasca panen termasuk terbatasnya pemasaran. Hal ini dikarenakan mayoritas memiliki akses hanya kepada tengkulak

Pertanyaan penelitian 2: Bagaimana potret pemberdayaan perempuan di sektor pertanian di Indonesia?

1. Dari hasil perhitungan indeks pemberdayaan perempuan – 5DE indeks didapatkan hasil bahwa mayoritas petani perempuan di wilayah penelitian masih tidak berdaya. Hal ini terlihat bahwa hanya 16 persen perempuan petani yang terkategori berdaya di seluruh sampel penelitian.
2. Jika dilihat dari masing-masing dimensi penyusun indeks pemberdayaan maka petani perempuan mayoritas berdaya pada indikator
 - a. Kepemilikan aset
 - b. Kontrol pendapatan (proporsi petani perempuan yang berdaya adalah lebih dari 90 persen)
 - c. Beban kerja
3. Sebaliknya, dimensi 5-DE yang memiliki proporsi perempuan yang tidak berdaya cukup besar adalah indikator:

- a. Input dalam keputusan produktif
- b. Otonomi pada kegiatan produksi
- c. Akses dan keputusan kredit
- d. Bicara di depan umum
- e. Waktu luang

4. Proporsi perempuan yang tidak berdaya mengkonfirmasi beberapa indikator utama yang perlu diperhatikan karena berkontribusi besar dalam ketidakberdayaan perempuan (melebihi bobot perhitungan ketidakberdayaan).

- a. Input dalam keputusan produktif
- b. Otonomi pada kegiatan produksi
- c. Akses dan keputusan kredit
- d. Anggota kelompok masyarakat
- e. Bicara di depan umum
- f. Waktu luang

Pertanyaan Penelitian 3: Apakah determinan dari pemberdayaan perempuan di sektor pertanian di Indonesia?

1. Pemberdayaan perempuan berpengaruh signifikan terhadap akses kebutuhan dasar (kesehatan, bantuan pemerintah dan permasalahan administrasi). Sehingga penting untuk tahu faktor yang dapat menjelaskan pemberdayaan perempuan.
2. Faktor yang terbukti signifikan dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan di sektor pertanian:
 - a. Keanggotaan Aisyiyah
 - b. Pendidikan petani perempuan, terutama pendidikan menengah dan tinggi
 - c. Usia produktif (19- 48 tahun)
 - d. Suami bekerja
 - e. Kepemilikan aset (rumah)
3. Faktor yang berpotensi dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan
 - a. Keanggotaan PKK
 - b. Pelatihan keuangan
 - c. Memiliki tabungan
 - d. Faktor yang dapat menurunkan tingkat pemberdayaan perempuan
 - e. Usia tua (> 48 tahun)
 - f. Status sebagai buruh (tidak menggarap lahan sendiri)

Rekomendasi Praktis

1. Program untuk merubah status KTP petani Perempuan yang awalnya sebagai Ibu Rumah Tangga menjadi Petani/Pekebun
2. Program peningkatan nilai tambah produk pertanian bagi petani perempuan
3. Program perluasan pemasaran untuk produk pertanian (misalnya online marketing)
4. Program peningkatan inklusifitas keuangan termasuk perluasan akses kredit bagi petani perempuan
5. Pelatihan perencanaan keuangan keluarga untuk meningkatkan literasi keuangan, termasuk didalamnya edukasi terkait pinjaman.
6. Meningkatkan keterlibatan aktif perempuan petani dalam keputusan publik sehingga semakin banyak perempuan petani yang dapat bicara di depan umum (Misalnya peningkatan keterlibatan dalam program Musrenbang desa)
7. Memperluas kesempatan keanggotaan petani perempuan dalam organisasi kemasyarakatan termasuk Aisyiyah
8. Program peningkatan pendidikan formal petani (Misal melalui Kejar Paket C)
9. Program peningkatan pemberdayaan untuk petani perempuan usia tua



Daftar Pustaka

- Acosta, M., van Wessel, M., van Bommel, S., Ampaire, E. L., Twyman, J., Jassogne, L., & Feindt, P. H. (2019). What does it Mean to Make a "Joint" Decision? Unpacking Intra-household Decision Making in Agriculture: Implications for Policy and Practice. *The Journal of Development Studies*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1650169>
- Aguilar, A., Carranza, E., Goldstein, M., Kilic, T., & Oseni, G. (2015). Decomposition of gender differentials in agricultural productivity in Ethiopia. *Agricultural Economics (United Kingdom)*, 46(3), 311–334. <https://doi.org/10.1111/agec.12167>
- Akpan, A. I., & Zikos, D. (2023). Rural Agriculture and Poverty Trap: Can Climate-Smart Innovations Provide Breakeven Solutions to Smallholder Farmers? *Environments*, 10(4), Article 4. <https://doi.org/10.3390/environments10040057>
- Akter, S., Rutsaert, P., Luis, J., Htwe, N. M., San, S. S., Raharjo, B., & Pustika, A. (2017). Women's empowerment and gender equity in agriculture: A different perspective from Southeast Asia. *Food policy*, 69, 270–279. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.05.003>
- Ali, D., Bowen, D., Deininger, K., & Duponchel, M. (2016). Investigating the Gender Gap in Agricultural Productivity: Evidence from Uganda. *World Development*, 87, 152–170. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.06.006>
- Alkire, S., Meinzen-Dick, R., Peterman, A., Quisumbing, A., Seymour, G., & Vaz, A. (2013). The Women's Empowerment in Agriculture Index. *World Development*, 52, 71–91. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.06.007>
- Alsop, R., Bertelsen, M. F., & Holland, J. (2006). Empowerment in practice: From analysis to implementation. World Bank Publications.
- Amber, Z., & Fakhar, S. (2019). Women's Empowerment in Agriculture. *International Journal of Advance Study and Research Work*, 2(5), 2581–5997. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3219294>
- Arifin, B. (2004). Analisis ekonomi pertanian Indonesia. PT Kompas Media Nusantara.
- Alvarez, L., & Lopez, M. (2013). From unheard screams to powerful voices: A case study of women's political empowerment in the Philippines 12th National Convention on Statistics (NCS) EDSA Shangri-La Hotel, Mandaluyong City. October 1st and 2nd 2013. *SAM Advanced Management Journal*, 1–31.
- Amber, Z., & Fakhar, S. (2019). Women's Empowerment in Agriculture. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3219294>
- Amnin, H., Ali, T., Ahmad, M., & Zafar, M. I. (2009). Participation level of rural women in agricultural activities. *Pak. J. Agri. Sci*, 46(4), 294–301.
- Asadullah, M. N., & Kambhampati, U. (2021). Feminization of farming, food security and female empowerment. *Global Food Security*, 29, 100532. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100532>
- Badan Pusat Statistik. (2023a). [Seri 2010] Distribusi PDB Triwulanan Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen), 2023. <https://www.bps.go.id/indicator/11/106/1/-seri-2010-distribusi-pdb-triwulanan-seri-2010-atas-dasar-harga-berlaku.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023b). Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Subsektor Menurut Jenis Kelamin, Indonesia, Tahun 2023. <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/st2023/223/0/0>

- Barbosa, M. W. (2024). Government Support Mechanisms for Sustainable Agriculture: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda. *Sustainability*, 16(5), 2185.
- Barbour, R. S. (2005). Making Sense of Focus Groups. *Medical Education*, 39(7), 742–750. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2005.02200.x>
- Batliwala, S. (2007). Taking the power out of empowerment – an experiential account. *Development in Practice*, 17(4–5), 557–565. <https://doi.org/10.1080/09614520701469559>
- Bayeh, E. (2016). The role of empowering women and achieving gender equality to the sustainable development of Ethiopia. *Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences*, 2(1), 37–42. <https://doi.org/10.1016/j.psr.b.2016.09.013>
- Bhandari, P. (2020b). Descriptive Statistics. Scribbr website. <https://www.scribbr.com/statistics/descriptive-statistics/>
- Dawson, S., Manderson, L., & Tallo, V. L. (1993). A manual for the use of focus groups. Boston: International Nutrition Foundation for Developing Countries (INFDC).
- Dewi, E. Y., Yuliani, E., & Rahman, B. (2022). ANALISIS PERAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN WILAYAH. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(2), 229. <https://doi.org/10.30659/jkr.v2i2.20961>
- Doss, C. (2014). *If women hold up half the sky, how much of the world's food do they produce?* Springer.
- Duflo, E. (2012). Women Empowerment and Economic Development. *Journal of Economic Literature*, 50(4), 1051–1079. <https://doi.org/10.1257/jel.50.4.1051>
- Fuglie, K. O. (2004). Productivity growth in Indonesian agriculture, 1961–2000. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 40(2), 209–225.
- Ghosh, M. K., Hasan, S. S., Fariha, R., Bari, M. O., & Parvin, M. A. (2021). Women empowerment through agriculture in Chapainawabganj, Bangladesh. *European Journal of Agriculture and Food Sciences*, 3(1), 153–160. <https://doi.org/10.24018/ejfood.2021.3.1.235>
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gillespie, S., Poole, N., van den Bold, M., Bhavani, R. V., Dangour, A. D., & Shetty, P. (2019). Leveraging agriculture for nutrition in South Asia: What do we know, and what have we learned? *Food Policy*, 82, 3–12. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.10.012>
- Glover, J. L. (2014). Gender, power and succession in family farm business. *International journal of gender and entrepreneurship*, 6(3), 276–295. <https://doi.org/10.1108/IJGE-01-2012-0006>
- Gujarati, D.N. (1988). *Basic Econometrics*. Second Edition. McGraw Hill Book Company.
- Gupta, S., Vemireddy, V., Singh, D., & Pingali, P. (2019). Adapting the Women's empowerment in agriculture index to specific country context: Insights and critiques from fieldwork in India. *Global Food Security*, 23(April), 245–255. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.09.002>
- Herrendorf, B., & Schoellman, T. (2015). Why is measured productivity so low in agriculture? *Review of Economic Dynamics*, 18(4), 1003–1022. <https://doi.org/10.1016/j.red.2014.10.006>
- Hosmer, D.W., dan S. Lemeshow. (2000). *Applied Logistic Regression*. Edisi kedua. John Wiley and Sons Inc, Canada

- Isbah, U., & Iyan, R. Y. (2016). Analisis peran sektor pertanian dalam perekonomian dan kesempatan kerja di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 7(19), 45–54.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and change*, 30(3), 435–464.
- Kabunga, N. S., Dubois, T., & Qaim, M. (2012). Heterogeneous information exposure and technology adoption: The case of tissue culture bananas in Kenya. *Agricultural Economics*, 43(5), 473–486. <https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2012.00597.x>
- Kadir, K., & Amalia, R. R. (2016). Economic growth and poverty reduction: The role of the agricultural sector in rural Indonesia.
- Khan, M. E., & Manderson, L. (1992). Focus Groups in Rapid Assessment Procedures. *Food and Nutrition Bulletin*, 14(2), 1–9. <https://doi.org/10.1177/156482659201400218>
- Kilic, T., Palacios-López, A., & Goldstein, M. (2015). Caught in a Productivity Trap: A Distributional Perspective on Gender Differences in Malawian Agriculture. *World Development*, 70, 416–463. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.06.017>
- Ligon, E., & Sadoulet, E. (2018). Estimating the Relative Benefits of Agricultural Growth on the Distribution of Expenditures. *World Development*, 109, 417–428. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.007> Pusat Data dan Informasi Pertanian. (2023a). Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2023. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Analisis_PDB_Sektor_Pertanian_2023.pdf
- Malhotra, A., Schulte, J., & Patel, P. (2009). Innovation for women's empowerment and gender equality. International Center for Research on Women (ICRW).
- Martinez, E. M., Myers, E. C., & Pereira, A. (2020). The women's empowerment in agriculture index. In *Routledge Handbook of Gender and Agriculture* (pp. 298–312). Routledge.
- Mehra, R. (1997). Women, empowerment, and economic development. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 554(1), 136–149.
- Mobarok, M. H., Skevas, T., & Thompson, W. (2021). Women's empowerment in agriculture and productivity change: The case of Bangladesh rice farms. *PLoS ONE*, 16(8), e0255589. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255589>
- Mukasa, A. N., & Salami, A. O. (2015). Gender productivity differentials among smallholder farmers in Africa: A cross-country comparison. Abidjan: African Development Bank.
- Munday, J. (2006). Identity in Focus: The Use of Focus Groups to Study the Construction of Collective Identity. *Sociology*, 40(1), 89–105. <https://doi.org/10.1177/0038038506058436>
- Narayan-Parker, D. (2002). Empowerment and poverty reduction: A sourcebook. World Bank Publications.
- Narayan-Parker, D. (2005). Measuring empowerment: Cross-disciplinary perspectives. World Bank Publications.
- Narayan, D. (2007). Empowerment. *Journal of Ambulatory Care Management*, 30(2), 120–125. <https://doi.org/10.1097/01.JAC.0000264601.19629.5f>

- Negin, J., Remans, R., Karuti, S., & Fanzo, J. C. (2009). Integrating a broader notion of food security and gender empowerment into the African Green Revolution. *Food Security*, 1, 351-360. <https://doi.org/10.1007/s12571-009-0025-z>
- Octania, G. (2020). Agriculture Resilient to Pandemic's Impact. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/08/agriculture-resilient-to-pandemics-impact.html>
- Ogundipe, A., Oduntan, E. A., Adebayo, O., & Olagunju, K. (2016). Agricultural productivity, poverty reduction and inclusive growth in Africa: Linkages and pathways. *Poverty Reduction and Inclusive Growth in Africa: Linkages and Pathways* (October 20, 2016).
- Palacios-López, A., & López, R. (2015). The Gender Gap in Agricultural Productivity: The Role of Market Imperfections. *Journal of Development Studies*, 51(9), 1175-1192. <https://doi.org/10.1080/00220388.2015.1028539>
- Peterman, A., Behrman, J. A., & Quisumbing, A. R. (2014). A Review of Empirical Evidence on Gender Differences in Nonland Agricultural Inputs, Technology, and Services in Developing Countries. Dalam A. R. Quisumbing, R. Meinzen-Dick, T. L. Raney, A. Croppenstedt, J. A. Behrman, & A. Peterman (Ed.), *Gender in Agriculture: Closing the Knowledge Gap* (hlm. 145-186). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8616-4_7
- Pusat Data dan Informasi. (2023b). Perkembangan Tenaga Kerja dan Produktivitasnya pada Sektor Pertanian Indonesia. Jakarta:Kementerian Pertanian. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Perkembangan_Tenaga_Kerja_dan_Produktivitasnya_Pada_Sektor_Pertanian_Indonesia.pdf
- Rao, S. (2011). Work and Empowerment: Women and Agriculture in South India. *The Journal of Development Studies*, 47(2), 294-315. <https://doi.org/10.1080/00220388.2010.506910>
- Rowlands, J. (1995). Empowerment Examined. *Development in Practice*, 5(2), 101-107. <https://doi.org/10.1080/0961452951000157074>
- Sadaf, S., Javed, A., & Luqman, M. (2006). Preferences of rural women for agricultural information sources: A case study of District Faisalabad-Pakistan. *Journal of Agriculture & Social Sciences*, 2(3), 145-149.
- Saifuloh, N. I., & Nursini, N. (2022). Dilema Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Melalui Sektor Pertanian. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.32528/nms.v1i2.59>
- Seymour, G., Malapit, H., & Quisumbing, A. (2020). Measuring Time Use in Developing Country Agriculture: Evidence from Bangladesh and Uganda. *Feminist Economics*, 26(3), 169-199. <https://doi.org/10.1080/13545701.2020.1749867>
- Shradha, & Kumar, M. (2020). Women empowerment in agriculture sector. *Journal of Critical Reviews*, 7(10), 1434-1438.
- Solana, A. (2021). Analisis Prioritas Pembangunan Subsektor Pertanian Tanaman Pangan Dalam Kaitannya Dengan Tingkat Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan Di Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Official Statistics 2021*, 130-138. <https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/view/790>
- Suyono. (2015). Analisis Regresi untuk Penelitian. Deepublish: Yogyakarta
- Steensland, A., & Zeigler, M. (2021). Productivity in agriculture for a sustainable future.

- Valerio, E., Hilmiati, N., Thei, R. S., Barraza, A. S., & Prior, J. (2024). Innovation for whom? The case of women in cattle farming in Nusa Tenggara Barat, Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 106, 103198. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103198>
- Van Eeuwijk, P., & Angehrn, Z. (2017). How to... conduct a focus group discussion (FGD). *Methodological Manual*.
- Warsito, T. (2020). Produktivitas Sebagai Penentu Disparitas Pendapatan Antardaerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i3.525>
- Wilkinson, S. (2004). Focus Group Research. *Qualitative research: Theory, method, and practice* 2, 177-199.
- Yue, S., Xue, Y., Lyu, J., & Wang, K. (2023). The Effect of Information Acquisition Ability on Farmers' Agricultural Productive Service Behavior: An Empirical Analysis of Corn Farmers in North east China. *Agriculture*, 13(3), 573. <https://doi.org/10.3390/agriculture13030573>

Appendix

Appendix 1. Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Akses Bantuan Pemerintah - BPJS

	All Samples	Probolinggo	Garut	Kolaka	Lahat
	bpjs	bpjs	bpjs	bpjs	bpjs
cik	-5.615***	-1.917**	-4.102***	-2.055	-0.985
	(0.234)	(0.956)	(1.063)	(1.594)	(2.390)
_cons	1.810***	1.013***	1.418***	1.656***	1.480***
	(0.0480)	(0.238)	(0.269)	(0.351)	(0.507)
First stage					
cik					
1.CSO_d	-0.00940*	-0.0594***	-0.00464	-0.000998	-0.0371**
	(0.00547)	(0.0161)	(0.0171)	(0.0193)	(0.0171)
1.education	0.0000723	-0.0225	0.00511	0.00481	0.00495
	(0.00623)	(0.0204)	(0.0287)	(0.0264)	(0.0266)
2.education	-0.0200*	-0.0931***	-0.0695*	-0.0400	-0.00220
	(0.00980)	(0.0339)	(0.0356)	(0.0322)	(0.0315)
3.education	-0.0422*	-0.0233	-0.0601	-0.136***	-0.0362
	(0.0179)	(0.0606)	(0.0550)	(0.0455)	(0.0645)
1.perkawinan_d	-0.00746	0.0339	-0.0627	0.0453	-0.0236
	(0.0132)	(0.0398)	(0.0574)	(0.0812)	(0.0536)
1.kepalaRT	-0.00921	-0.00951	-0.0307	0.0178	-0.0495
	(0.0137)	(0.0402)	(0.0598)	(0.0804)	(0.0575)
umur	-0.00159	-0.0130***	-0.00641	-0.00105	-0.0122**
	(0.00141)	(0.00426)	(0.00430)	(0.00566)	(0.00592)
umur2	0.0000161	0.000144***	0.0000593	0.0000136	0.000120**
	(0.0000144)	(0.0000411)	(0.0000450)	(0.0000607)	(0.0000611)
1.suami_bekerja	0.00354	0.0149	-0.00817	-0.132*	-0.0877
	(0.0152)	(0.0843)	(0.0358)	(0.0766)	(0.0821)
1.education_husband	-0.00976	0.0130	-0.0204	-0.0488*	-0.0126
	(0.00651)	(0.0209)	(0.0280)	(0.0269)	(0.0293)
2.education_husband	0.00265	0.0493*	-0.0194	-0.0519	-0.0169

	(0.00729)	(0.0286)	(0.0312)	(0.0335)	(0.0303)
3.education_husband	-0.0354*	-0.0334	-0.0578	-0.0146	0.0443
	(0.0158)	(0.0479)	(0.0514)	(0.0475)	(0.0651)
1.buruh	0.0118	0.0936***	-0.0120	0.0756**	0.0619
	(0.00720)	(0.0168)	(0.0175)	(0.0323)	(0.0405)
1.rumah	-0.00680	-0.0725**	-0.0102	-0.0808**	0.00217
	(0.00919)	(0.0323)	(0.0326)	(0.0339)	(0.0369)
1.pelatihan	-0.0181*	-0.0817*	0.00192	0.0104	0.130***
	(0.00902)	(0.0453)	(0.0310)	(0.0346)	(0.0270)
1.tabungan	0.00246	-0.00838	0.0361**	-0.00866	0.0162
	(0.00424)	(0.0145)	(0.0161)	(0.0177)	(0.0171)
1.PKK	-0.0150**	-0.00781	-0.0185	-0.0258	-0.00828
	(0.00582)	(0.0228)	(0.0247)	(0.0206)	(0.0177)
n_anak	-0.00139	-0.00316	-0.0189***	0.0219***	-0.00382
	(0.00172)	(0.00870)	(0.00511)	(0.00830)	(0.00829)
n_tanggungan	-0.00382*	-0.00437	0.00564	-0.0129*	-0.0199***
	(0.00176)	(0.00566)	(0.00606)	(0.00719)	(0.00765)
_cons	0.352***	0.584***	0.564***	0.516***	0.713***
	(0.0452)	(0.152)	(0.109)	(0.151)	(0.160)
Kab FE	YES				
N	1400	400	300	400	300
Standard errors in parentheses					
* p<0.10	** p<0.05	** p<0.01	*** p<0.001"		

Appendix 2. Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Akses Bantuan Pemerintah – PKH

	All Samples	Probolinggo	Garut	Kolaka	Lahat
	PKH	PKH	PKH	PKH	PKH
cik	5.804***	3.599***	-3.614	5.209***	-2.294
	(0.342)	(0.799)	(2.342)	(0.314)	(2.803)
_cons	-1.746***	-1.405***	0.402	-1.719***	0.216
	(0.0451)	(0.197)	(0.774)	(0.0903)	(0.755)
First stage					
cik					
1.CSO_d	-0.00315	-0.0380**	-0.0142	0.00571	-0.0342**
	(0.00605)	(0.0167)	(0.0200)	(0.0107)	(0.0163)
1.education	0.00193	-0.0272	0.0385	0.0163	0.000301
	(0.00578)	(0.0193)	(0.0313)	(0.0146)	(0.0257)
2.education	-0.00787	-0.107***	-0.0199	-0.0216	-0.0292
	(0.0103)	(0.0325)	(0.0458)	(0.0182)	(0.0353)
3.education	-0.0465	-0.0632	0.0256	-0.0916***	-0.0212
	(0.0239)	(0.0588)	(0.0580)	(0.0332)	(0.0639)
1.perkawinan_d	0.0167	0.0414	-0.0379	0.0671	-0.0409
	(0.0144)	(0.0380)	(0.0705)	(0.0538)	(0.0514)
1.kepalaRT	0.0285	0.0172	-0.0277	0.0781	-0.0690
	(0.0169)	(0.0387)	(0.0674)	(0.0536)	(0.0553)
umur	-0.000705	-0.0119***	-0.00957**	-0.00400	-0.0154***
	(0.00175)	(0.00416)	(0.00456)	(0.00322)	(0.00470)
umur2	0.00000886	0.000127***	0.0000961**	0.0000466	0.000149** *
	(0.0000183)	(0.0000407)	(0.0000475)	(0.0000347)	(0.0000490)
1.suami_bekerja	-0.0105	0.0238	-0.0271	-0.0764*	-0.0833
	(0.0170)	(0.0799)	(0.0391)	(0.0439)	(0.0799)
1.education_husband	-0.00271	0.0149	-0.0170	-0.0231	-0.0150
	(0.00616)	(0.0200)	(0.0319)	(0.0158)	(0.0272)
2.education_husband	-0.0200	0.0250	-0.00659	-0.0472**	-0.00644

	(0.0114)	(0.0280)	(0.0354)	(0.0194)	(0.0303)
3.education_husband	-0.0483*	-0.0398	-0.0483	-0.0311	0.0599
	(0.0197)	(0.0463)	(0.0625)	(0.0284)	(0.0619)
1.buruh	0.0223	0.106***	-0.0138	0.0180	0.0397
	(0.0148)	(0.0153)	(0.0197)	(0.0197)	(0.0471)
1.rumah	-0.00762	-0.0713**	-0.0151	-0.0144	-0.00389
	(0.0108)	(0.0308)	(0.0414)	(0.0213)	(0.0360)
1.pelatihan	0.00622	-0.136***	-0.0124	-0.0280	0.0971*
	(0.00894)	(0.0424)	(0.0362)	(0.0194)	(0.0542)
1.tabungan	-0.00171	0.000753	0.0356*	-0.0191*	0.0120
	(0.00379)	(0.0139)	(0.0182)	(0.0102)	(0.0177)
1.PKK	0.00113	0.00747	-0.00946	0.0120	0.00619
	(0.00475)	(0.0212)	(0.0269)	(0.0112)	(0.0210)
n_anak	0.00395*	-0.000653	-0.0194***	0.0150***	-0.00216
	(0.00196)	(0.00838)	(0.00536)	(0.00563)	(0.00827)
n_tanggungan	0.00318	0.00453	-0.00166	-0.00255	-0.0201***
	(0.00164)	(0.00505)	(0.00779)	(0.00425)	(0.00669)
_cons	0.267***	0.514***	0.614***	0.392***	0.813***
	(0.0469)	(0.149)	(0.117)	(0.0952)	(0.138)
Kab FE	YES				
N	1400	400	300	400	300
Standard errors in parentheses					
* p<0.10	** p<0.05	** p<0.01	*** p<0.001"		

Appendix 3. Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Akses Bantuan Pemerintah – BPNT

	All Samples	Probolinggo	Garut	Kolaka	Lahat
	BPNT	BPNT	BPNT	BPNT	BPNT
cik	5.047***	4.067***	-5.728***	4.392***	-2.110
	(0.404)	(0.670)	(1.376)	(0.494)	(1.744)
_cons	-1.598***	-1.345***	1.442***	-1.541***	0.0631
	(0.0834)	(0.175)	(0.489)	(0.117)	(0.487)
First stage					
cik					
1.CSO_d	-0.0163*	-0.0362**	0.0102	0.0147	-0.0240
	(0.00729)	(0.0158)	(0.0119)	(0.0127)	(0.0176)
1.education	-0.00946	-0.0369**	0.0204	0.0191	0.0199
	(0.00896)	(0.0184)	(0.0245)	(0.0174)	(0.0263)
2.education	-0.0374**	-0.117***	-0.00380	-0.0216	0.00186
	(0.0126)	(0.0311)	(0.0291)	(0.0212)	(0.0292)
3.education	-0.0710***	-0.0865	0.0131	-0.101***	-0.0231
	(0.0215)	(0.0568)	(0.0369)	(0.0361)	(0.0617)
1.perkawinan_d	0.0303	0.0487	-0.0186	0.101*	-0.0401
	(0.0195)	(0.0362)	(0.0493)	(0.0599)	(0.0505)
1.kepalaRT	0.0274	0.0141	-0.0185	0.0745	-0.0683
	(0.0200)	(0.0366)	(0.0464)	(0.0595)	(0.0543)
umur	-0.00462*	-0.0110***	-0.00422	-0.00208	-0.0121**
	(0.00203)	(0.00402)	(0.00463)	(0.00377)	(0.00504)
umur2	0.0000524*	0.000121***	0.0000311	0.0000184	0.000114**
	(0.0000210)	(0.0000392)	(0.0000445)	(0.0000406)	(0.0000533)
1.suami_bekerja	-0.0236	0.00390	-0.00662	-0.0830	-0.115
	(0.0224)	(0.0737)	(0.0275)	(0.0511)	(0.0787)
1.education_husband	0.00213	0.0209	-0.0124	-0.0319*	-0.0181
	(0.00894)	(0.0191)	(0.0199)	(0.0186)	(0.0269)
2.education_husband	-0.0284**	0.0248	0.0180	-0.0795***	-0.0126

	(0.0109)	(0.0266)	(0.0219)	(0.0225)	(0.0286)
3.education_husband	-0.0456*	-0.0274	0.00386	-0.0388	0.0718
	(0.0193)	(0.0437)	(0.0442)	(0.0327)	(0.0620)
1.buruh	0.0456***	0.101***	-0.0266	0.0175	0.0520
	(0.0106)	(0.0154)	(0.0191)	(0.0233)	(0.0393)
1.rumah	-0.0227	-0.0643**	-0.00544	-0.0379	0.00248
	(0.0131)	(0.0297)	(0.0272)	(0.0250)	(0.0340)
1.pelatihan	0.00983	-0.143***	-0.0112	-0.00749	0.106***
	(0.0120)	(0.0413)	(0.0214)	(0.0218)	(0.0343)
1.tabungan	0.00133	0.00376	0.0138	-0.0101	0.0220
	(0.00597)	(0.0133)	(0.0207)	(0.0117)	(0.0160)
1.PKK	0.00226	0.0130	0.00328	-0.00376	-0.00292
	(0.00740)	(0.0203)	(0.0173)	(0.0134)	(0.0168)
n_anak	0.00334	-0.000972	-0.00838	0.0186***	-0.00443
	(0.00245)	(0.00792)	(0.00933)	(0.00636)	(0.00763)
n_tanggungan	0.00213	0.00405	-0.00604	-0.00740	-0.0200***
	(0.00227)	(0.00479)	(0.00418)	(0.00514)	(0.00664)
_cons	0.375***	0.499***	0.461**	0.377***	0.752***
	(0.0607)	(0.140)	(0.179)	(0.107)	(0.141)
Kab FE	YES				
N	1400	400	300	400	300
Standard errors in parentheses					
* p<0.10	** p<0.05	** p<0.01	*** p<0.001"		

Appendix 4. Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Permasalahan Administrasi

	All Samples	Probolinggo	Garut	Kolaka	Lahat
	admin_problem	admin_problem	admin_problem	admin_problem	admin_problem
cik	6.040***	-0.513	-6.547	-2.606	6.106***
	(0.117)	-1.232	-6.407	-2.191	(0.457)
_cons	-1.514***	0.898***	5.163**	2.018***	-1.536***
	(0.0567)	(0.325)	-2.114	(0.263)	(0.118)
First stage					
cik					
1.CSO_d	-0.0163*	-0.0541***	-0.0234	0.0127	-0.0117
	(0.00729)	(0.0168)	(0.0184)	(0.0235)	(0.00915)
1.education	-0.00946	-0.0265	0.0259	0.0129	0.00389
	(0.00896)	(0.0213)	(0.0323)	(0.0254)	(0.0128)
2.education	-0.0374**	-0.0937***	-0.0427	-0.0162	-0.0125
	(0.0126)	(0.0353)	(0.0412)	(0.0322)	(0.0148)
3.education	-0.0710***	-0.0300	0.00842	-0.105*	0.0637
	(0.0215)	(0.0637)	(0.0598)	(0.0543)	(0.0392)
1.perkawinan_d	0.0303	0.0257	-0.0697	0.00229	-0.00448
	(0.0195)	(0.0415)	(0.0662)	(0.0920)	(0.0244)
1.kepalaRT	0.0274	-0.00592	-0.0457	-0.0160	-0.0135
	(0.0200)	(0.0419)	(0.0692)	(0.0852)	(0.0271)
umur	-0.00462*	-0.0134***	-0.00804*	0.0000816	-0.00853**
	(0.00203)	(0.00466)	(0.00480)	(0.00577)	(0.00370)
umur2	0.0000524*	0.000147***	0.0000813	0.00000479	0.0000704**
	(0.0000210)	(0.0000439)	(0.0000501)	(0.0000607)	(0.0000353)
1.suami_bekerja	-0.0236	-0.0165	-0.0330	-0.124	0.00505
	(0.0224)	(0.0874)	(0.0406)	(0.0805)	(0.0426)
1.education_husband	0.00213	0.0101	-0.00444	-0.0466	-0.0232
	(0.00894)	(0.0226)	(0.0323)	(0.0284)	(0.0142)
2.education_husband	-0.0284**	0.0370	-0.0168	-0.0536	-0.0273*
	(0.0109)	(0.0306)	(0.0360)	(0.0345)	(0.0157)

3.education_husband	-0.0456*	-0.0160	-0.0780	-0.0108	-0.0197
	(0.0193)	(0.0494)	(0.0570)	(0.0458)	(0.0337)
1.buruh	0.0456***	0.102***	-0.0187	0.0857***	0.0144
	(0.0106)	(0.0160)	(0.0199)	(0.0308)	(0.0201)
1.rumah	-0.0227	-0.0798**	-0.0390	-0.0539	0.00706
	(0.0131)	(0.0336)	(0.0360)	(0.0416)	(0.0166)
1.pelatihan	0.00983	-0.113**	0.00315	-0.0254	0.0390*
	(0.0120)	(0.0441)	(0.0359)	(0.0351)	(0.0222)
1.tabungan	0.00133	-0.00811	0.0387**	-0.0135	0.00968
	(0.00597)	(0.0169)	(0.0182)	(0.0168)	(0.00843)
1.PKK	0.00226	0.00679	-0.00469	-0.0438	0.00740
	(0.00740)	(0.0232)	(0.0285)	(0.0272)	(0.00824)
n_anak	0.00334	-0.00665	-0.0179***	0.0180*	-0.0134***
	(0.00245)	(0.00905)	(0.00562)	(0.0103)	(0.00485)
n_tanggungan	0.00213	0.00157	0.00315	-0.0100	-0.00328
	(0.00227)	(0.00558)	(0.00703)	(0.00804)	(0.00393)
_cons	0.375***	0.628***	0.625***	0.486***	0.521***
	(0.0607)	(0.165)	(0.115)	(0.161)	(0.120)
Kab FE	YES				
N	1400	400	300	400	300
Standard errors in parentheses					
* p<0.10	** p<0.05	** p<0.01	*** p<0.001"		

Appendix 5. Hasil Estimasi Determinan Pemberdayaan Perempuan

	All Samples	Probolinggo	Garut	Kolaka	Lahat
	cik				
1.CSO_d	-0.0312***	-0.0535***	-0.0232	-0.00568	-0.0341**
	(0.00927)		(0.0190)	(0.0200)	(0.0173)
1.pendidikan dasar	0.00213	-0.0277	0.0256	0.00824	0.00431
	(0.0135)	(0.0217)	(0.0334)	(0.0278)	(0.0278)
2.pendidikan menengah	-0.0391**	-0.0956***	-0.0433	-0.0290	-0.00690
	(0.0172)	(0.0361)	(0.0425)	(0.0331)	(0.0317)
3.pendidikan tinggi	-0.0771***	-0.0358	0.00804	-0.132***	-0.0335
	(0.0277)	(0.0644)	(0.0619)	(0.0478)	(0.0671)
1.perkawinan_d	0.00713	0.0273	-0.0699	0.0587	-0.0273
	(0.0287)	(0.0426)	(0.0685)	(0.0844)	(0.0554)
1.kepalaRT	0.00408	-0.00720	-0.0449	0.0271	-0.0519
	(0.0296)	(0.0431)	(0.0716)	(0.0843)	(0.0598)
umur	-0.0100***	-0.0142***	-0.00805	-0.00236	-0.0139***
	(0.00244)	(0.00445)	(0.00497)	(0.00585)	(0.00512)
umur2	0.000103** *	0.000153***	0.0000810	0.0000258	0.000138***
	(0.0000252)	(0.0000430)	(0.0000519)	(0.0000631)	(0.0000531)
1.suami_bekerja	-0.0631**	-0.0233	-0.0336	-0.154**	-0.0915
	(0.0318)	(0.0888)	(0.0419)	(0.0762)	(0.0851)
1.education_husband	-0.0161	0.0130	-0.00456	-0.0550**	-0.00741
	(0.0132)	(0.0225)	(0.0334)	(0.0273)	(0.0291)
2.education_husband	-0.0176	0.0405	-0.0167	-0.0682**	-0.0146
	(0.0157)	(0.0307)	(0.0373)	(0.0308)	(0.0314)
3.education_husband	-0.0233	-0.0119	-0.0780	-0.00767	0.0505
	(0.0269)	(0.0502)	(0.0590)	(0.0497)	(0.0667)
1.buruh	0.0555***	0.102***	-0.0186	0.0702**	0.0605
	(0.0119)	(0.0163)	(0.0206)	(0.0343)	(0.0423)
1.kepemilikan rumah	-0.0441**	-0.0830**	-0.0391	-0.0783**	0.00723
	(0.0179)	(0.0339)	(0.0372)	(0.0358)	(0.0373)
1.pelatihan	-0.0198	-0.113**	0.00350	-0.00652	-0.131***

	(0.0175)	(0.0454)	(0.0372)	(0.0337)	(0.0277)
1.tabungan	-0.00631	-0.00415	-0.0381**	-0.0127	0.0177
	(0.00881)	(0.0155)	(0.0186)	(0.0184)	(0.0176)
1.PKK	-0.00339	0.00535	-0.00453	-0.0174	-0.00675
	(0.0109)	(0.0237)	(0.0294)	(0.0208)	(0.0183)
n_anak	-0.00159	-0.00749	-0.0178***	0.0242***	-0.00487
	(0.00368)	(0.00915)	(0.00581)	(0.00818)	(0.00840)
n_tanggungan	-0.00315	0.000954	0.00299	-0.0136*	-0.0179**
	(0.00336)	(0.00561)	(0.00722)	(0.00747)	(0.00731)
Kab FE	Yes				
N	1400	400	300	400	300
Standard errors in parentheses					
* p<0.10		** p<0.05	*** p<0.01"		

Halaman ini sengaja dikosongkan

